

Menuju Perencana Profesional

SIMPUL

Perencana

SOLIDARITAS SOSIAL DALAM PENANGANAN COVID-19

MENUJU INDONESIA TANGGUH
INDONESIA TUMBUH



ISSN 1693-4229 | Pos-el: simpul@bappenas.go.id

WAWANCARA EKSKLUSIF:

WANDA PONIKA (DESAINER FESYEN DAN INISIATOR GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT) | **ALISSA WAHID** (PSIKOLOG, KOORDINATOR JARINGAN GUSDURIAN PEDULI, PENGGAGAS GERAKAN MUSLIM MODERAT) | **ALIF IMAN NURLAMBANG** (AKTIVIS SOSIAL, PENGGAGAS GERAKAN SOLIDARITAS SEJUTA TES ANTIGEN) | **SETO MULYADI** (PSIKOLOG ANAK, KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA) | **WARSONO** (PENERIMA BANTUAN SOSIAL DI WILAYAH KOTA DEPOK, JAWA BARAT)

CALL FOR PAPERS

The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning (JISDeP) is a journal published by Centre for Planners' Development, Education, and Training (Pusbindiklatren), Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency Republic of Indonesia (Bappenas) and supported by Indonesian Development Planners Association (PPPI).

This journal aimed at studying the issues of sustainable development from around the world to later be used as policy material in sustainable development planning in Indonesia, developing countries, and the world in general. This journal absorbs theoretical scientific studies as well as empirical experiences from researchers around the world, primarily from researchers who specialize in developing countries, to then publish them all widely to international forums as an applicable and innovative knowledge.

This journal gives important weight to the issue of sustainable development planning with regard to the mental and spiritual development of the people of Indonesia and the people of the world in terms of politics, economics, social, culture, environment, peace and justice, energy, and other strategic issues about sustainable development planning.

... RESEARCH PAPER

... POLICY PAPER

... COMMENTARY

... BOOK REVIEW

Peer Review Process

JISDeP is an open access journal. All of the research article submitted in this journal will be provided in online version and can be free full downloaded. JISDeP also uses peer-review process by blind reviewer. The decision of accepted or not the article is determined by the agreement of both of editor's board and the reviewer.

Publication Frequency

JISDeP are published three times a year which are in April, August, and December of respective year.

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. All articles published will be immediately and permanently free for everyone to read and download.

Guidance for Submission

- 1 The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in "Comments to the Editor").
- 2 The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
- 3 Where available, URLs for the references have been provided.
- 4 The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
- 5 The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.
- 6 If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in "Ensuring a Blind Review" have been followed.



Register and Login as Author to:
journal.pusbindiklatren.bappenas.go.id

Submit Paper Before:
FEBRUARY 15TH, 2022

Indexed by:



Published by:



Supported by:



Follow Us:





SIMPUL PERENCANA (SIMPUL)

Diterbitkan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas

PELINDUNG

Menteri PPN/Kepala Bappenas

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Kementerian PPN/
Sekretaris Utama Bappenas

PEMIMPIN UMUM

Kepala Pusbindiklatren Bappenas

DEWAN REDAKSI

Wignyo Adiyoso, Rita Miranda, Ali Muharam,
Pandu Pradhana, Wily Witarni, Dwi Harini S. Tyas,
Hari Nasiri Mochtar, Lilly Widayati, Teresna Murti,
Feita Puspita Murti, M. Iksan Maolana

PEMIMPIN REDAKSI

Karyoto

EDITOR

Hafidh Aditama

DESAIN SAMPUK & TATA LETAK ISI

Hafidh Aditama, Dian Reza Febriani

DISTRIBUSI DAN PUBLIKASI

Maslakh Murni, Jelita Wiedoko, Diana Ayu Ahira,
Oka Dwi Quarhanda Mugianto

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Agustin Setyaningsih, Nita Agustin, Dwiyanto
Bambang Purwanto

ALAMAT REDAKSI

Pusbindiklatren Bappenas
Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta 10320
Telepon (021) 319 28280, 319 28285
Pos-el: simpul@bappenas.go.id

Unduh majalah versi PDF di:

bit.ly/baca-simpul atau

bit.ly/issuu-pusbindiklatren

Dari Kami

Salam Perencana!

Tak terasa, kita telah sampai pada penghujung tahun 2021. Pandemi Covid-19 masih tajuk cerita di setiap sisi kehidupan masyarakat. Munculnya varian Delta membuat kasus konfirmasi positif dan meninggal pada semester awal 2021 meningkat drastis.

Pemerintah kemudian mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ke seluruh masyarakat. Ibarat *roller coaster*, pada bulan-bulan akhir tahun 2021, kasus Covid-19 di Indonesia justru menurun drastis, meskipun muncul lagi varian Omicron. PPKM pun mulai dilonggarkan sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan lebih leluasa, meskipun dengan protokol kesehatan yang selalu terjaga.

Keberhasilan vaksinasi Covid-19 tak lepas dari dukungan dan solidaritas sebagian masyarakat yang turut membantu pemerintah demi tujuan bersama memusnahkan pandemi dari bumi Indonesia. Dalam rubrik Cakrawala SIMPUL Volume 41 ini, kami mewawancarai sosok-sosok yang telah banyak berperan dalam membantu menyelesaikan permasalahan kesehatan, sosial, mental, dan material yang dihadapi masyarakat selama pandemi.

Melalui tema "Solidaritas Sosial dalam Penanganan Covid-19 Menuju Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh", kami berharap bahwa hal-hal yang telah dilakukan para relawan tersebut mampu menggugah semangat relawan-relawan yang lain untuk turut serta berpartisipasi dalam memulihkan kehidupan masyarakat pascapandemi.

Berkaitan dengan tema tersebut, kami juga menghadirkan beberapa tulisan dari para Fungsional Perencana di rubrik Opini. Tulisan-tulisan tersebut mengkaji efektivitas peran solidaritas masyarakat dalam penanganan pandemi dan pemulihan pascapandemi. Anda juga dapat membaca artikel-artikel lain pada rubrik-rubrik reguler SIMPUL.

Akhir kata, semoga tahun 2022 menjadi saksi masyarakat Indonesia yang kembali tangguh dan perekonomian yang semakin bertumbuh.

Selamat Tahun Baru 2022

Karyoto

Pemimpin Redaksi

Daftar Isi

GERBANG

Bersama Menuju Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh 3



PROLOG

Covid-19: Si Angsa Hitam Pemantik Perubahan dan Kesempatan 5

CAKRAWALA

Wanda Ponika (*Desainer Fesyen dan Inisiator Gerakan Sosial Masyarakat*): Bersama Membantu Sesama 8

Alissa Wahid (*Psikolog, Koordinator Jaringan Gusdurian Peduli, Penggagas Gerakan Muslim Moderat*): Mendampingi dengan Hati 14

Alif Iman Nurlambang (*Aktivis Sosial, Penggagas Gerakan Solidaritas Sejuta Tes Antigen*): Merespons dengan Solidaritas 20

Seto Mulyadi (*Psikolog Anak, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia*): Mitigasi Anak dari Disrupsi Pandemi 24

Warsono (*Penerima Bantuan Sosial di Wilayah Kota Depok, Jawa Barat*): Bantuan untuk Bertahan 30

LIPUTAN

Focus Group Discussion Program Magang Bagi ASN Perencana 34

Program Beasiswa S-2 Afirmasi Dalam Negeri 37



Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana 2021 (Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya) Secara Daring/Online 39

Klinik Aparatur Sipil Negara (ASN) Perencana: Dari, Oleh, dan Untuk Perencana 43

Obrolan Djumat Pagi (ODP): Menumbuhkan, Menyatukan, Menguatkan 45

SOSOK ALUMNI

Adri Roseno: Pengalaman Mengikuti Pelatihan pada Masa Pandemi 48

SOSOK PFF

Nenden Suwardini: Perencana Pilihan Karierku 51

PROFIL MITRA

Program Pascasarjana Universitas Papua 56



AKADEMIKA

Tesis Pilihan: Berhenti Bekerja dan *Subjective Well Being*: Analisis Penduduk Usia 50 Tahun ke Atas di Indonesia 62

Magang Karyasiswa Afirmasi Bappenas di Universitas Sriwijaya 72

INFO JFP

Tanya Jawab Jabatan Fungsional Perencana: Seputar Penilaian Angka Kredit 76

OPINI

Erna Martini dan Mai Damai Ria: Peran Riset dan Inovasi LIPI pada Masa Pandemi Covid-19 82

Deti Kusmalawati: Solidaritas Sosial Sebagai Wujud Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Pandemi Covid-19 88



Fera Diana: Pemuda dan Teknologi, Upaya Menanggulangi Covid-19 (Studi Kasus : Indorelawan.org) 93

Feradis: Praktik Baik Sebagai Bentuk Solidaritas Sosial Masyarakat dalam Menghadapi Covid-19 98

Budhi Santoso: Peran Modal Sosial dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia 102

SELINGAN

Tips Menghindari Kejenuhan dalam Pekerjaan di Kantor 108

BERSAMA MENUJU INDONESIA TANGGUH, INDONESIA TUMBUH

Oleh: Pandu Pradhana

DEWAN REDAKSI MAJALAH SIMPUL PERENCANA

Ilustrasi: Gabriella Sutanto (vecteezy.com)

Desember 2021, tepat 21 bulan sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus pertama Covid-19 di Indonesia, meskipun banyak spekulasi menyebutkan Covid-19 telah masuk negara kita sebelum Maret 2020.

Merespons hal tersebut, pada bulan Maret 2020, pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan. Selanjutnya,

pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.

Pemerintah terus aktif melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan hingga melakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 serta mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga terus bahu-membahu untuk menolong dan mendukung sesama masyarakat dalam menghadapi

pandemi Covid-19. Gerakan-gerakan sosial bermunculan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan bantuan, dimulai dari membagikan alat kesehatan seperti masker dan *hand sanitizer* sampai dengan dukungan untuk penyediaan tabung oksigen.

Partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan moril maupun materiil kepada masyarakat lainnya pada masa pandemi Covid-19 ini merupakan bentuk nyata solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan laporan yang dipublikasikan oleh Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2021, yang menempatkan Indonesia pada peringkat pertama

dari 114 negara sebagai negara paling dermawan dalam hal menolong orang lain, donasi, dan kegiatan sukarela. Walaupun Indonesia mengalami penurunan *Gross Domestic Product* (GDP) per kapita serta penyesuaian klasifikasi negara dari *upper-middle income country* menjadi *lower-middle income country* (Bank Dunia, 2021), aksi solidaritas masyarakat tetap berjalan secara masif di tengah pandemi Covid-19.

Peran pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan nasional, baik dalam rangka

penanganan pandemi Covid-19 ataupun dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional, diharapkan dapat mewujudkan Indonesia yang tangguh serta semangat pantang menyerah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Indonesia yang terus maju dalam menempuh jalan penuh tantangan untuk mencapai masa depan yang lebih baik ini selaras dengan tema utama perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh.

Salah satu filosofi yang terkandung dalam tema Indonesia Tangguh,

Indonesia Tumbuh adalah ruang kebersamaan yang merupakan harapan adanya kontribusi bersama antara negara dan rakyatnya dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi diharapkan terus membaik setelah sempat turun pada awal pandemi Covid-19 dan tentunya pemerintah serta masyarakat tetap wajib waspada terhadap varian baru Covid-19, yaitu Omicron, yang dapat menjadi tantangan dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan berikutnya. ■



Pemerintah menggalakkan program vaksinasi Covid-19 kepada seluruh masyarakat agar pandemi segera mereda sehingga ekonomi dapat kembali tumbuh.

Foto: setkab.go.id

COVID-19: SI ANGSA HITAM PEMANTIK PERUBAHAN DAN KESEMPATAN

Oleh: Feita Puspita Murti

DEWAN REDAKSI MAJALAH SIMPUL PERENCANA

Foto: freepik.com

Pada awal pandemi, sebagian besar dari masyarakat menyangka bahwa virus Covid-19 ini hanya berdampak pada kesehatan. Pun, banyak muncul prediksi bahwa Covid-19 akan berakhir cepat layaknya virus lain. Namun, bukannya berakhir, virus Covid-19 ini justru terus bermutasi dan berdampak besar bagi perekonomian, kehidupan sosial, dan lingkungan. Fenomena munculnya peristiwa seperti Covid-19 yang tidak terprediksi, muncul secara mengejutkan, dan sangat berpengaruh di dunia ini. Oleh penulis Nassim Nicholas Taleb, fenomena ini disebut sebagai "teori angsa hitam".

Berbagai kebijakan diterapkan oleh pemerintah untuk menghentikan penularan virus Covid 19 ini. Kebijakan-kebijakan ini bukannya tidak bijak, hanya saja pemerintah juga masih mencari kebijakan yang pas, yang paling tepat sasaran, dan memiliki sedikit dampak buruk bagi masyarakat. Meskipun telah disusun dengan berbagai pertimbangan,

tetapi ketika diterapkan, kebijakan sering kali tidak dapat memuaskan semua pihak. Apalagi, sebagaimana "teori angsa hitam" yang sulit diprediksi, kebijakan pun banyak disesuaikan dengan kondisi saat itu.

Kebijakan yang pertama kali diterapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan penularan

Covid-19 adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, hampir semua kegiatan dilakukan dari tempat tinggal, dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar

minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Pukulan akibat Covid-19 dirasakan langsung pada sektor ekonomi. Badan Pusat Statistik melaporkan pada tahun 2021 terdapat 21,32 juta orang atau sebesar 10,32 persen angkatan kerja terdampak Covid-19. Sebanyak 1,39 juta orang kehilangan pekerjaan dan 17,41 juta orang mengalami pengurangan jam kerja. Kebijakan pembatasan mobilitas juga secara langsung mencekik masyarakat yang mengandalkan upah harian.

Dampak lain dari pembatasan mobilitas adalah pembelajaran bagi anak yang harus dilakukan di

rumah atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). Alih-alih disebut tempat yang aman dan bersahabat bagi anak di kala pandemi, rumah bisa menjadi sumber munculnya kekerasan fisik dan psikologis bagi anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan setidaknya terjadi peningkatan sebesar 15 persen dalam kasus kekerasan terhadap anak (verbal dan fisik). Apalagi, kurikulum yang digunakan selama ini tidak dipersiapkan untuk disampaikan secara daring (*online*). Dengan keterbatasan mekanisme dan fasilitas untuk pembelajaran, dikhawatirkan, anak-anak akan kehilangan keterampilan dalam belajar, atau terjadi *learning loss*. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu memikirkan kurikulum yang fleksibel bagi anak yang dapat

diterapkan dan dipersiapkan untuk segala kondisi.

Selain perekonomian dan sistem pembelajaran, alam juga harus menanggung konsekuensi pandemi. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), limbah medis meningkat hingga lebih dari 20 ribu ton per kubik. Padahal, limbah ini tergolong infeksius sehingga harus ditangani dengan benar. Sejak awal, masyarakat hanya terfokus dengan imbauan pemerintah untuk perlindungan diri tanpa dibekali tata cara mengelola sampah medis. Padahal, penanganan limbah ini harus melibatkan publik sebagai "penyumbang" utama limbah berbahaya ini. Keterpurukan akibat pandemi ini menggugah solidaritas sosial





Aksi solidaritas dari kelompok masyarakat juga turut membantu memulihkan kesehatan dan perekonomian sesama.

0812 1230 5515 | indonesiapastibisa.org
 @indonesiapastibisaofficial

Foto: Dok. indonesiapastibisa.org

dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat. Jika pemerintah mengandalkan metode pemberian bantuan yang sudah ada seperti Bantuan Sosial (bansos), Kartu Prakerja dan sebagainya –yang tentu saja dari anggaran negara–, lain halnya dengan filantropi dari kalangan nonpemerintah. Mereka menggaungkan donasi melalui akun-akun media sosial untuk penggalangan donasi. Tentu saja, dengan banyaknya pilihan *platform* untuk berdonasi, masyarakat juga harus lebih berhati-hati saat ingin menyumbangkan dananya. Smeru (2020) menyebutkan setidaknya terdapat dua masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam penyaluran bantuan, yaitu kurangnya koordinasi dan mekanisme penyaluran bansos serta data penerima bansos yang tidak

akurat. Apakah dua masalah utama ini yang menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk berdonasi melalui *influencer* di sosial media ketimbang menyalurkan bantuan melalui pemerintah? Tentunya ini membutuhkan kajian lebih lanjut.

Mengingat dampak Covid 19 yang cukup beragam bagi seluruh lapisan masyarakat, penanganan dan pengendalian juga membutuhkan keterlibatan seluruh pihak agar pandemi ini segera berakhir. Dalam volume 41 ini, Majalah Simpul Perencana mengangkat tema Solidaritas Sosial dalam Penanganan Covid-19 Menuju Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh. Terkait dengan topik tersebut, beberapa narasumber mulai dari penerima bantuan sosial, *socio-entrepreneur*, psikolog anak, dan aktivis sosial yang secara langsung terlibat dalam

penanganan dampak Covid-19 ini juga dihadirkan dalam wawancara untuk rubrik Cakrawala. Dengan tekad dan tanggung jawab dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, diharapkan pandemi Covid-19 ini dapat segera berlalu.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (2020). Tingkat Pengangguran Terbuka, diakses 26 Desember 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html>
- Taleb NN (2010). The Black Swan: second edition: the impact of the highly improbable fragility". Random House; 482 ■



Foto: instagram.com/wandaponika

WANDA PONIKA

DESAINER FESYEN DAN INISIATOR
GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT

BERSAMA MEMBANTU SESAMA

Aksi solidaritas di kalangan masyarakat sangat membantu untuk meringankan sesama yang terkena dampak dari pandemi Covid-19. Tak terkecuali gerakan yang dilakukan oleh Indonesia Pasti Bisa yang diinisiasi oleh Wanda Ponika. Apa saja aksi yang dilakukan oleh Indonesia Pasti Bisa? Semua akan dikupas dalam wawancara Wanda Ponika bersama SIMPUL berikut ini.

SIMPUL (SP): Bagaimana peran masyarakat dalam penanganan Covid-19 ini? Kapan Ibu mulai ikut menangani Covid-19 dan kenapa merasa perlu ikut terdorong dalam penanganan ini?

WANDA PONIKA (WP): Pada bulan Maret 2020, terdeteksi kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia. Kita juga sempat ada PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Saya dan beberapa orang teman, ada Cathy Sharon dan Rudi Valinka, berpikir apa yang bisa kami lakukan. Saat itu, yang paling dibutuhkan adalah APD (alat pelindung diri). Banyak sekali nakes (tenaga kesehatan) yang hanya memakai jas hujan, bahkan tidak memakai APD sama sekali. Kebetulan salah satu teman kami memiliki akses untuk membeli sarung tangan medis dari pabriknya

langsung. Akhirnya, dengan bermodal sarung tangan medis sekitar delapan ribuan, kami urunan untuk membeli dan menyalurkannya kepada para nakes.

Kami juga berpikir kalau memakai dana pribadi, mungkin tidak bisa terlalu banyak. Jadi, kami mencoba membuka suatu akun di kitabisa.com. Waktu itu, akun tersebut belum ada nama gerakannya. Dari sana, kemudian kami berkembang untuk bisa memberikan APD komplet ke lebih dari 200-an rumah sakit. Tantangan yang terbesar saat itu bukanlah uangnya, tetapi kami tidak tahu di mana harus membeli APD. Saya sendiri latar belakangnya pengusaha perhiasan dan aksesoris sehingga tidak mengerti apapun tentang ini.

Akhirnya kami hubungi satu per satu para penjual APD di Instagram dan beberapa *market place*. Kami sempat khawatir dibohongi penjualnya sehingga kami membelinya dengan sistem COD (*cash on delivery*).

Saya masih ingat, pada waktu itu, kami berburu masker sampai ke Sulawesi. Jadi, di mana pun ada barang maka kami kejar. Yang membedakan gerakan kami adalah kami memeriksa dulu kualitas APD-nya, layak atau tidak, tahan air atau tidak, dan sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan atau tidak. Kami juga memastikan barang diterima dengan tepat sasaran oleh tim rumah sakit. Kami tidak pernah sekadar menurunkan barang, kami harus memastikan barang sampai ke sasaran. Waktu itu, kami sudah mengirim ke 200 rumah sakit di Bali, Sumatra, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

SP: Adakah gerakan sosial lain selain yang ibu lakukan pada awal-awal terjadinya pandemi Covid-19?

WP: Nah, kebetulan waktu itu, anak saya juga punya gerakan sendiri, namanya "Anak Indonesia Bersatu". Ia mendirikannya bersama anak Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan teman-teman sekolahnya. Mereka juga memberikan bantuan ke hampir 100 rumah sakit. Jadi, saat itu, tim saya berkoordinasi dengan tim anak-anak. Untuk RSUD dan Puskesmas, anak-anak yang menyumbang. Sementara untuk rumah sakit besar, tim dewasa yang menyumbang.

Kemudian, saya juga ada gerakan bagi-bagi nasi bungkus. Gerakan ini dari dapur sendiri. Kebetulan saya punya kapasitas untuk memasak sampai 100 porsi. Namun, saya juga berbaga di Instagram. Saya katakan kepada teman-teman bagi yang bisa memasak 5 bungkus

atau 10 bungkus, tidak apa-apa. Saya membuat *clue* masakannya harus memenuhi standar gizi: ada proteinnya, sayur, ikan, telur, tempe. Semua saya ajarkan di Instagram saya. *Alhamdulillah*, banyak netizen yang melakukan gerakan dari dapur sendiri. Menurut saya, kalau ada banyak kebaikan yang dilakukan oleh banyak orang, pasti hasilnya lebih masif.

Anak saya waktu itu juga sempat ada gerakan nasi kotak gratis untuk 2.000 pemulung. Kemudian Covid-19 ini mulai mereda, kami kembali ke kehidupan masing-masing.

”
Jadi, sebenarnya adalah bagaimana saat kami melakukan kebaikan itu, kami mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan juga.
 “

SP: Apa yang Ibu lakukan ketika kemudian muncul Covid-19 gelombang kedua atau varian Delta pada pertengahan tahun 2021?

WP: Pada saat itu, kami berpikir mesti bergerak lagi. Kami beri wadah dengan nama gerakan "Anak Bangsa Peduli". Saya mengajak Cathy Sharon, Rudy Valinka, dan Maia Estianty.

Kami membuka lagi akun di kitabisa.com. Pencapaiannya luar biasa. Per hari ini, akun Anak Bangsa Peduli di kitabisa.com

sudah mengumpulkan Rp2,372 miliar dari 14 ribu donatur. Jadi, ada 14 ribu orang yang bergandeng tangan. Mereka yang donasi itu mulai dari seribu rupiah. Bahkan ada *driver* ojol (ojek *online*) ikut donasi seribu, dua ribu, atau sepuluh ribu rupiah. Jadi, sebenarnya adalah bagaimana saat kami melakukan kebaikan itu, kami mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan juga. Mungkin banyak orang yang ingin ikut ulur tangan, tetapi mungkin mereka tidak banyak waktunya, atau tidak tahu bagaimana caranya. Nah, orang-orang seperti itulah yang menitipkan donasinya kepada kami.

Kami memberikan atau menyalurkan bantuan berupa APD. Dalam pergerakannya, kami bekerja sama dengan Tim Mitigasi IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Tim Mitigasi IDI memberikan kepada kami *list* rumah sakit yang prioritas dibantu dan membutuhkan bantuan. Bantuannya bisa berupa apa pun. Jadi, kita memberikan APD dan vitamin dengan persetujuan dari Tim Mitigasi IDI.

Selain itu, kami juga memberikan bantuan berupa makan siang. Di Instagram, kami melabelinya dengan gerakan "Netizen Traktir Nakes". Siapapun netizen, boleh menyumbang dengan syarat mereka harus menghubungi *call center* kami. Kami akan melakukan verifikasi makanannya dahulu. Makanan yang berkualitas baik adalah makanan yang bersih, tidak mudah basi, dan tidak pedas.

Akhirnya, sepanjang gerakan itu berjalan, kami hampir tidak pernah memberikan makan siang untuk nakes. Selalu netizen yang mentraktir. Menariknya, ada restoran yang selalu menuliskan pesan motivasi dengan tulisan tangan untuk nakes di setiap boks nasinya.

Selama pandemi ini saya dan *follower* saya menyumbangkan 1.500 peti jenazah yang kami antar ke seluruh Indonesia.

SP: Kami mengetahui Ibu aktif juga di gerakan "Indonesia Pasti Bisa". Bisakah Ibu menjelaskan mengenai gerakan tersebut?

Selain di Anak Bangsa Peduli, saya juga punya gerakan "Indonesia Pasti Bisa". Gerakan ini sebenarnya cikal bakal dari Gemas (Gerakan Masker Gratis). Itu masih tim yang sama. Dengan Gemas, kami sudah memberikan lebih dari 3 juta masker gratis. Kalau pernah melihat masker merah putih gratis, itu dari kami.

Di lapangan, Indonesia Pasti Bisa sebenarnya berkolaborasi dengan Anak Bangsa Peduli. Kami juga menyelenggarakan vaksinasi. Per hari ini, kami sudah melakukan vaksinasi 350 ribu orang. Kami sedang mengejar target dengan Kapolres Metro Bekasi untuk 1 juta vaksin. Semoga dalam waktu 50 hari, target tersebut bisa tercapai.

Sekarang tim relawan kami juga sedang mengecek lapangan bersama Kapolres Kabupaten Bogor. Kami pun membantu di daerah Labuhanbatu, Sumatera Utara dan Bandung. Berdasarkan hasil *meeting* kami dengan Wakapolri terdapat beberapa daerah yang diberikan atensi. Di situlah Indonesia Pasti Bisa membantu menyelenggarakan vaksinasinya.

Sebelumnya, Indonesia Pasti Bisa juga meminjamkan tabung oksigen dan refrigerator gratis. Saya juga memiliki 30 tabung oksigen yang bisa dipinjamkan secara gratis. Jadi secara estafet, kami meminjamkan tabung oksigen tersebut untuk yang membutuhkan. Namun, karena saat ini kebutuhan oksigen sudah terkendali maka kami lebih fokus pada vaksinasi.

SP: Sasaran atau target utamanya ada di mana saja, Bu?

WP: Kami memang banyak fokus di daerah Kabupaten Bekasi, karena saat itu di Bekasi capaian vaksinasinya hanya 18%. Kami berpikir Bekasi merupakan daerah penyangga Jakarta, tentunya akan percuma jika vaksinasi di Jakarta sudah mencapai 100%, tetapi di Bekasi baru mencapai 18%. Jadi, kami banyak bergerak sampai ke desa-desa yang sangat miskin.

Saat itu, kami tidak terbayang jika wilayah yang hanya satu setengah jam dari ibu kota tersebut, 8 dari 10 rumahnya tidak memiliki toilet. Kami bergerak di wilayah seperti di Pantai Nelayan dan Muara Gembong. Kami mengantarkan vaksin hingga naik perahu. Kami bekerja sama dengan polisi, camat, dan babinsa (Bintara Pembina Desa), untuk menyelenggarakan vaksinasi di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Jadi, kami tidak mengerjakan vaksin massal di Jakarta.

SP: Gerakan ini sangat inspiratif. Dalam konteks ini, hal apa yang paling mendorong hati Ibu untuk melakukan gerakan solidaritas sosial tersebut sehingga tergerak untuk membantu masyarakat?

WP: Dalam kegiatan sosial sebenarnya saya sudah belasan tahun. Biasanya saya bantu yayasan jantung, yayasan kanker payudara, yayasan kanker anak. Kemudian saya juga salah satu direksi dari Yayasan Happy Heart Indonesia, di mana kami membangun banyak sekolah di daerah yang terbelakang, khususnya di Indonesia Timur. Contohnya tahun 2020 lalu, kami membangun 20 sekolah. Namun, karena Covid-19, target tersebut kurang tercapai. Dua tahun lalu, kami mencapai target membangun 41 sekolah di NTT dan Sumba.

Covid-19 ini menurut saya istimewa. Kalau kita mau sembuh, kita harus sembuh sama-sama. Kita tidak bisa egois. Jadi, menurut saya semuanya harus ikut andil. Caranya itu banyak, seperti menyumbang tenaga. Ada banyak relawan kami yang menyisir pinggiran kampung-kampung, karena kami tidak hanya memberikan vaksinasi gratis, tetapi juga memberikan sembako gratis, dan bansos (bantuan sosial) tunai. Kami tidak menitipkannya ke RT/RW. Jadi, kami membagikannya *door to door*. Jadi, intinya harus dilakukan bersama-sama. Bisa dengan sumbang tenaga, sumbang dana, ataupun menjadi *influencer* untuk mempromosikan program-program kebaikan ini.

SP: Selain nelayan, kelompok masyarakat mana yang Ibu bantu dan apa pertimbangannya?

WP: Kalau di Kabupaten Bekasi pinggiran tersebut, mereka memang taraf hidupnya sulit sekali. Jadi, untuk mereka yang taraf hidupnya miskin, kami *bundling*, selain vaksin, juga kami berikan sembako. Selain nelayan, mereka juga petani. Ketika suatu daerah tinggal 15% yang belum divaksin, teman-teman relawan, petugas dari kecamatan, dan kepolisian sebaiknya memang harus *door to door* untuk memberikan vaksin. Bahkan ada polisi yang mengejar nelayan untuk vaksin di perahunya saat mencari ikan.

SP: Saya cukup terharu dengan kepedulian para donatur. Meskipun kecil, tetapi semangat berbaginya luar biasa. Padahal mereka sedang kesulitan juga. Apa yang menyebabkan mereka masih mau berdonasi di saat yang sulit ini?

WP: Menurut saya, media sosial sangat bagus sekali, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau kita memanfaatkan untuk



Foto: instagram.com/wandaponika

”
 ...media sosial sangat bagus sekali, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya... kalau kita memanfaatkan media sosial untuk kebaikan, itu luar biasa.
 “

berbuat kejahatan sangat mudah sekali. Namun, kalau kita memanfaatkan media sosial untuk kebaikan, itu luar biasa.

Contohnya tahun ini, saya membangun dua sekolah di NTT, di mana kita butuh dana Rp750 juta. Saya pribadi kemudian memberikan "umpan" di media sosial (dengan memasang status) "Saya menyumbang Rp200 juta, netizen mau *nggak* bantuin?" Akhirnya dalam sepuluh hari, dari netizen terkumpul Rp550 juta. Jadi, total Rp750 juta untuk kami membangun dua sekolah.

Selama proses pembangunan sekolah tersebut, kami rajin *posting* foto-fotonya. Saat sekolah sudah jadi, saya buat mural di dinding sekolahnya, "Sekolah dari Netizen". Dengan demikian, netizen punya rasa memiliki, sehingga netizen tahu uangnya itu benar-benar sampai untuk yang membutuhkan. Bahkan, empat tahun

lalu saya juga pernah membagikan 4.000 pasang sepatu gratis untuk anak-anak NTT, itu juga dari netizen.

Belum lama ini juga ada 5 rumah singgah kanker yang butuh dana untuk membayar biaya kontrak rumahnya. Kami seharusnya cuma butuh dana 1 tahun untuk biaya kontrak 2 rumah. Namun, setelah saya *posting* di media sosial dengan membuka donasi dari netizen, dalam satu minggu, kami bisa membayarkan biaya kontrak itu selama 2 tahun untuk 5 rumah.

Intinya, saya ingin menggunakan media sosial itu sebagai wadah. Saya hanya menjembatani. Nomor rekeningnya biasanya langsung kepada yayasannya, bukan rekening saya. Setelah uangnya terkumpul, saya bertugas untuk memantau yayasan tersebut. Agar uang yang dititipkan netizen itu benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan

Melalui media sosial, saya juga menginfokan warung makan murah meriah yang digagas anak saya yang dinamakan "Warung Kemanusiaan Neng Brenda". Di warung ini, cukup dengan membayar dua ribu rupiah, orang-orang bisa makan nasi komplet dengan ayam. Biaya lainnya ditutup dari subsidi kami dan donasi netizen. Jadi, rencananya Brenda juga akan menambah titik warungnya.

SP: Terkait pemberian vaksinasi massal yang ibu lakukan, sempat ada kontra dari Jerinx (I Gede Ari Astina, personel grup musik Superman is Dead) yang sebelumnya dikenal antivaksin. Bagaimana Ibu menanggapi pihak-pihak yang menentang atau kontra dengan gerakan yang Ibu lakukan?

WP: Pasti ada pro dan kontra. Menurut saya, semua orang berhak dengan pendapatnya masing-masing. Asal kita *nggak*

mengganggu pendapat orang dan tidak meng-*influence* orang untuk melakukan hal-hal yang tidak patut. *Anyway*, Jerinx juga sudah divaksin di Polda Metro Jaya. Intinya, kalau kita melakukan sesuatu itu pasti ada pro dan kontra. Kalau yang tidak senang, mau marah-marah di akun saya, saya biarkan saja, tidak saya jawab. Marah-marahnya mereka tidak akan menghalangi hal yang saya yakini baik.

SP: Saya tergelitik satu kata yang Ibu sampaikan sebelumnya, yaitu *bundling* paket vaksinasi. Orang yang ikut vaksin juga akan diberikan bantuan berupa uang. Ini inovasi yang *simple*, tetapi tidak terpikir oleh kami. Apakah Ibu dan tim pernah memberikan masukan kepada pemerintah terkait inovasi tersebut dan apa tanggapan dari pemerintah?

WP: Saya dan tim saya, Rudi Valinka, aktif di media sosial. Kami juga tahu bahwa pemerintah sudah melakukan yang terbaik, meskipun hasilnya tidak sempurna. Kritikan-kritikan juga sering saya tuliskan. Kita boleh mengkritik, tetapi kita juga harus menjadi bagian dari solusi. Kalau kita tidak bisa membantu, sebenarnya kita juga bisa memberikan solusi. Caranya, yaitu dengan tertib mengikuti aturan pemerintah. Pemerintah menganjurkan memakai masker maka kita mengikuti dengan memakai masker. Pemerintah meminta untuk tidak mengadakan hajatan, kita juga ikuti. Jadi, jika tidak bisa menyumbang tenaga dan uang, tidak apa-apa. Menurut saya, tertib mengikuti aturan pemerintah saja sudah merupakan sumbangsih.

SP: Menurut Ibu, bagaimana agar usaha pemerintah ini bisa lebih efektif dan efisien dengan anggaran yang ada di Kementerian Sosial dan pemda-pemda?

WP: Menurut saya ada dua cara,, yaitu dengan turun ke lapangan dan berkolaborasi. Program-program yang dilakukan Indonesia Pasti Bisa selama ini muncul dari laporan teman-teman relawan di lapangan. Seperti kemarin, ada laporan warga yang susah makan, kami lalu memberikan sembako. Ada juga laporan dari relawan yang mengatakan warga sulit atau tidak mau divaksin, kami pun memberikan *bundling* vaksin dengan bansos lainnya.

”

Pemerintah bisa menyumbang dengan membuat kebijakan yang ramah untuk masyarakat dan merampingkan birokrasi.

“

Di tengah jalan, kami menemukan fakta bahwa sembako saja ternyata tidak cukup. Warga juga tetap butuh uang tunai. Oleh karena itu, kami mulai kita menyiapkan bansos dalam bentuk uang tunai, walaupun tidak banyak. Sebelumnya, banyak warga kesulitan oksigen maka kami menyiapkan oksigen. Begitu situasi berubah, kasus Covid-19 menurun, kami fokus melakukan vaksinasi.

Menurut saya, pemerintah seharusnya harus bisa turun ke lapangan, untuk lebih fleksibel mengetahui pergerakan kebutuhan masyarakat di lapangan. Yang kedua adalah dengan berkolaborasi. Dalam pelaksanaan vaksinasi ini, kami merasakan sekali kolaborasi antara tim Indonesia Pasti

Bisa dan lurah, RT/RW, camat, serta polisi sehingga semuanya dapat berjalan lancar.

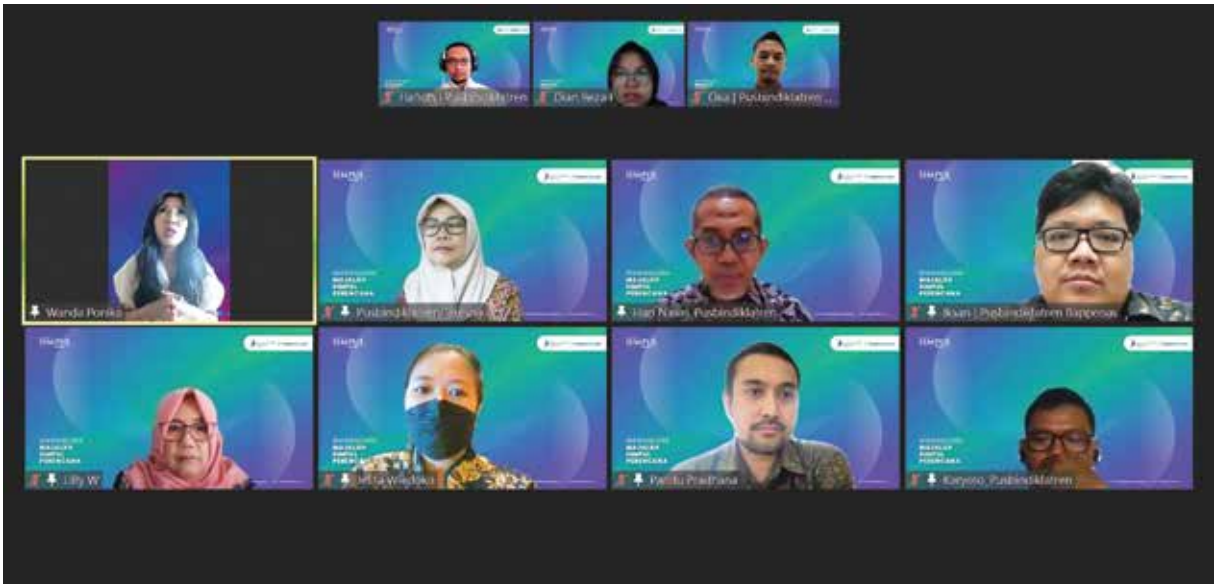
Contohnya ada satu tim yang sangat bagus di Kabupaten Bekasi. Mereka sangat kompak. Bahkan ada satu desa di Kabupaten Bekasi, yang karena kekompakannya minggu depan bisa 100% sudah divaksin. Jadi, sudah *herd immunity*. Karena mereka sudah divaksin 100% secara sukarela, Indonesia Pasti Bisa memberikan hadiah pembangunan toilet umum dan saluran air bersih gratis. Sebelumnya, mereka masih buang air, cuci baju, dan mandi di kali yang sama.

SP: Apakah para relawan tersebut mendapatkan subsidi, honor, atau *reward* lainnya?

WP: Untuk transportasi, akomodasi, dan makan, semua kami siapkan. Mereka yang benar-benar ingin mejadi relawan biasanya memang memiliki jiwa sukarela. Berbeda dengan orang yang ingin jadi relawan karena ingin dapat bayaran. Itu pasti akan beda kerjanya.

SP: Dari kenyataan di lapangan, sebenarnya bagaimana solidaritas tiap-tiap anggota masyarakat pada masa pandemi ini? Apakah mereka memang saling membantu mengurangi kesulitan masyarakatnya atau malah menjadi egois pada saat keadaan sulit ini?

WP: Saya rasa, saya banyak menemukan cerita-cerita indah dari lapangan. Contohnya ada anak difabel yang tinggal hanya bersama kakeknya. Tetangga-tetangganya ternyata ikut mengurus anak tersebut. Teman-teman dari kepolisian juga luar biasa. Kemarin saya mengirim 50 set ranjang kasur untuk bantuan sosial dan diantarkan langsung oleh teman-teman di Polsek empat kali rit naik perahu ke Desa Muara Gembong. Sebenarnya



Wawancara Daring bersama Tim SIMPUL

di lapangan itu banyak sekali orang baik dengan kesamaan visi dan misi, tetapi dengan cara masing-masing.

SP: Peran media sosial sangat luar biasa. Kalau kita melihat di stasiun televisi, Indonesia Pasti Bisa dan Anak Bangsa Peduli justru minim pemberitaan. Apakah Ibu memiliki tim khusus komunikasi massa untuk media sosial atau ini berjalan apa adanya saja?

WP: *Follower* saya itu begini, kalau ada kejadian apa pun, saya belum buka donasi, mereka sudah ribut di DM (*direct message*), mau menipkan sumbangan. Jadi, intinya begini, kalau kita ingin mengajak *follower* kita berbuat baik, kita harus memberi contoh dahulu. Dulu, sempat ada banjir saat masa pandemi ini. Sumbangan dari *follower* saya saja terkumpul Rp250 juta tanpa saya minta.

SP: Berapa banyak *follower* Ibu di media sosial khususnya Instagram?

WP: *Follower* saya hanya 200 ribuan. Cuma kebetulan karena banyak orang baik di sana, karena saya sering memposting kegiatan sosial, mereka sering membantu. Jadi, terjadi begitu saja. Kalau teman-teman artis kan sering bantu dengan memberikan *word of mouth*, mereka bantu *posting*, jadi gerakannya bisa lebih besar.

SP: Bagaimana tip dan trik yang Ibu lakukan sehingga mampu menggerakkan orang-orang untuk ikut membantu dalam aksi solidaritas sosial ini?

WP: Menurut saya, tak kenal maka tak sayang. Saya juga tidak ingat pertama kali berkomunikasi dengan polisi, camat, bupati, atau dinas kesehatan. Namun, teknik berkomunikasi dengan tiap-tiap instansi tersebut berbeda. Karena saya sering berkomunikasi dengan mereka, saya jadi belajar dan tahu cara mereka kerja. Setiap daerah juga *culture*-nya berbeda. Saya jadi melatih diri untuk bisa terkoneksi

dengan berbagai kalangan yang berbeda. Ternyata hal itu menyenangkan.

SP: Apakah ada pesan dan saran dari Ibu untuk kami dari pemerintahan?

WP: Dari teman-teman pemerintahan itu sebenarnya paling enak untuk membantu warga karena pemegang keputusan dan pemegang uang. Pemerintah bisa menyumbang dengan membuat kebijakan yang ramah untuk masyarakat dan merampingkan birokrasi. Kalau birokrasinya lambat, khawatirnya orang yang butuh pertolongan jadi tidak bisa terbantu. Ketika birokrasi lebih ramping, masalah di masyarakat jadi cepat terbantu. Jadi, pemerintah dengan *power* yang ada bisa membantu lebih banyak orang.

(Tim Pewawancara: Hari Nasiri Mochtar, Lilly Widayati, Pandu Pradhana, dan M. Iksan Maolana)



Foto: kaicid.org

ALISSA WAHID

PSIKOLOG, KOORDINATOR JARINGAN GUSDURIAN PEDULI,
PENGGAGAS GERAKAN MUSLIM MODERAT

MENDAMPINGI DENGAN HATI

Banyak anak menjadi yatim karena ditinggalkan orang tuanya yang turut menjadi korban Covid-19. Program pendampingan anak-anak yatim korban pandemi menjadi salah satu aksi solidaritas yang dilakukan Gusdurian Peduli. Dalam wawancara berikut, Alissa Wahid, koordinator Gusdurian Peduli, bercerita banyak kepada SIMPUL mengenai berbagai aksi solidaritas yang dilakukan dan tantangan yang dihadapi.

SIMPUL (SP): Terkait pendampingan dengan anak-anak yang kehilangan orang tua karena Covid-19 dan Ibu sebagai psikolog yang aktif dengan kegiatan sosial ini, bagaimana gerakan Gusdurian Peduli berperan dalam masa pandemi ini terhadap anak-anak korban pandemi?

ALISSA WAHID (AW): Terkait dengan gerakan pendampingan pada anak-anak yang kehilangan orang tuanya akibat Covid-19, jaringan Gusdurian Peduli sudah beroperasi di 67 kota di seluruh Indonesia dan ditambah satu kota di Malaysia. Kami melihat bahwa pandemi ini dampaknya tidak hanya masalah kesehatan, tetapi yang lain-lain juga. Terutama yang terdampak langsung itu adalah kelompok-kelompok yang rentan secara ekonomi, mereka yang tidak punya sumber penghasilan

secara reguler dan tidak terlindungi kontrak kerja. Mereka ini yang paling terpukul. Mengapa? Hal ini karena mereka mengandalkan pemasukan harian. Kalau pemasukan harian ini tidak mereka dapatkan dan mereka harus ada di luar rumah, mereka mendapatkan beban ganda, pertama risiko tertular virusnya dan kedua tidak ada juga pembelinya.

Jadi, sejak bulan April 2020, kami sudah memikirkan bagaimana memberikan *support* kepada kelompok-kelompok masyarakat seperti ini. Ini berlangsung lama sejak tahun lalu sampai beberapa bulan yang lalu, kami menjalankan terus berbagai program terkait dampak pandemi.

Selain program bantuan ekonomi, di daerah-daerah tertentu, kami juga

melakukan pendampingan untuk pemerintah-pemerintah daerah, pemerintah desa, juga di pesentren. Contohnya di Bangkalan, Sumenep, kami punya program kelompok sehat, sedangkan di Pantura Jawa Tengah, kami menginisiasi rumah sehat bersama kelompok-kelompok masyarakat di daerah tersebut.

Karena *exposure* yang cukup panjang, dari tahun 2020 sampai puncak (pandemi) yang kedua, kami jadi terespose betul dengan betapa banyaknya anak-anak yang menjadi korban langsung dari pandemi ini ketika orang tua mereka meninggal. Terutama mulai dari Mei, Juni, Juli, kami berhadapan langsung dengan realita bahwa banyak sekali anak-anak yang kehilangan orang tuanya, baik satu maupun dua sekaligus.

Itu yang membuat kami mengambil langkah-langkah cepat untuk memberikan dukungan. Awalnya kami mulai dengan memberikan santunan langsung. Itu setiap anak kami berikan santunan 1 juta rupiah untuk *sustaine* mereka selama menghadapi situasi yang benar-benar baru itu.

Akhirnya hal ini membuat kami berpikir bahwa ketika teman-teman memberikan santunan tersebut, mereka jadi bertemu langsung dengan anak-anak ini, dan relawan-relawan Gusdurian Peduli yang berjumlah ratusan itu menemukan kesimpulan bahwa mereka tidak hanya membutuhkan santunan. Kehilangan orang tua sama dengan kehilangan sumber penghidupan, jadi mereka juga butuh pendampingan.

Kami kemudian menindaklanjutinya dengan meluncurkan portal khusus, yaitu portal peduli anak yatim. Portal ini tidak hanya bicara tentang dukungan finansial, tapi juga dukungan pendampingan psikologisnya. Bahkan kami sekarang juga sedang mempersiapkan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti

pesantren dan universitas, ada yang sudah mau menampung, tetapi belum operasional. Namun, tidak mudah bagi anak-anak yatim ini untuk langsung pindah ke tempat lain.

Kami saat ini sudah menyampaikan bantuan kepada 516 anak dari target 1.000 anak yatim yang kami tetapkan. Itu ada di 103 kota dari 18 provinsi. Ini yang sudah kami terimakan dan masih banyak daftarnya yang akan kami selesaikan dalam waktu dekat ini.

”

Yang namanya pendampingan berarti durasinya panjang, tidak seperti pelatihan yang hanya satu kali pertemuan. Jadi memang dibangun hubungan yang khusus antara pendamping dan orang yang didampingi.

“

SP: Apa perbedaan aksi solidaritas yang dilakukan Gusdurian peduli dengan aksi solidaritas yang lain?

AW: Sebetulnya begini, jaringan Gusdurian ini kekuatannya pada *network*-nya di tingkat lapangan. Jadi kami memiliki jaringan Gusdurian yang ada di 150 kota, ada di luar negeri juga. Ini barang kali yang tidak dimiliki oleh inisiatif-inisiatif yang lain. Kalau inisiatif yang lain itu, teman-teman mungkin jago dalam mengumpulkan sumbangan, tetapi kemudian kebingungan menyampaikannya. Ini yang kemudian dititipkan kepada jaringan Gusdurian. Misalnya, di *kitabisa.com* ada program Kawal Masa Depan bekerja sama dengan Kawal Covid. Mereka bisa membuat portal yang orang bisa mengajukan (perlindungan) anak yatim piatu yang

didukung oleh program Kawal Masa Depan.

Kawan-kawan dari *kitabisa.com* dan Kawal Covid tidak memiliki struktur sampai di tingkat paling bawah. Ini yang kemudian membuat banyak sekali teman-teman dari para *influencer*, yang mereka punya program dan dana, tapi tidak mampu menyalurkannya, dan tidak bisa membuat programnya *sustainable*. Jadi, karena itu mereka minta tolong Gusdurian Peduli, seperti gerakan *Save The Children* atau *Future Child* dari Fisipol UGM, dan ada banyak inisiatif dari *influencer*. Bahkan ada yang dipasrahkan seluruh pengelolaannya kepada Gusdurian Peduli. Sementara Gusdurian Peduli juga melakukan penggalangan dana yang kami salurkan sendiri. Secara umum, ini program yang kami lakukan dalam konteks melakukan pendampingan untuk anak korban Covid-19.

SP: Kalau diperkirakan, berapa jumlah total anak yang kehilangan orang tuanya pada masa Covid-19 ini? Apakah bantuan kepada mereka hanya disalurkan untuk pendidikan atau seperti apa?

AW: Perkiraan kami ada 11 ribu anak-anak yang jadi korban Covid-19 karena kehilangan orang tua. Tentu saja Gusdurian Peduli tidak akan sanggup untuk menangani semuanya. Program kami tidak hanya santunan dana pendidikan, tapi juga pendampingan psikologisnya. Kami bekerja sama dengan para relawan ahli psikologi dari berbagai universitas untuk program pendampingan.

SP: Seperti apa bentuk pendampingan psikologis tersebut?

AW: Yang namanya pendampingan berarti durasinya panjang, tidak seperti pelatihan yang hanya satu kali pertemuan. Jadi memang dibangun hubungan yang khusus antara pendamping dan orang

yang didampingi. Kemudian dalam pendampingan tersebut ada beberapa target, termasuk memastikan secara psikologis dan sosial, anak-anak ini mendapatkan dukungan untuk tumbuh kembang yang optimal.

Kalau misalkan, anak-anak ini menunjukkan gejala-gejala gangguan psikologis maka kami kemudian mengajak teman-teman yang berlatar belakang psikologi untuk membantu melakukan *therapy healing* atau konseling sehingga anak-anak ini bisa mendapatkan kanal yang tepat dan *treatment* yang tepat untuk membantu mereka mengatasi hambatan-hambatan psikologis tersebut.

Nah, pendampingannya dilakukan relawan Gusdurian Peduli. Namun, terapinya tentu saja diserahkan kepada teman-teman yang lebih punya *basic*, baik dari bimbingan konseling maupun psikologi.

SP: Sampai kapan anak-anak tersebut didampingi? apakah sampai hidup mandiri atau bagaimana?

AW: Gusdurian Peduli ini merupakan gerakan, tidak berbasis proyek dan tidak berbasis anggaran. Jadi basis kami dalam pendampingan ini kan betul-betul membangun hubungan dengan kelompok yang didampingi. Sampai mana? Sampai dari pendamping maupun yang didampingi sama-sama merasa cukup. Jadi kalau misalkan anak-anak ini dapat menjalani hidup dengan baik maka pendampingannya bisa saja diakhiri. Namun, jika dirasa anak-anak ini membutuhkan penanganan yang lebih khusus, kami tidak pernah selesai mendampingi. Hal itulah yang kemudian menjadi keunggulan dari jaringan Gusdurian Peduli yang ada di berbagai tempat. Itu menjadi modal, karena yang mendampingi tinggalnya di situ, bukan seperti program-program karitatif.

Kalau program karitatif, kita datang menyerahkan bantuan, setelah itu kita pulang. Seperti bantuan bencana alam yang ada di NTT (Nusa Tenggara Timur), orang datang memberikan bantuan, membuatkan hunian, dan lain-lain, terus pulang. Jaringan Gusdurian Peduli memiliki pendekatan yang berbeda, karena kami punya jejaring di tingkat lokal maka apapun pilihan yang kami putuskan akan selalu melibatkan teman-teman di tingkat lokal, seperti yang kami lakukan di NTB (Nusa Tenggara Barat) waktu terjadi gempa, atau di Sigi dan Donggala.

Kami melatih teman-teman lokal. Sekali lagi karena kami tidak berbasis anggaran, tetapi berbasis *volunterism*, jadi kami memberikan keleluasaan kepada para pendamping. Pendampingnya yang mendapatkan pembekalan. Merekalah yang kemudian menentukan apakah ini sudah cukup atau dilanjutkan. Begitu.

SP: Bagaimana dengan aktivitas jaringan Gusdurian Peduli di Malaysia?

AW: Pusat pengelolaan bantuan Gusdurian Peduli di Malaysia ada di Kuala Lumpur. Namun, kami juga mengantarkannya ke sekitar Kuala Lumpur. Waktu pandemi banyak sekali pekerja migran yang ilegal, yang langsung terpukul. Di Kuala Lumpur banyak sekali pekerja ilegal dari Indonesia proyek konstruksi, perkantoran, apartemen. Pada masa pandemi, pemerintah Malaysia memberlakukan kebijakan lebih ketat. Lokasi kerja mereka langsung di-*lockdown*. Buruh tidak bisa keluar. Orang tidak bisa masuk. Padahal upahnya mereka itu harian, sehingga saat konstruksi berhenti, mereka hanya mendapatkan jatah makan dan minum.

Jaringan Gusdurian Peduli berinisiasi untuk mengaktifkan jejaring teman-teman Indonesia yang ada di

Kuala Lumpur. Kemudian kami dari Indonesia memberikan dananya, mereka yang belanja. Bahkan di beberapa lokasi, bantuan diantarkan ke perkebunan-perkebunan yang banyak buruh Indonesianya yang terlantar. Untuk yang kasus buruh konstruksi, penyerahan bantuannya bahkan sampai diselusupkan di bawah gerbang, karena gerbangnya tidak dibuka. Jumlah bantuan buruh migran Indonesia di Malaysia mencapai 1.000–1.500 paket.

Untuk di Malaysia, kami tidak memberikan bantuan kepada anak yatim. Bantuan kepada anak yatim hanya kami lakukan di Indonesia.

SP: Adakah kerja sama antara jaringan Gusdurian Peduli dengan pemerintah dalam membantu korban Covid-19 khususnya anak-anak yatim?

AW: Kami tidak punya kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Bahkan dulu sempat saya berdebat dengan Kemensos yang lama terkait kasus bantuan sosial (*bansos*). Waktu itu Pak Juliari Batubara masih menjadi menteri. Dalam webinar di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), saya waktu itu meng-*quote* sebuah foto paket bantuan paket yang dibuat oleh Gusdurian Peduli senilai 600 ribu rupiah dengan paket bantuan yang diterima oleh masyarakat di lapangan atas nama *bansos* dari pemerintah yang katanya juga senilai 600 ribu rupiah. Namun, jika dibandingkan, jumlah (barang) yang diterima sangat berbeda. Saya menyampaikan kepada Pak Juliari bahwa situasi di lapangan seperti itu. Di webinar tersebut, beliau marah. Beliau mengatakan, bahwa beliau ada di lapangan dan mempertanyakan apa maksud dan tujuan saya. Sampai seperti itu.

Padahal niat kami kan mengingatkan, ini kan sangat biasa kita temukan di rantai birokrasi. Di mana 600



”
Jaringan Gusdurian Peduli memiliki pendekatan yang berbeda, karena kami punya jejaring di tingkat lokal maka apapun pilihan yang kami putuskan akan selalu melibatkan teman-teman di tingkat lokal...
 “

ribu rupiah ditetapkan di tingkat pemerintah pusat. Namun, sampai di ujung bisa sangat berbeda. Mungkin beliau waktu itu menangkapnya berbeda. Saya juga tidak tahu. Ironis memang pada waktu itu. Kami memang tidak punya kerja sama langsung dengan Kemensos.

Di sisi lain, kami melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah. Misalnya dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di Yogyakarta, Gusdurian Peduli juga menjadi bagian dari Gerakan Sabetan Jogja yang memiliki relasi kuat dengan pemerintah daerah. Jadi sangat bergantung tingkat lokalitasnya.

Apakah pemerintah pusat merespons gerakan kami atau tidak? Sepanjang saya tahu, pemerintah pusat merespons. Angka 11 ribu anak yatim yang menjadi korban pandemi juga sempat diangkat oleh Menteri Sosial saat ini, Ibu Tri Rismaharini. Namun,

langkah selanjutnya seperti apa, kami terus terang tidak bisa menangkapnya di lapangan. Karena memang bisa jadi terkait dengan otonomi daerah. Apa yang ada di Kemensos itu belum tentu bisa dilaksanakan secara vertikal dan terkoordinasi, karena memang harus menyeberang ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) lalu ke pemerintah daerah. Kami sendiri tidak paham, turunnya (bantuan) seperti apa. Namun, pada banyak anak yang kami sambangi, mereka juga tidak dapat apa-apa dari negara. Lebih banyak mendapat bantuan dari masyarakat lain yang *concern*.

SP: Apakah ada sentral-sentral Gusdurian Peduli di tiap-tiap wilayah ataukah Gusdurian Peduli menjemput bola dengan bertanya langsung ke masyarakat?

AW: Kami menggunakan dua pendekatan tersebut. Jadi di *platform* pedulianakyatim.id dan melalui media sosial, kami menyebarkan formulir

daring, mereka bisa mengisi kalau ada informasi anak yatim di sekitar mereka yang perlu dibantu. Selain itu, teman-teman relawan Gusdurian Peduli memang ada di lapangan, jadi mereka juga terekspose data langsung dari lapangan, itu menjadi sumber data dan informasi utama kami.

Data tersebut juga ditambah dari *platform* kawalmasadepan.com, yang juga mempunyai *database* yang diserahkan ke Gusdurian Peduli untuk disampaikan bantuannya. Jadi, sumber datanya datang dari mana-mana karena banyak sekali *request*-nya. Sebenarnya kami kewalahan juga. Jadi sambil bekerja, kami sambil belajar untuk membuat desain program yang lebih *sustainable*, yang lebih tepat dengan situasi. Karena dalam setiap kondisi bencana, memang banyak masyarakat yang ingin bersolidaritas, ingin mengulurkan hatinya atau tangannya atau dananya, tetapi itu sering kali tidak *sustainable*.

Misalnya begini, dalam banyak kasus, Gusdurian Peduli itu menahan diri untuk tidak langsung turun tangan. Seperti bencana alam, kami penggalangan dana pasti cepat, menurunkan relawan juga cepat. Namun, kami menyebarkan bantuan tersebut sampai satu minggu atau satu bulan. Masyarakat biasanya langsung bergerak cepat jika kami adakan penggalangan dana, saat itu menyumbang, tetapi tiga bulan atau satu bulan kemudian sudah tidak tertarik lagi karena ada hal lain yang menjadi perhatian.

Sementara dalam kondisi bencana, pada minggu ketiga itu problem pasti muncul. Seperti infeksi saluran pernapasan, diare, dan lain-lain. Itu sudah tidak ada bantuan tuh. Atau misalnya dalam kasus seperti ini. Anak-anak itu mendapat perhatian ekstra, semua orang membicarakan anak yatim. Namun, setelah dua bulan sudah tidak ada yang menemani mereka. Jadi Gusdurian itu ekstra hati-hati dalam hal seperti ini, memastikan bahwa walaupun ada psikolog, ada teman-teman dari universitas yang mau membantu, kami membagi mereka dalam tahapan-tahapan ini agar kemudian tidak diturunkan semuanya di awal. Jadi biar lebih *sustainable*.

SP: Adakah kendala yang dihadapi terkait dengan niat baik dalam berbagi dengan masyarakat ini? Bagaimana respons pemerintah terhadap gerakan solidaritas masyarakat seperti yang dilakukan Gusdurian?

AW: Kalau dengan pemerintah lokal, tahun lalu sampai puncak pandemi kadang-kadang pemerintah itu *denial* kalau ada problem di lapangan. Salah satu contohnya di Madura. Di sekitar Madura terdapat pulau-pulau kecil dengan pulau terbesar, yaitu Pulau Tangeang. Rumah sakit hanya ada di Pulau Tangeang. Di pulau kecil, seperti Pulau Sapeken, hanya ada Puskesmas.

Jika ada kasus Covid-19 di pulau kecil dan tidak tertangani di Puskesmas/ Polides maka pasien harus di bawa ke rumah sakit terdekat menggunakan kapal boot dengan jarak tempuh lima jam. Sebelum terjadi pandemi, hal tersebut tidak masalah, karena yang sakit sedikit. Begitu pandemi, dalam waktu seminggu, angka kasus positif naik dari 7 ke 50, dan 19 orang yang terinfeksi merupakan petugas kesehatan di Polides. Ada 7 orang yang kondisinya kritis, kemudian ketika dibawa ke rumah sakit terdekat di Sumenep, butuh waktu 4–5 jam, akhirnya 4 dari 7 orang tersebut meninggal di jalan.

”
Bagi kami, tanggung jawab kami yang pertama itu kepada masyarakat, bukan kepada pemerintah. Itu cara pandang kami.
 “

Ketika hal tersebut kami laporkan ke Pemerintah Kabupaten Sumenep, awalnya pemerintahnya tidak terima. Kemudian kami diminta Satgas Covid Pusat untuk mempertemukan Satgas Covid Pusat, petugas dari kabupaten, kecamatan, puskesmas, dan lain-lain. Setelah mendengarkan langsung keluhan dari lapangan, pihak pemerintah kabupaten baru tergerak.

Gusdurian Peduli juga akhirnya mencari dana untuk membeli ambulans laut. Membeli kapal yang *speed*-nya lebih tinggi untuk mengangkut orang sakit. Dengan ambulans laut tersebut, untuk membawa pasien ke rumah sakit

hanya butuh waktu 50 menit sehingga lebih mampu menyelamatkan nyawa korban khususnya di pulau-pulau kecil. Jadi, begitulah contoh konteks kerja sama dengan pemerintah lokal. Sangat bergantung dari pemerintah lokalnya.

Kami juga pernah menemui hambatan dengan Pemerintah Kabupaten Kudus saat awal-awal. Namun, setelah kami melakukan pertemuan-pertemuan, akhirnya mereka bisa lebih responsif, karena waktu itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengirim bantuan militer untuk meng-enforce pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi itu tantangannya, kadang-kadang pemerintah lokalnya tidak responsif dan *denial* dalam beberapa hal.

Bagi kami, tanggung jawab kami yang pertama itu kepada masyarakat, bukan kepada pemerintah. Itu cara pandang kami. Jadi yang diprioritaskan adalah masyarakatnya. Apabila pemerintah lokalnya bisa didekati dan diajak kerja sama, marilah bekerja sama. Apabila tidak, juga tidak apa-apa. Jika pemerintah memiliki logika sendiri, silakan. Kami tetap menjalankan upaya-upaya untuk merespons situasi untuk kebutuhan masyarakat.

SP: Apakah saat ini ambulans laut tersebut masih ada? Siapakah yang mengoperasikan?

AW: Ada nelayan yang memiliki izin untuk mengoperasikan kapal *speed boat* tersebut. Dialah yang kami jadikan nakhoda atau operatornya, bekerja sama dengan Puskesmas. Semuanya dikelola oleh masyarakat setempat. Teman-teman Gusdurian Peduli hanya mengawasi dan melakukan supervisi. Jadi masyarakat itu kalau diajak kerja sama dan diberi tanggung jawab, mereka bisa bertanggung jawab. Itu semua untuk mereka sendiri, yang penting bisa menjaga kepercayaan.

SP: Dalam penanganan di lapangan, tentunya memerlukan biaya operasional. Apakah biaya tersebut didapat dari penggalangan dana Gusdurian Peduli?

AW: Penggalangan dana Gusdurian Peduli sudah berlangsung lama. Jadi kami sudah punya mekanisme, dan ada audit akuntan publiknya juga. Jadi kami hati-hati betul soal ini. Kalau misalkan ada orang yang menyumbang, kami juga bertanya, boleh atau tidak sebagian dananya dipakai untuk biaya operasional. Kalau tidak boleh, kami pun tidak menggunakannya. Untuk operasionalnya, kami ambil dari donasi yang lain.

Sekarang cukup banyak orang yang paham bahwa dalam situasi seperti ini, biaya operasional kadang justru cukup besar. Jadi para donatur ini yang justru memberikan dananya untuk operasional.

Di kami, sebagian besar donaturnya muslim, jadi akad menjadi sangat penting. Bergantung bagaimana akadnya, kami akan melakukan itu.

SP: Apa kendala yang paling sulit dalam menangani pandemi Covid-19 termasuk menangani anak-anak yatim?

AW: Hal paling berat adalah meyakinkan pihak-pihak yang ada di lapangan. Seperti di Bangkalan, situasinya itu sempit parah sekali. Satgas Covid pun sempat berkali-kali meminta tolong Gusdurian Peduli untuk menyambungkan pertemuan dengan masyarakat lokal.

Misalnya, pada malam ini saja, ada tujuh tahlilan orang meninggal, tetapi tidak diakui karena mereka tidak menganggap meninggalnya karena Covid-19. Di Bangkalan, jika pemerintah datang, apalagi dengan puskesmas, penduduknya lari. Jadi di sana berkembang macam-macam

pandangan tentang Covid-19. Jadi kami mendekatinya dengan pendekatan kyai. Itu yang menjadi tantangan besar. Membangun jejaring lokalnya, mencari solusinya.

Yang kedua, pada awal pandemi, relawannya juga kan tidak berani bekerja ekstra. Kalau bencana alam mereka sudah berani, siap turun. Namun, untuk penanganan pandemi Covid-19 ini, relawannya juga takut tertular. Itu tantangan utamanya.

Kalau soal donasi justru tidak jadi masalah. Justru solidaritas masyarakat meningkat pada saat pandemi. Pada tahap pertama tahun 2020, Gusdurian Peduli melalui kitabisa.com, mampu mengumpulkan sumbangan sebesar 6 miliar rupiah dari 3 ribu penyumbang. Jadi 3 ribu orang ini ada yang menyumbang mulai dari 2 ribu, 2 juta, hingga 5 juta rupiah. Itu hanya dari kitabisa.com. Secara total, Gusdurian Peduli menyalurkan donasi sekitar hampir 20 miliar rupiah.

SP: Setiap orang sebenarnya memiliki kepedulian untuk sesama. Namun, untuk mengoordinasikan suatu gerakan solidaritas mungkin agak sulit, salah satunya kendala jaringan yang kurang luas. Apa tip dari ibu agar kami bisa turut berperan dalam masyarakat?

AW: Itu sangat bergantung dari yang ingin dilakukan. Saat ini, sebenarnya tidak sulit untuk menginisiasi gerakan karena ada media sosial. Banyak inisiasi yang dimulai oleh orang-orang yang tidak punya posisi yang dianggap *privileged*.

Beberapa minggu lalu, saya menjadi juri untuk program Pahlawan Warga. Salah satu yang menarik adalah ada seorang polisi di Makassar yang dia tahu gara-gara pandemi ini anak-anak kecil itu kehilangan kesempatan untuk belajar di sekolah. Sementara anak-anak ini tidak punya *gadget*. Yang dilakukan Polisi di Kota Makassar

ini adalah memanfaatkan lahan kosong di sebelah pemakamam. Ia membuat tempat yang sederhana sekali menggunakan bambu dengan uangnya sendiri. Di tempat tersebut, anak-anak diajak main dan belajar oleh Polisi tersebut. Padahal ia juga bukan penjabat. Hanya polisi biasa setingkat Sertu.

Artinya apa, kita memang tidak membutuhkan dana untuk memulai dan tidak membutuhkan *influence* yang tinggi. Namun, hanya membutuhkan niat dan kemudian kemampuan kita untuk melakukan *environmental scanning*, pemetaan lingkungan. Apabila kita tahu kebutuhan wilayah itu misalnya A, sedangkan kita tidak punya *expertise* di situ, kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Atau apabila kita punya *expertise* yang ingin kita gunakan untuk berkontribusi, apa yang mesti kita lakukan. Itu pendekatannya beda.

Kalau kita hanya bisa menyumbang dana, banyak *platform* yang bisa digunakan. Kalau kita ingin menyumbang ilmu, kita tinggal memilih apakah kita ingin menginisiasi sendiri atau bergabung dengan inisiasi lain yang kira-kira ilmu kita terpakai.

Kalau di *playgroup*/TK saya, hal itu namanya *resources fullness*, yaitu kemampuan kita untuk melihat situasi dan panjang akal untuk bertindak. Misalnya kondisinya masyarakat membutuhkan bantuan, saya bisa punya ilmu ini. *Resources fullness* itu akan membuat kita berpikir bagaimana cara untuk bertindak. Jadi berpikir solusi. Itu nanti akan ketemu. Kalau menyumbang dana, ya sumbang dana; kalau sumbang *skill*, ya sumbang *skill*. **(Tim Pewawancara: Hari Nasiri Mochtar, Lilly Widayati, Pandu Pradhana, dan M. Iksan Maolana) ■**



ALIF IMAN NURLAMBANG

AKTIVIS SOSIAL, PENGGAGAS GERAKAN SOLIDARITAS SEJUTA TES ANTIGEN

MERESPONS DENGAN SOLIDARITAS

Pandemi Covid-19 telah menggugah sebagian masyarakat untuk membantu sesama. Salah satu yang menarik adalah Gerakan Sejuta Tes Antigen dan penyediaan tabung oksigen yang digagas oleh Alif Iman Nurlambang dan rekan. Bagaimana ia mengawali gerakan tersebut dan apa saja suka duka yang dihadapi? Simak wawancara Alif Iman Nurlambang dengan SIMPUL berikut ini.

SIMPUL (SP): Bagaimana awal mula Bapak terlibat dalam kegiatan solidaritas untuk membantu penanganan Covid-19 di masyarakat?

ALIF IMAN NURLAMBANG

(AI): Perkenalkan, saya Alif Iman Nurlambang. Sebelumnya, selama beberapa tahun saya menjadi wartawan, terutama di Kantor Berita Radio 68H di Utan Kayu. Kemudian terlibat dalam beberapa misi kemanusiaan dengan Federasi Palang Merah Internasional, di antaranya saat tsunami Aceh tahun 2004, kemudian operasi Ebola di Sierra Leone, Afrika Barat, tahun 2014. Terakhir adalah waktu kita semua merespons bencana tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah.

Pada bulan September 2020, kami seperti layaknya semua orang, punya

Whatsapp Group (WAG), yang di dalamnya terdapat tokoh nasional di antaranya Goenawan Mohamad, Erry Riyana Hardjapamengkas, Kuntoro Mangkurosurobroto, Sarwono Kusumaatmadja, Natalia Soebagjo, almarhumah Ibu Toeti Heraty, ada juga Ibu Atikah Makarim. Untuk yang muda selain saya, ada juga Olga Lidya, Joko Anwar, Lola Amaria. Jadi dari berbagai kalangan. Kami biasa mengobrol tentang berbagai hal.

Pada saat itu, kami mendapatkan info di WAG bahwa WHO (World Health Organization) telah merekomendasikan penggunaan tes Swab Antigen sebagai alternatif dari tes Swab PCR. Rekomendasi WHO adalah untuk diagnostik, bukan hanya penapisan. Pada waktu itu hanya ada Rapid Tes Antibodi, yang diambil darah. Nah, metode ini kan sudah dikritik banyak ahli.

Jadi waktu itu kita bersepakat, bagaimana kalau kita kampanyekan saja ini. Bagaimana kalau penggunaan tes *Swab Antigen* ini disosialisasikan kepada masyarakat, terutama kepada pengambil keputusan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), dan seterusnya. Oleh karena itu, pada 28 Oktober 2020 lalu, kami mendeklarasikan diri dengan nama "Gerakan Solidaritas Sejuta Tes Antigen untuk Indonesia".

Kami kemudian mengumpulkan dana melalui *platform* *kitabisa.com*. Lalu, pada bulan April tahun 2021, kami sumbangkan hasil perolehan dana itu kepada Pemerintah Daerah Jawa Barat, yang pada saat itu zona merahnya relatif sangat banyak, selain Jakarta. Kami juga membantu wilayah-wilayah penyangga Jakarta, seperti Depok, Bekasi, Bogor, yang kasus Covid-19-nya cukup tinggi juga. Setidaknya kalau kami membantu Jawa Barat maka kami membantu Jakarta juga. Sederhana saja, karena dana yang dikumpulkan tidak cukup banyak. Saya rasa sekitar empat sekian miliar dana dari masyarakat itu.

SP: Selain membuat Gerakan Sejuta Tes Antigen di *kitabisa.com*, setahu kami, Bapak juga membantu masyarakat yang membutuhkan tabung oksigen. Bisa diceritakan mengenai hal tersebut?

AI: Sebetulnya pada bulan Juli–Agustus 2021, kami sudah mau menutup program tersebut. Tidak bisa berlama-lama juga, karena ini semata-mata hanya respons. Namun, pada akhir Juni 2021, sekitar tanggal 29, ada kabar kelangkaan tabung oksigen, terutama di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Sementara yang butuh banyak sekali. Di WAG itu juga banyak

ahli kesehatan, seperti Prof. Akmal Taher, ahli epidemiologi Pandu Riyono, dan pakar pendidikan Henny Supolo. Saat itu, yang banyak dibicarakan adalah soal kelangkaan tabung oksigen.



Program kami adalah mengupayakan tabung-tabung oksigen yang tidak terpakai tersebut dipinjamkan untuk orang lain yang membutuhkan.



Bagaimana untuk membantu situasi ini? Ketika langka, tentu akan sulit mencari tabung oksigen. Kami kemudian berpikir, sebenarnya banyak juga orang yang punya tabung oksigen, tetapi tidak butuh. Orang-orang inilah yang kami koordinasikan. Program kami adalah mengupayakan tabung-tabung oksigen yang tidak terpakai tersebut dipinjamkan untuk orang lain yang membutuhkan.

Sambil berjalan, kami menghubungi beberapa produsen yang memproduksi dan mengimpor tabung oksigen. Akhirnya, kami pun memiliki beberapa tabung oksigen, tetapi untuk tabung oksigen 6 m³, kami tidak bisa memberikan karena untuk rumah sakit dan pemerintah. Namun, untuk tabung oksigen 1 m³ kami menjualnya.

Saat ini, harga tabung oksigen sudah gila-gilaan. Pada awal bulan Juli 2021, 1 m³ tabung oksigen lengkap itu harganya sudah Rp2,8 juta sampai Rp3,2 juta. Harga normal dari produsen ada di antara

Rp850 ribu sampai Rp1,2 juta. Para produsen yang kami hubungi rupanya menawarkan harga normal. Para inisiator kemudian saling patungan dan dibantu dana masyarakat yang diperoleh melalui *platform* *kitabisa.com*. Jadi, sampai minggu ketiga bulan Juli 2021, kami berhasil mengumpulkan maupun membeli total 449 tabung oksigen berbagai ukuran, baik 1 m³; 1,5 m³; maupun 6 m³.

SP: Bagaimana Bapak dan tim memilih siapa yang perlu diberikan bantuan dan bagaimana cara pendistribusiannya?

AI: Jadi, setelah tanggal 29 Juni 2021, kami melakukan empat tahap sekaligus. Pertama, mencari sumber tabung oksigen: produsennya di mana dan warga mana yang mempunyainya. Kedua, menyiapkan sistem pinjam meminjam, termasuk membuat *drafting* untuk perjanjian kesepakatan, agar mereka memelihara, menjaga, dan merawat. Jadi, ada semacam hitam di atas putih. Ketiga, kita merekrut relawan. Keempat, melatih, karena terus terang tenaga lapangan kami tidak punya *background* kesehatan, apalagi pengetahuan tentang oksigen. Jadi, kami belajar bagaimana *set up* tabung oksigen, bagaimana pengisian tabung oksigen, atau bagaimana membawa tabung oksigen yang aman.

Malamnya, kami mengiklankan melalui media sosial dan WAG bahwa mulai 1 Juli 2021, kami akan meminjamkan oksigen kepada warga isolasi mandiri yang tidak mendapat rumah sakit, karena tingkat BOR (*bed occupation ratio*) sangat tinggi waktu itu. Ada juga mereka yang sedang antrean IGD (Instalasi Gawat Darurat) rumah sakit, karena di IGD pada waktu itu tidak disediakan tabung oksigen, yang memang sedang langka.



”
 Pemerintah lebih baik menambah kapasitas Puskesmas (untuk penanganan Covid-19) daripada kita membentuk lembaga baru yang sifatnya *ad hoc*.
 “

SP: Apakah sistemnya siapa cepat dia dapat atau ada kriteria pemilihannya?

AI: Keduanya, Pak. Jadi, di dalam formulir itu ada pertanyaan yang sifatnya *assessment*. Pertama, siapa yang duluan, lalu dicek saturasinya berapa, tensinya berapa, kondisinya bagaimana, Covid atau tidak, masih bisa ditolong atau tidak. Jadi, ada juga yang memang kita pikir ini tidak bisa kita jangkau, ada kasus permintaan di Tigaraksa, Tangerang. Orangnya tidak bisa datang, dan kita juga tidak bisa kirim relawan. Jauh sekali, dan itu malam. Waktu itu dengan terpaksa kita mengatakan untuk dibawa ke rumah sakit secepatnya, karena dikasih oksigen pun tidak akan membantu.

Prof. Akmal mengingatkan ada beda antara orang itu butuh oksigen atau orang itu butuh HB (hemoglobin-

nya ditingkatkan. Jadi, kalau kebutuhannya peningkatan HB, ya oksigen tidak "nendang", jadi harus ke rumah sakit.

SP: Berapa jumlah relawan yang direkrut dan bagaimana distribusinya?

AI: Kita naik turun ya, Pak. Tapi kita total punya 20 relawan. Dimulai dari 6 orang. Termasuk relawan gudang, relawan admin. Jadi, ada admin yang memeriksa secara *online* formulir yang masuk, kemudian dia merespons. Termasuk cek apakah kondisinya memang membutuhkan. Karena terus terang saja pada waktu itu ada juga orang yang cemas, dia sedang isolasi mandiri, dia takut butuh oksigen walaupun dia belum butuh. Lalu yang kedua adalah relawan yang mengurus keadministrasian gudang. Dia memeriksa tabung

oksigen, isinya, dan kelengkapannya dengan baik dan memadai. Ketiga adalah relawan lapangan yang mengantarkan oksigen apabila tidak ada keluarga pasien yang tidak bisa datang ke gudang kami di Utan Kayu.

Relawan yang mengantarkan tabung oksigen itu memang harus dengan kendaraan roda empat. Pada awalnya, ada yang meminjamkan kendaraannya kepada kami. Selanjutnya, kami sewa kendaraan-kendaraan itu karena kebutuhannya makin banyak. Sampai dengan akhir Juli 2021, sudah melebihi 1.200 peminjam tabung oksigen, yang meminta tentu lebih besar dari itu. Kalau berdasarkan permintaannya kesanggupan kita meminjamkan ternyata hanya sekitar 13–16%. Jadi, kapasitasnya masih kecil. Terbatas sekali.

SP: Saat ini, kasus Covid-19 sudah mulai turun. Bagaimana pemanfaatan tabung oksigen itu sekarang?

AI: Jadi, dari awal memang semuanya gratis. Mereka meminjam selama tujuh hari dan bisa diperpanjang. Ada persyaratan ketika mengembalikan, tabung harus kembali diisi oksigen penuh. Namun, ada sekitar 10% yang mengembalikan dalam kondisi kosong karena mereka memang sulit atau merasa biaya pengisian oksigen cukup mahal.

Ada beberapa orang yang secara sukarela mau menjadi hub atau posko kami di luar kota, seperti di Cirebon, Lampung, Palembang, Palu, Dabo Singkep, Banggai, Padang, Medan, Binjai, dan Pekanbaru. Mereka mengupayakan memiliki 2–3 tabung oksigen, lalu kami kirimkan tambahannya. Jadi ketika kasus Covid-19 di Jakarta mulai turun, kami mengoper tabung oksigen ke daerah-daerah tersebut.

SP: Setelah Covid-19 mereda, apa yang akan dilakukan terhadap tabung-tabung oksigen tersebut?

AI: Sekarang ini, kami memang sedang merancang *exit strategy*. Tabung-tabung yang sudah berada di berbagai hub itu, kelak akan kami biarkan di sana, untuk menjadi program yang akan kami sebut sebagai pengelolaan oksigen berbasis komunitas. Tinggal nanti jumlahnya dievaluasi. Misalnya, Palembang hanya membutuhkan 35 tabung, jadi sisanya bisa disebar ke tempat lain di sekitar Palembang.

Yang kedua adalah menitipkan di satu institusi rumah sakit. Kami sempat berbicara dengan Direktur Utama RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkosumo, Jakarta) untuk memberikan tabung oksigen ke RSCM. Pihak RSCM menyanggupi

untuk mengelola tabung oksigen yang kami titipkan.

Kita tidak pernah tahu kondisi pandemi ini ke depan. Jadi mendingan kami titipkan dulu saja di RSCM. Nanti kalau banyak yang membutuhkan, kami akan mengambilnya lagi.

Kami juga berencana memberikan tabung oksigen kepada hub untuk komunitas. Bentuknya masih kami rumuskan, entah berupa hibah atau penitipan.

Pada intinya, ketika kasus Covid-19 sudah berakhir maka kami menganggap program bantuan antigen maupun tabung oksigen yang kami lakukan sudah waktunya juga untuk tutup. Program ini hanyalah respons sehingga tidak permanen. Jika permanen maka kami harus menjadi perusahaan.

SP: Kami melihat, Bapak terus memantau hal-hal yang terjadi di masyarakat. Menurut Bapak, adakah hal-hal lain terkait pandemi Covid-19 yang perlu melibatkan solidaritas masyarakat dalam penanganannya?

AI: Betul, kebetulan *background* saya di sana. *Insyaa Allah* sekarang ada dua topik yang sedang dalam tahap perbincangan di internal kami. Pertama adalah mengenai penanganan limbah akibat pandemi. Kedua adalah masalah pengangguran yang tidak mudah diatasi, kalau tidak banyak melibatkan orang. Hanya memang bentuknya seperti apa, kami belum tahu. Namun, dua topik itu saya rasa membutuhkan partisipasi publik yang sangat luas. Kalau masalah limbah dan pengangguran sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah, kasihan pemerintahnya, jadi bulan-bulanan kritik. Jadi, harus banyak orang yang terlibat di situ.

SP: Adakah masukan dari Bapak kepada kami yang ada di pemerintahan terkait dengan penanganan pandemi pada masa mendatang?

AI: Yang dilakukan pemerintah itu kan luar biasa berat dan besar. Saya sendiri memiliki pengalaman turut serta dalam penanganan bencana baik di Aceh, Sierra Leone, dan Palu. Jadi, saya memahami tingkat kesulitannya. Namun, kalau boleh urun usul, pemerintah seharusnya sudah mulai mengalihkan beban kerja yang selama ini ditangani oleh lembaga-lembaga *ad hoc* kepada lembaga-lembaga yang memang bekerja untuk itu.

Sebagai contoh Puskesmas, yang sudah lama bukan lagi menjadi tenaga utama di dalam penanganan wabah. Pemerintah selama pandemi setahun lebih ini lebih mengedepankan Satgas. Kita tahu bahwa kapasitas Puskesmas terbatas, kecil sekali. Namun, pemerintah lebih baik menambah kapasitas Puskesmas (untuk penanganan Covid-19) daripada kita membentuk lembaga baru yang sifatnya *ad hoc*. Mungkin itu. Untuk yang lain saya tidak berani. Karena tahu pemerintah mana pun di dunia belum dapat *best practice*-nya sehingga semua masih bergelut menangani wabah seperti ini.

(Tim Pewawancara: Hari Nasiri Mochtar, Wiky Witarni, Pandu Pradhana, dan M. Iksan Maolana)



Foto: bertadly.pikiran-rakyat.com

SETO MULYADI

PSIKOLOG ANAK, KETUA UMUM LEMBAGA
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

MITIGASI ANAK DARI DISRUPSI PANDEMI

Tak hanya menyerang kesehatan, disrupsi pandemi yang menimbulkan tatanan hidup baru ternyata bisa berdampak buruk terhadap psikologis dan perkembangan karakter anak. Dalam wawancara dengan SIMPUL berikut, Prof. Seto Mulyadi, psikolog anak yang lebih dikenal dengan Kak Seto, membedah mitigasi yang perlu dilakukan orang tua dan guru untuk menghindari hal tersebut.

SIMPUL (SP): Bagaimana sebenarnya karakteristik anak-anak dan apa yang mereka perlu pelajari pada masa pandemi ini?

SETO MULYADI/KAK SETO (KS):

Semua anak pada dasarnya senang belajar. Itu mohon jangan dilupakan. Kemudian, anak-anak juga senang bergerak, senang berteman, senang berpetualang, senang menghadapi tantangan, tapi juga senang bermain, kreatif, dan senang mencipta. Selama ini bisa dipenuhi maka ini berkaitan juga dengan belajar. Belajar itu jangan terlalu kaku, hanya akademik saja. Kalau kita mengacu pada pendidikan kita, yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor satu ada etika, nomor dua ada estetika, lalu ada ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), nasionalisme, dan kemudian ada kesehatan dan olahraga.

Dalam keadaan demikian, jangan ganggu ipteknya, tetapi juga tetap perlu belajar yang lain. Etikanya bagaimana? Bagaimana mempraktikkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari? Estetika pun sama. Nah, saat di rumah, anak-anak bisa belajar lewat banyak hal seperti merapikan kamar sendiri, merapikan rumah, atau membuang sampah di tempatnya. Itu semua terkait dengan kehidupan. Lalu ilmu pengetahuan juga bisa dipelajari dengan beberapa materi yang ada di kurikulum sekolah. Nasionalisme dipelajari melalui bagaimana cara agar bangga sebagai anak Indonesia. Anak yang beragam sukunya, beragam adat istiadatnya, agamanya, tapi kita tetap kompak. Ada unsur kebhinnekaannya.

Kesehatan juga perlu dipelajari terkait dengan bagaimana menghadapi pandemi ini. Jadi, bagaimana menjaga

kesehatan, bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental, tidak mudah baper (terbawa perasaan), tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, dan tetap tangguh. Hal itu diberikan dengan pendekatan penuh kekeluargaan di rumah. Yang penting tidak terbebani dengan kurikulum. Mungkin kita ingat Surat Edaran Menteri Pendidikan kita, Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan di Masa Darurat.

SP: Apa kira-kira dampak positif dan negatif antara Covid-19 dengan pembelajaran?

KS: Belajar daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Jadi pelajarannya sebaiknya yang mudah ditangkap, yang mudah dicerna. Jangan terus membahas hanya dalil Phytagoras, hukum Boyle dan segala macam, sinus, cosinus, tangen, cotangent karena terlalu abstrak. Padahal kadang-kadang anak harus berhadapan dengan masalah susah sinyal, kuota habis, atau laptop satu dipakai bergantian.

Dari hasil belajar daring ini, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menemukan 13 persen anak Indonesia mengalami depresi. Ya, karena tertekan. Karena ketinggalan materi, padahal sinyal susah, tapi situasi pembelajaran terlalu kaku.

Ada yang belajar menatap layar dari pagi sampai sore atau menjelang sore. Padahal *screen time* juga terbatas. Ada yang kemudian sakit mata, lalu pakai kacamata. Ada yang stres, harus dirawat, dan mengalami sakit jiwa.

Kami mencatat minimal dua anak bunuh diri dan sebagainya. Akhirnya juga melahirkan berbagai kekerasan: kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dari mulai dicubit, dipukul, dijewer, ditendang, ditampar, dimarahi, dibanding-bandingkan, hingga dibentak. Ini data dari KPAI. Ini semua

yang membuat anak akhirnya stres. Kalau begini yang terjadi adalah terjadi *learning loss*. Artinya, anak-anak kehilangan keterampilan untuk belajar. Padahal semua anak senang belajar.

”

Yang terjadi sekarang memang tanpa sadar ada kekerasan terhadap anak atas nama kurikulum. Padahal seharusnya kurikulum untuk anak, bukan anak untuk kurikulum.

“

Manakala kurikulum kaku, akhirnya semua stres, banyak anak yang mogok belajar, tidak suka belajar. Akhirnya kehilangan keterampilan untuk belajar. Ini bahayanya, dampaknya, dan akhirnya jadi kontraproduktif. Anak jadi tidak senang belajar, benci belajar, lebih senang melakukan tindak kriminal, dan sebagainya. Namun, beberapa di antaranya ada juga yang bisa menangkap inti dari pemahaman belajar.

SP: Apakah mungkin perlu ada penyesuaian kurikulum pada masa pandemi agar anak-anak bisa belajar dengan lebih baik?

KS: Mungkin kurikulumnya memang harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jika melanjutkan dari Surat Edaran Menteri tadi, hal tersebut berkaitan dengan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan sehingga jangan terlalu menekankan pada penuntasan kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan.

Yang terjadi sekarang memang tanpa sadar ada kekerasan terhadap

anak atas nama kurikulum. Padahal seharusnya kurikulum untuk anak, bukan anak untuk kurikulum. Anak-anak di tempat yang terpencil, di gunung, di pantai, di mana pun, terkendala berbagai macam komunikasi, tapi harus mengikuti kurikulum secara normal. Ini tidak *fair*, tidak adil. Begitu juga kekerasan terhadap anak sehingga dampaknya 13 persen anak depresi.

Idealnya pembelajaran bisa dikelola dengan baik oleh guru, tetapi komunikasi yang efektif antara orang tua dan guru juga perlu. Jadi dalam hal ini mohon jangan hanya anak menatap layar, mendengar materi dari guru, tapi anak-anak juga diberi kesempatan, ayah dan bunda juga komunikasi dengan guru.

Guru bisa menyampaikan target-targetnya, tapi orang tua melaporkan, misalnya, mohon maaf ini anak saya sinyalnya suka susah. Sampai ada yang naik ke atas pohon, saya takut jatuh, atau kuota sudah habis, kami dalam keadaan kena PHK (pemutusan hubungan kerja). Semua kendala tadi harus disampaikan. Karena yang penting anak suka belajar, bisa belajar lewat hal lain seperti merapikan rumah. Atau mungkin kalau di pantai, bisa belajar memancing. Di sawah, belajar mengenai masalah sawah. Intinya belajar berbagai hal yang terkait dengan kurikulum kehidupan dengan apa pun yang masih bisa dilakukan pada masa pandemi ini.

Selanjutnya, pada Surat Edaran Menteri juga ditekankan pada kecakapan hidup saat pandemi Covid-19. Kecakapan hidup yang penting, misalnya anak gembira dan bahagia. Pada beberapa anak yang sudah bisa mencapai hal ini, prestasinya banyak yang meningkat. Anak lebih percaya diri, anak lebih ada pendekatan yang individual, lebih kreatif, lebih siap untuk menghadapi kehidupan, dan sebagainya, karena ditekankan pada kecakapan hidup.

Mas Menteri (Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) sudah menekankan itu. Nah, kalau itu dijaga, kami juga sudah membuktikan dengan pembelajaran informal dan nonformal dengan program *home schooling* dari tahun 2007, lulusannya bahkan diterima di Fakultas Kedokteran, ada di FKUI, UGM, USU, dan Unhas, ada IPB, ITB, itu yang eksakta. Begitu juga yang psikologi, ekonomi, diterima juga di beberapa tempat, di Monash, Deakin, Raffles, Harvard, dan sebagainya. Kemudian di universitas swasta juga banyak. Lulusan HSKS (Home Schooling Kak Seto) juga bisa menjadi artis, olahragawan tingkat internasional, hafiz Al-Quran, model, dan sebagainya.

Jadi intinya adalah bagaimana lingkungan anak bisa menciptakan suasana yang sejuk. Ibaratnya, anak merupakan aneka warna bunga yang akan merekah dengan segala keelokannya. Kalau semuanya sejuk, bersahabat, tapi juga ada panduan dan komunikasi efektif dengan para guru di sekolah, tentunya hasilnya akan bagus, sehingga tidak akan mengalami hilangnya keterampilan untuk belajar atau *learning loss* tadi.

SP: Ada arahan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) harus dipercepat. Padahal kondisinya anak belum divaksin. Apakah ini untuk menghindari *learning loss* tersebut? Lalu dari segi kurikulum sebenarnya untuk belajar *offline*, bukan *online*. Apakah ini untuk mengejar ketertinggalan itu?

KS: Kalau kita melihat hak asasi anak, kita tahu anak dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan ini komitmen internasional, *convention the right on the child*. Hak anak yang pertama adalah hak hidup. Jadi hidup dulu. Jangan gara-gara anak PTM, tertular, dan kemudian lemah. Indonesia ini tercatat sebagai

korban meninggal tertinggi di dunia. Apakah kita rela membiarkan anak meninggal sehingga hak pertama anak terlanggar?

Kedua adalah hak sehat. Mungkin anak tetap hidup dan belajar di rumah. Namun, kalau setiap hari dimarahi oleh orang tuanya, anak-anak akan stres dan bisa masuk rumah sakit jiwa. Itu tentunya berbahaya juga.

Yang ketiga adalah hak pendidikan. Saya selalu mengampanyekan bahwa selama anak belajar di rumah, mohon para orang tua mengambil gelar "S-3", yaitu sangat sabar sekali, bahkan "S-5", sangat sabar sekali dan selalu senyum. Selalu senyum untuk anak. Jadi senyum itu modal utama untuk membuat suasana sejuk. Marah pun kalau bisa sambil senyum. Sambil senyum, membelai, sambil memegang tangannya, anak akan merasa damai, tidak terguncang, tidak frustrasi, dan sebagainya. Kalau mau meledak (emosi), ledakkan saja, tapi dengan bernyanyi, tidak dengan memaki putra-putrinya. Intinya memang di tangan kita para orang tua.

Mohon jangan sampai PTM ini digunakan untuk alasan politis. Sebanyak 1,7 miliar anak di seluruh dunia juga mengalami *learning loss* ini. Namun, bergantung bagaimana kita mengelola. Kami sudah 14 tahun ini mempraktikkan *home schooling*. Ada yang *not just school at home*, tapi *schooling yang homy*. Mungkin di sekolah, dua kali atau tiga kali seminggu, mungkin per hari juga hanya 2–3 jam. Kami juga punya kelas untuk anak-anak marjinal, ada anak jalanan, anak ART (asisten rumah tangga), anak pemulung, dan sebagainya. Namun, prestasi mereka juga bisa meningkat karena dikaitkan dengan kebahagiaan dan ketenangan dalam belajar. Belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan.

Jadi mohon ini juga menjadi pertimbangan bersama, baik itu

pemerintah, masyarakat, maupun orang tua. Yang wajib adalah wajib belajar, bukan wajib sekolah. Belajar itu bisa kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Dalam UU Sisdiknas, UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 26–27, belajar itu bisa formal, nonformal, bisa informal, dan itu bisa saling melengkapi, atau saling menggantikan. Menggantikan kalau anak ada dirawat di rumah sakit, akhirnya pindah ke jalur nonformal atau informal. Atau ada anak peserta olimpiade atau pertandingan-pertandingan internasional harus ke luar negeri dan beberapa bulan tidak sekolah, atau harus berada di *training center* sekian lama. Itu juga bisa dengan cara begitu. Termasuk juga dalam keadaan bencana, misalnya di NTT (Nusa Tenggara Timur), Poso, datau beberapa tempat lain yang mengalami bencana gempa dan banjir. Itu tetap dengan jalur itu, nonformal dan informal. Kalau sudah bisa maka formal kembali. Yang penting, semangat belajar anak jangan sampai padam.

Belajar ada tentang etika, estetika, bernyanyi, menggambar, menari, teater, bermain musik, atau apa saja. Yang penting pemahaman belajar anak terbentuk, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau anak sudah menemukan kepercayaan dirinya, karena sudah diketahui tipe kecerdasan, potensi dan bakatnya, belajar apa pun dia juga akan senang. Begitu PTM juga akan gembira.

Untuk meningkatkan perkembangan psikososial anak, perlu sesekali diadakan Zoom Meeting antarteman. Mereka jadi saling berkomunikasi dan hal itu juga membuat anak senang. Itu juga bagian pembelajaran yang membuat anak mengembangkan potensinya lebih semangat lagi.

SP: Yang menjadi masalah pada pembelajaran *online*, guru-guru tidak terlalu terlatih untuk mengasuh

”
**Temukanlah
 kebahagiaan di
 dalam proses belajar
 sehingga belajar terasa
 menyenangkan, tidak
 memberatkan atau
 menyiksa.**
 “



Foto: panjiarasyanet.com

anak dari jauh satu per satu. Setahu saya, di pendidikan guru pun tidak diajarkan secara metode menghadapi anak-anak nakal dengan ekstrasabar. Apakah perlu, selain kurikulum, guru-guru juga diajarkan perilaku ekstrasabar tersebut?

KS: Saya kira memang betul. Salah satu kompetensi guru ini adalah menjadi sahabat anak, kreatif, punya ide-ide baru, menjalin komunikasi yang luas, dan sebagainya. Namun, yang paling penting adalah kerja sama atau sinergi antara guru dan orang tua. Jadi, mungkin juga perlu ada panduan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memandu kepala sekolah dan guru berkomunikasi efektif dengan para orang tua. Itu juga bagian dari pertemuan yang harus selalu diadakan sehingga semua ada komunikasi. Para orang tua juga tahu apa materi yang paling penting ditekankan. Para orang tua bisa memberikan masukan, mengingatkan guru, bahwa pada Surat Edaran

Menteri jangan terlalu menekankan untuk penuntasan kurikulum untuk kelulusan atau kenaikan kelas.

Artinya, Mas Menteri saja peduli pada perlindungan anak. Nah, terkadang justru orang tua yang sangat berambisi, menekan kepada anak untuk begini dan begitu termasuk tidak boleh malas. Padahal semua anak pada dasarnya rajin. Namun, jangan ada kekerasan atau jangan sampai membuat mereka kehilangan kepercayaan diri. Marilah kita semua pendidik, baik guru dan orang tua, untuk menemukan keunikan masing-masing.

Saya ingat dulu waktu kecil saya dikenal sebagai 3B: paling buruk, paling bandel, dan paling bodoh. Namun, dulu ibu saya mengingatkan, agar saya tidak bodoh maka saya harus belajar, belajar apa saja yang saya paling suka. Saya ingat dulu waktu remaja, saya terus menghafal protozoa, porifera, dan quelintera

sambil bernyanyi meminjam lagu bintang kecil. Jadi dibuat senang saja. Dulu waktu kecil, nilai Matematika saya paling tinggi 4. Supaya bisa senang, saya belajar Matematika sambil lompat-lompat. Pokoknya belajar harus dibuat menyenangkan dan temukan potensi masing-masing. Senang gambar, belajar sambil gambar. Senang bernyanyi, belajar sambil bernyanyi.

Temukanlah kebahagiaan di dalam proses belajar sehingga belajar terasa menyenangkan, tidak memberatkan atau menyiksa. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi anak yang nakal. Karena pada zaman *now*, saya belum pernah melihat anak yang bandelnya lebih dari saya waktu kecil. Intinya, kebandelan itu dibuang, kalau perlu dengan bela diri atau olahraga. Dibuang supaya menjaga keseimbangan.

Dalam hal ini, intinya selain membuat kurikulum yang ramah anak, kurikulum

darurat dalam masa pandemi ini, juga hendaknya dapat menemukan potensi setiap anak. Karena anak yang percaya diri, punya konsep yang positif, itu akan mudah belajarnya. Belajar itu mengasyikkan, dari tidak tahu jadi tahu; dari tidak bisa, jadi bisa. Intinya belajar, tapi tetap menyenangkan.

SP: Pandemi Covid-19 tidak hanya memunculkan isu kesehatan, tetapi juga isu multidimensional, khususnya pada anak. Ini dimulai dari *learning loss* pada pendidikan anak, kenaikan konsumsi *gadget* dan media sosial pada anak, meningkatnya angka pernikahan anak, penurunan produktivitas anak, dan sebagainya. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan kita kehilangan generasi. Apa yang kemudian masyarakat bisa lakukan, khususnya orang tua, terkait generasi untuk membangun Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh?

KS: Memang sekarang ini, bukan hanya anak yang perlu belajar, kunci utama adalah orang tua. Jadi kelas-kelas *parenting* itu mutlak diperlukan. Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada Puspaga (Pusat Pendidikan Keluarga). Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mungkin ada kurikulum untuk keluarga untuk membangun keluarga yang tangguh, harmonis, dan sebagainya. Hal ini tentunya dalam rangka menurunkan tingkat kekerasan kepada anak, meskipun orang tua juga mungkin banyak tekanan dalam hidupnya.

Kita punya RT/RW (rukun tetangga/rukun warga). Mari berdayakan RT/RW ini. Ibaratnya, melindungi dan mendidik anak sekarang ini perlu orang sekampung. Mungkin ada anak yang tiba-tiba yatim piatu, tidak ada keluarga yang terdekat, tetangga kiri-kanan segera bertindak. Jadi pemberdayaan *parenting skill* ini diberdayakan juga melalui RT/RW. Mungkin ditambah seksi perlindungan

anak dan seksi pemberdayaan perempuan di tingkat RT, atau apa saja. Saya kira itu yang paling penting. Dan yang perlu diingat, orang tua yang bijak, mendidik anak sesuai zamannya. Jadi zaman *now*, zaman pandemi, orang tualah yang menjadi "guru". Pendidikan juga tidak perlu kaku dengan akademik, yang penting anak bahagia di rumah, menikmati kebersamaan, dan kemudian belajar apa saja.

”

Kalau kita memimpikan Indonesia yang kukuh, yang bersatu, mulailah dari Indonesia yang paling dini, yaitu keluarga kita.

“

Intinya membuat keluarga menjadi lebih kompak, mensyukuri keadaan pandemi ini, dan melihat hal-hal yang positif. Untuk para orang tua, saya mohon diingat bahwa pendidik yang pertama dan utama adalah orang tua. Ayo, kita rebut kembali.

Kami mempraktikkan *home schooling* selama 15 tahun. Bahkan kami punya sekolah formal yang didirikan sejak tahun 1982 bekerja sama dengan Cambridge, sekarang beralih menjadi *home schooling* semua. Jadi, *home schooling* ternyata lebih menyenangkan, tetapi standar materi pembelajarannya sama (dengan sekolah formal), standar kompetensi lulusan sama, dan standar evaluasi juga sama. Jadi, prestasi akademik mereka tetap cemerlang, tapi juga tetap bahagia dan gembira.

Buktinya, dulu saya tes di lima Fakultas Kedokteran Gigi, semua gagal. Mereka anak-anak yang *home schooling*, yang belajarnya santai, justru mudah sekali lulus di Fakultas Kedokteran yang saingannya lebih berat. Jadi, intinya ciptakan suasana belajar yang ramah anak, ciptakan kekompakan, termasuk kekompakan dengan para bapak/ibu guru di sekolah.

SP: Kurikulum itu harusnya untuk anak ya, bukan anak untuk kurikulum. Menurut Kak Seto, bagaimana kurikulum pendidikan anak sekarang, khususnya anak usia TK dan SD?

KS: Kalau berbicara mengenai taman kanak-kanak (TK), memang sekarang banyak anak-anak TK yang stres. Bahkan ada yang bilang taman kanak-kanak, tempat belajar sambil menangis. Padahal seharusnya TK seharusnya menjadi tempat bermain dan berteman banyak. Nah, ini baru taman, belum sekolah. Sekolahnya baru nanti sekolah dasar (SD). Sejak zaman Prof. Dr. Fuad Hassan, Menteri Pendidikan orde baru dulu, beliau sudah mewanti-wanti, jangan mengajarkan *calistung* (membaca, menulis, berhitung) di TK. Di TK, anak-anak belajar karakter dulu, belajar bekerja sama, belajar tolong-menolong, belajar antre, belajar saling menghargai. Nilai-nilai moral dan etika, itu yang lebih penting, selain tentunya bermain gembira.

Saat ini, sering kali masuk SD favorit harus ada tes *calistung*. Akhirnya TK-TK memaksa anak belajar *calistung*. Secara perkembangan kognitif anak, hal itu belum saatnya. Akhirnya anak jadi stres, tidak mau belajar, tidak mau sekolah, dan sebagainya.

SP: Karakter orang tua tentunya beda-beda. Bagaimana mengantisipasi karakter orang tua yang berbeda-beda ini untuk anak?

KS: Memang kunci utama adalah pengendalian emosi dari orang tua.



Wawancara Daring bersama Tim SIMPUL

Saya punya resep hidup sehat, yaitu GEMBIRA. Gembira ini singkatan dari **G** adalah gerak, jangan mager (malas gerak). Dengan bergerak, darah mengalir lancar dalam badan. Akhirnya juga memudahkan pengelolaan emosi, lebih cerdas, lebih mudah berpikir, mengingat, dan sebagainya. Jadi, selain anak-anak gerak, ayah bunda juga jangan mager, jangan jadi kaum rebahan.

E adalah emosi cerdas. Jika sedang ribut, ungkapkan saja emosi ayah dan bunda, tetapi jangan di depan anak. Buatlah semacam "sidang kabinet terbatas", ayah dan bunda bisa mengobrol berdua, jangan ribut di depan anak. Dengan demikian, keluarga akan tetap mesra.

M adalah makan makanan sehat dan teratur. Kita juga harus peduli pada asupan gizi. **B** adalah berdoa, beribadah, bahagia, dan bersyukur. Kita akan bahagia jika penuh rasa syukur. **I** adalah jangan lupa istirahat, atur waktu. Jangan begadang tiap malam. Kita perlu istirahat. Idealnya 7–8 jam untuk istirahat, itu bagus juga untuk kesehatan mental. Paling tidak istirahat dari benci, dari dendam, dari iri, dengki, dan sebagainya. **R**-nya adalah rukun dalam keluarga dan ramah satu sama lain. **A** adalah tetap aktif berkarya. Jadi, ini yang membuat kita tetap sehat.

Kunci utama adalah kita perkukuh dulu kesatuan dalam keluarga. Kalau kita memimpikan Indonesia yang kukuh,

yang bersatu, mulailah dari Indonesia yang paling dini, yaitu keluarga kita. Mungkin dengan cara begitu kita juga kembangkan terus karakter-karakter positif tadi. Dengan saling introspeksi, pada dasarnya bisa diperbaiki. Marah, boleh marah, ledakkan saja. Kalau saya marah, kadang-kadang bukan hanya sansak, tembok pun saya pukul. Setelah itu, saya merasa puas dan tidak jadi marah. Ungkapkan dengan komunikasi yang lebih efektif. Dengan begitu kita menjaga kesehatan mental kita. **(Tim Pewawancara: Wignyo Adiyoso, Teresna Murti, Pandu Pradhana, dan Feita Puspita Murti)**



WARSONO

PENERIMA BANTUAN SOSIAL DI WILAYAH
KOTA DEPOK, JAWA BARAT

BANTUAN UNTUK BERTAHAN

Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan perekonomian masyarakat. Pemerintah pun mengupayakan pemulihan ekonomi nasional salah satunya melalui pemberian bantuan sosial (bansos). Kali ini SIMPUL menghadirkan Warsono, warga Kota Depok yang menerima bansos dari pemerintah setempat. Ia akan menceritakan suka-duka kehidupannya bertahan hidup pada masa pandemi dan kemanfaatan bansos yang diterimanya.

SIMPUL (SP): Ada banyak bansos yang diberikan ke masyarakat pada masa pandemi, seperti dari Kementerian Sosial, pemerintah setempat, komunitas, individu, dan lainnya. Bisakah dijelaskan, bansos yang Bapak terima berasal dari mana dan bagaimana manfaat yang Bapak rasakan?

WARSONO (WA): Terima kasih. Terkait dengan bansos, saya tidak begitu hafal dengan bantuan-bantuan apa saja yang saya terima, yang jelas saya menerima bantuan dari pemerintah dan ada juga yang dari individu. Bila ditanya apa manfaatnya? Sangat banyak dan sangat membantu perekonomian saya sekeluarga. Berhubung Covid-19 ini dampaknya sangat besar, terutama bagi pensiunan seperti saya, saya merasa sangat terbantu dengan bansos tersebut.

SP: Boleh diceritakan bantuan yang diterima dari pemerintah maupun individu tersebut apa saja, Pak? Apakah berupa berupa barang atau uang tunai?

WA: Pertama kali bantuan dari Bapak Presiden berupa beras 25 kilogram. Lalu, ada juga bantuan dari Gubernur Jawa Barat berupa sembako. Kemudian bantuan dari Kementerian Sosial berupa uang tunai Rp600 ribu, yang saya ambil di Kantor Pos. Dua hari yang lalu, saya dapat bansos lagi dari kementerian juga yang per bulan Rp200 ribu, dirapel tiga bulan dalam bentuk sembako. Ada juga bantuan dari Gerintas (Gerakan Tangan di Atas).

SP: Menurut Bapak, sebaiknya sampai kapan pemerintah atau komunitas perlu memberikan bantuan sosial ini?

WA: Menurut saya, selama ada Covid-19, kayaknya harus ada bantuan tersebut. Namun, ketika kasus Covid-19 sudah melandai, dan mungkin bisa cepat berlalu, kasihan juga kalau rakyat terus membebani pemerintah dengan bansos. Semoga Covid-19 ini cepat berlalu dan rakyat juga bisa bernapas lagi, bekerja pelan-pelan. *Alhamdulillah* ketiga anak saya sudah kembali bekerja.

SP: Saat ini, apa aktivitas yang Bapak lakukan setelah pensiun?

WA: Sebenarnya bukan pensiun, karena sudah usia 55 tahun, saya dirumahkan oleh perusahaan tempat saya bekerja. Aktivitas saya setelah pensiun, selain jadi pembawa acara, menimang cucu, saya juga menjadi terapis bekam.

SP: Selama pandemi, apakah tetap masih ada yang berobat, Pak?

WA: *Alhamdulillah*, tetap ada. Ada yang ke rumah, ada yang memanggil lewat telepon.

SP: Menurut Bapak, bantuan yang paling bermanfaat untuk saat ini, apakah berbentuk modal usaha ataukah kebutuhan sehari-hari?

WA: Kalau bisa dua-duanya. Namun, saya bersyukur sudah mendapat bantuan dari pemerintah yang telah membantu banyak kepada saya dan keluarga. Kalau untuk modal usaha, kemarin sudah ada dari beberapa bank yang membantu dan cair juga untuk modal usaha istri saya.

SP: Menurut Bapak, apakah data penerima bansos di wilayah Bapak sudah benar? Bagaimana kriterianya?

WA: Kalau untuk penyaluran bansos, dari pihak RT (Rukun Tetangga) sudah mencoba untuk

menyalurkannya supaya semua kebagian. Jadi, setiap paket dibongkar, dikumpulkan, dan dibagi secara rata. Begitulah yang dilakukan di sini. Jadi, walaupun namanya tidak ada di daftar warga penerima bansos, kalau memang layak menerima, akan diberikan.

”

Terkait butuh uang atau barang, dua-duanya penting. Namun, bentuk uang lebih fleksibel, bisa untuk modal usaha.

“

SP: Untuk orang-orang yang tidak tercatat tersebut, apakah akan diusulkan untuk mendapatkan bansos? Kalau Bapak diminta memilih, Bapak akan memilih uang atau barang? Apakah bantuan yang diterima dalam bentuk uang itu rutin Bapak terima?

WA: Sebenarnya dari pihak RT sudah mencatat nama-nama dan meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) warga untuk diajukan sebagai penerima bansos. Namun, saat bansos turun, tidak semuanya kebagian. Jadi, yang diajukan 100 warga, tetapi bansos yang turun hanya 50 paket. Daripada yang 50 warga tidak kebagian, lebih baik dibongkar lagi pakatnya lalu dibagi rata agar semua warga kebagian.

Terkait butuh uang atau barang, dua-duanya penting. Namun, bentuk uang lebih fleksibel, bisa untuk modal usaha. Kebetulan istri

saya juga di rumah membuka usaha rumahan dengan berjualan es kulkul dan es mambo.

Untuk bantuan yang berbentuk uang, seharusnya per bulan Rp200ribu, tetapi terkadang dirapel per tiga bulan menjadi Rp600ribu. Terakhir bansos berbentuk beras 3 liter, buah-buahan, kacang hijau, dan segala macam juga dengan total Rp600 ribu untuk tiga bulan.

SP: Apakah ada harapan-harapan lain dari Bapak yang mungkin perlu dilakukan pemerintah?

WA: Harapan untuk Indonesia saja agar Indonesia lebih sehat, lebih baik, lebih bersemangat hidup, dan lebih taat beribadah. Begitu saja. Dan kalau bisa dari pihak pemerintah pun bisa membangkitkan masyarakatnya untuk semangat bekerja dan berinovasi.

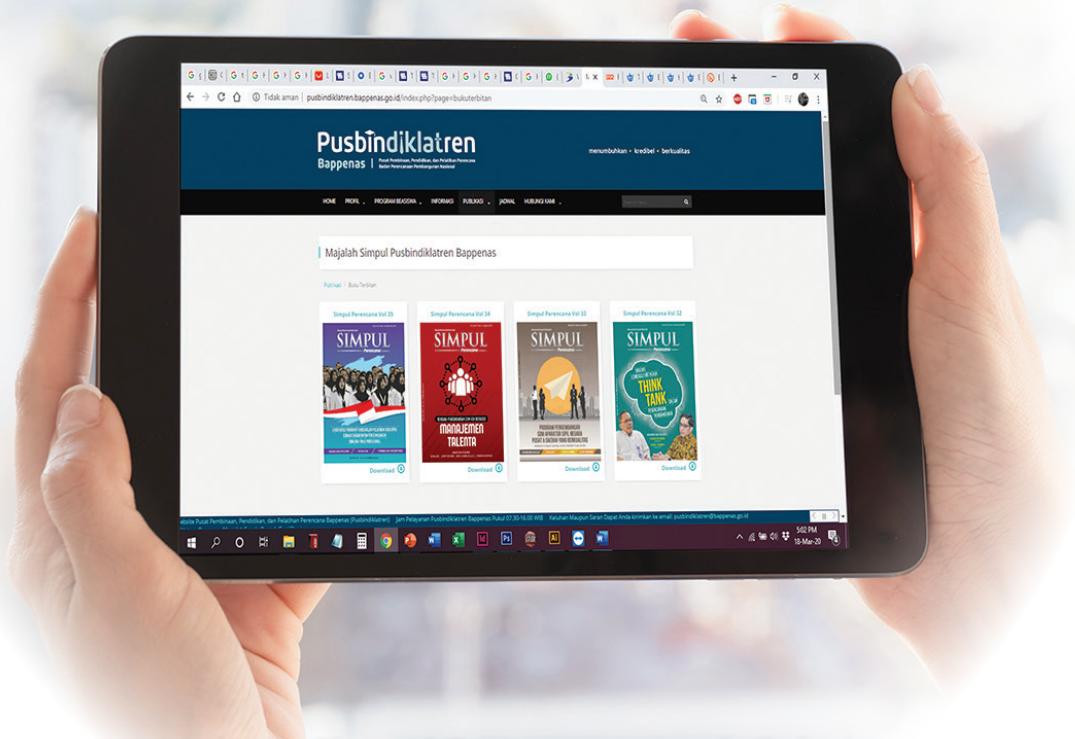
SP: Bisakah Bapak ceritakan tentang usaha bekam Bapak dan jualan es mambo istri Bapak sebelum dan setelah adanya pandemi ini?

WA: Kalau untuk terapi bekam saat pandemi, awalnya saya takut juga (tertular Covid-19). Saya selalu menanyakan kepada pasien yang ingin dibekam apakah badannya panas atau tidak, sehat atau tidak. Jika tidak ada masalah kesehatan tersebut, saya lanjut terapi. Namun, sekarang kelihatannya sudah pada sehat-sehat (setelah divaksin).

Kalau untuk istri, berjualan es kulkul dan es mambo yang merupakan jajanan untuk anak kecil, sepertinya tidak terdampak pandemi.

(Tim Pewawancara: Hari Nasiri Mochtar, Lilly Widayati, Pandu Pradhana, dan Feita Puspita Murti) ■

#BacaSimpul



Majalah Simpul Perencana versi digital dapat dibaca dan diunduh melalui situs web Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas atau melalui *platform* Issuu:



bit.ly/baca-simpul



bit.ly/issuu-pusbindiklatren

Menuju Perencana Profesional

SIMPUL
Perencana

PROGRAM BEASISWA PUSBINDIKLATREN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



www.pusbindiklatren.bappenas.go.id
Pusbindiklatren Bappenas
@pusbindiklatren



PROGRAM BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS bertujuan mendukung upaya peningkatan kapasitas institusi perencanaan pemerintah di pusat dan daerah (*institutional capacity building*), dengan menggunakan *institutional approach*, yaitu setiap permohonan menjadi calon penerima beasiswa harus sesuai dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di instansinya.

Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas **KHUSUS DISEDIAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)** yang bekerja di Kementerian PPN/ Bappenas, unit perencanaan di kementerian/Lembaga, Bappeda atau instansi setingkat yang menangani perencanaan, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dan/atau unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan.

INFO LEBIH LANJUT, HUBUNGI: 021-319 28280/319 28285/319 28279
PUSBINDIKLATREN@BAPPENAS.GO.ID

BEASISWA PROGRAM PENDIDIKAN

S-2 DALAM NEGERI

S-2 TEMATIK DALAM NEGERI SMART CITY

S-2 AFIRMASI DALAM NEGERI

SPLIT-SITE MASTER PROGRAM (SSMP)

PERSYARATAN UMUM:

1. Belum pernah mengambil/memiliki pendidikan S-2.
2. Telah diangkat menjadi PNS 100% minimal 1 tahun dengan pangkat/golongan minimal III/a.
3. Batas usia maksimal 37 tahun (khusus S-2 Afirmasi Dalam Negeri, batas usia maksimal 42 tahun).
4. IPK minimal 2,75 (khusus S-2 Afirmasi Dalam Negeri, IPK minimal 2,50)
5. Pelamar yang diprioritaskan adalah (a) fungsional perencana; (b) perencanaan di instansi perencanaan atau yang bekerja di unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan; dan (c) PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan.
6. Diusulkan secara resmi oleh instansi asal melalui pejabat pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Pimpinan Pratama (Eselon II) yang menangani kepegawaian. Surat usulan harus menyebutkan nama-nama pegawai yang diusulkan dan program/topik beasiswa yang diminati.
7. Formulir pendaftaran harus dilengkapi dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Human Capital Development Plan (HCDP) yang terdapat di instansi masing-masing.

++ Informasi selengkapnya dapat disimak di situs web Pusbindiklatren Bappenas



BEASISWA PROGRAM PELATIHAN

PELATIHAN TEKNIS

FORUM ILMIAH INTERNASIONAL

STAFF ENHANCEMENT

ACADEMIC EXCHANGE

PERSYARATAN UMUM:

1. Peserta merupakan PNS yang bekerja di unit kerja perencanaan minimal 1 tahun.
2. Calon peserta diusulkan oleh instansi asalnya melalui pejabat pembina kepegawaian (minimal Pejabat Pimpinan Pratama/Eselon II)
3. Pendidikan minimal S-1/D-4 dengan golongan minimal III/a.
4. Batas usia maksima 2 tahun sebelum pensiun (khusus Staff Enhancement, batas usia maksimal 5 tahun sebelum pensiun).
5. Peserta Staff Enhancement wajib membuat proposal dalam bahasa Inggris sesuai topik yang dipilih.

++ Informasi selengkapnya dapat disimak di situs web Pusbindiklatren Bappenas

PILIHAN TOPIK PELATIHAN TEKNIS:

Individu: City Planning, Monitoring dan Evaluasi, Perencanaan dan Penganggaran; **Berkelompok:** KPBU/PPP, PPD-RPJMD, Perencanaan Lingkungan, Perencanaan Pengelolaan Bencana, Kelayakan Proyek, LERD, PPD, Renstra

- Program **Staff Enhancement** dan **Academic Exchange** bekerja sama dengan universitas di Jepang
- **Forum Ilmiah Internasional** dapat diikuti di Indonesia, Jepang, Negara Kawasan Asia Pasifik, atau Australia



BEASISWA PROGRAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP)

PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA 7 MINGGU

UJI KOMPETENSI PERENCANA AHLI MUDA/AHLI MADYA/AHLI UTAMA 120 MENIT*

WORKSHOP PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK) 5 HARI

WORKSHOP ADMINISTRASI PENILAIAN ANGKA KREDIT (APAK) 3 HARI

PERSYARATAN UMUM PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA (FP) DAN UJI KOMPETENSI:

1. Pendidikan minimal strata 1 (S-1) atau diploma 4 (D-4) dari semua disiplin ilmu.
2. Bersaal dari unit kerja perencanaan.
3. PNS 100% dengan masa kerja 1 tahun (sejak menjadi PNS 100%).
4. Batas usia setinggi-tingginya pada saat mengikuti Uji Kompetensi:
 - 51 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana ahli pertama dan ahli muda;
 - 53 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana ahli madya;
 - 58 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana ahli utama. Bagi JPT yang akan pindah jabatan, dapat mengikuti ketentuan di satuan **http://seting-pns-2019**
5. PNS pindah jabatan selain butir (4) di atas, juga harus melampirkan surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan, sekurang-kurangnya 2 tahun yang diketahui oleh atasan langsungnya minimal Pejabat Eselon II.
6. Surat usulan harus diandatangani oleh serendah-rendahnya Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab menangani kepegawaian.

7. Menyertakan surat pernyataan formal kebutuhan jabatan fungsional perencana dari kepegawaian.
8. Bagi Perencana yang akan naik jabatan selain butir (6) di atas, juga wajib melampirkan selain SK pengangkatan ke dalam JFP dan salinan Peraturan Angka Kredit (PAK) terakhir.
9. Melampirkan surat rekomendasi dari pengelola kepegawaian perihal pengangkatan dalam JFP selambat-lambatnya 6 bulan sejak persyaratan untuk naik pangkat/jabatan telah terpenuhi.
10. Melampirkan surat pernyataan dari pengelola kepegawaian yang mengatakan bahwa sudah tidak ada alumni pelatihan fungsional perencana yang belum diangkat dalam JFP.
11. Mengisi dan melengkapi data-data sesuai dengan formulir isian daring yang ada di situs web Pusbindiklatren Bappenas dan mengirim berkas kelengkapan pendaftaran pelatihan.
12. Bagi para calon peserta yang sudah pernah mendaftar pada tahun sebelumnya, tetapi belum terpenggali, silahkan mendaftar kembali dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan dan persyaratan di atas.
13. Dokumen kelengkapan persyaratan pelatihan yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak akan diproses lebih lanjut.

PERSYARATAN UMUM WORKSHOP PAK DAN WORKSHOP APAK:

1. Surat usulan ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab menangani kepegawaian minimal Pejabat Eselon II;
2. Mengisi dan melengkapi data-data sesuai dengan formulir isian daring yang ada di laman www.pusbindiklatren.bappenas.go.id;
3. Melampirkan salinan SK PNS dan jajah terakhir;
4. Mengirimkan berkas kelengkapan pendaftaran diklat sebagai berikut: untuk butir (1) dan (2) adalah dokumen asli sedangkan butir (3) adalah salinan/fotokopi dokumen (data yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak akan diproses lebih lanjut).

++ Informasi selengkapnya dapat disimak di situs web Pusbindiklatren Bappenas





FOCUS GROUP DISCUSSION

PROGRAM MAGANG BAGI ASN PERENCANA

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/ Bappenas telah melaksanakan kegiatan FGD Program Magang bagi ASN Perencana.

Focus Group Discussion (FGD) Program Magang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Perencana merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Pusbindiklatren dalam upaya pengembangan program pelatihan. Metode pelatihan kini telah berkembang dari yang hanya klasikal menjadi klasikal dan nonklasikal. Salah satu bentuk pelatihan nonklasikal adalah magang. Magang merupakan proses pembelajaran untuk memperoleh dan menguasai keterampilan dengan melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan

itu (Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil). Dari definisi ini, dapat ditarik tiga karakteristik magang yaitu (1) memperoleh keterampilan melalui praktik langsung; (2) dapat dibimbing oleh orang yang terampil; dan (3) dilakukan selama jangka waktu tertentu di tempat kerja.

Kegiatan FGD Program Magang dilakukan secara daring pada hari Senin, 30 Agustus 2021. Kegiatan ini berlangsung pada pukul 08.00–15.30 WIB dan dihadiri oleh 190 peserta melalui Zoom dan 259

peserta melalui YouTube. Peserta berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lembaga nonpemerintah.

Kegiatan ini dibuka oleh Dr. Ir. Himawan Hariyoga Djojokusumo, M.Sc. selaku Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan, "Program magang diharapkan bisa menjadi tawaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan dari berbagai instansi, baik di pusat maupun di daerah. Penyelenggaraan FGD ini juga sangat pas momentumnya terutama dalam konteks dinamika reformasi birokrasi. Melalui FGD ini diharapkan dapat menghasilkan

rumusan untuk program magang ke depannya."

Acara dilanjutkan dengan penyampaian arahan dari Dr. Guspika, M.B.A. selaku Kepala Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas. Beliau menjelaskan peran Pusbindiklatren yang memperoleh mandat sebagai *enabler* pembangunan nasional melalui peningkatan kapasitas perencana pembangunan. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa sebelumnya program magang telah dilaksanakan oleh Pusbindiklatren, tetapi masih terbatas. Beliau mengatakan "Kami telah melakukan program magang di dalam dan di luar negeri. Berbagai bentuk magang memang perlu

dievaluasi agar pengalaman yang diperoleh saat magang bisa sesuai dengan kebutuhan dari instansi asal. Melalui FGD ini, kami akan merumuskan kebijakan magang di Pusbindiklatren dengan melibatkan partisipasi narasumber dan peserta."

Untuk memperoleh informasi dan masukan mengenai penyusunan desain program magang yang komprehensif, Pusbindiklatren mengundang delapan narasumber dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan lembaga nonpemerintah. Kegiatan diskusi dibagi menjadi dua sesi dengan Wignyo Adiyoso, S.Sos., M.A., Ph.D. (Perencana Ahli Madya Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas) sebagai moderator sesi



Sambutan dan Pembukaan disampaikan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas



Para narasumber menjawab berbagai pertanyaan dari para peserta pada sesi diskusi.

pertama dan Teresna Murti, S.H., M.P.M. (Perencana Ahli Madya Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas) sebagai moderator sesi kedua.

Narasumber pada sesi diskusi pertama di antaranya adalah Feni Damayanti, SE., MPP. (Analisis Kebijakan Madya, Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, LAN); Dr. Rukijo, S.E., M.M. (Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Keuangan); Elminda Sari (Vice President Human Capital Strategy, Mandiri University Group); dan Drs. Sri Bagus Guritno, AK, M.Sc. (Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/

Bappenas). Sementara untuk sesi kedua diisi oleh Dr. Salim Mustofa (Sekretaris Jenderal Indonesia Japan Business Network (IJB-Net)); Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si. (Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat); Dr. Hariman Dahrif, S.Pi. M.T.P. (Kepala Subbidang Pengendalian Administrasi Program Bidang Evaluasi dan Pengendalian, Bappeda Provinsi Papua); dan Heni Kurniasih, Ph.D. (Sekretaris The SMERU Research Institute).

Melalui materi yang disampaikan oleh kedelapan narasumber tersebut, para peserta memperoleh informasi mulai dari kebijakan nasional mengenai program magang hingga contoh praktik-praktik magang yang telah

berhasil dilaksanakan, baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah. Kegiatan FGD Program Magang bagi ASN Perencana ini merupakan diskusi awal yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi berikutnya hingga program magang ini dilakukannya. "Masih banyak tantangan yang harus dibenahi. Untuk selanjutnya kami juga berencana untuk melakukan penajakan dengan *partner* dari setiap daerah." ungkap Wigny Adiyoso, S.Sos., M.A., Ph.D. dalam penutupan kegiatan FGD ini. **(Penulis: Diana Ayu Ahira/ Pusbindiklatren)** ■



Foto: Dok. Novita Anggraeni (Alumni Program S-2 Afirmasi 2019)

PROGRAM BEASISWA S-2 AFIRMASI DALAM NEGERI

Dalam mendukung percepatan pembangunan nasional, yang bertumpu pada lima kerangka kebijakan, salah satunya pembangunan sumber daya manusia unggul.

Sejak tahun 2018, Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas membuka Beasiswa Afirmasi untuk kuliah jenjang S-2 di dalam negeri, dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan masa studi maksimum 24 bulan. Dalam menjalani studi ini, karyasiswa mendapat pembekalan praktis dalam bentuk magang di instansi pemerintah dan/atau institusi lainnya yang relevan dengan tema program pendidikan.

Target Beasiswa Afirmasi Pusbindiklatren ini hanya ditujukan kepada para PNS, tetapi

tidak semua PNS di Indonesia memenuhi persyaratan untuk mendaftar. Beasiswa Afirmasi ini dikhususkan bagi PNS yang berasal dari kabupaten/kota/provinsi di wilayah Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat, Sulawesi Barat. Selain itu, beasiswa ini juga ditujukan bagi PNS dari kabupaten/kota di daerah-daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63/2020 tentang penetapan daerah Tertinggal tahun 2020-2024 (Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten

PERSYARATAN PESERTA PROGRAM S-2 AFIRMASI DALAM NEGERI

SYARAT ADMINISTRATIF

A. Pengusulan dari Instansi	Eselon II Bidang Kepegawaian
B. Unit Kerja	Perencanaan
C. PNS 100%, Golongan III/a (minimal)	1 tahun
D. Strata Pendidikan Minimal	D-4/S-1
E. Minimal Lulus D-4/S-1	2 tahun
F. Umur Maksimal	42 tahun (per 1 Agustus 2022)
G. IPK Minimal	2,75
H. Surat Keterangan Rencana Pengembangan SDM	Eselon II Bidang Kepegawaian

SELEKSI NASIONAL

A. Tes Potensi Akademik (TPA)	400 (MIA Unsri dan MIA UB) 450 (MAP UGM)
B. TOEFL Seleksi Minimal	400
C. Wawancara	Menunjukkan Komitmen

Kepulauan Mentawai, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Sigi).

Syarat mengikuti beasiswa ini, antara lain Pendidikan S-1/D-4, IPK minimal 2.75, maksimal usia 42 tahun per tanggal 1 Agustus 2022. Adapun skor Tes Potensi Akademik (TPA) yang disyaratkan minimal 400 dan skor TOEFL minimal 400. Khusus untuk pilihan program studi Magister Administrasi

Publik Universitas Gadjah Mada mensyaratkan skor TPA minimal 450. Pelamar juga wajib melampirkan Surat Pengusulan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) setempat.

Dalam penyelenggaraan Program Beasiswa S-2 Afirmasi ini, Pusbindiklatren bekerja sama dengan program studi yang menjadi pelaksanaannya, yaitu Magister Ilmu Administrasi Universitas Sriwijaya (MIA UNSRI), Magister Administrasi

Publik Universitas Gadjah Mada (MAP UGM), dan Magister Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (MIA UB).

Pada tahun 2021, penempatan karyasiswa Program Beasiswa Afirmasi, sebanyak 25 orang, yaitu 11 orang karyasiswa di MIA UB, 9 orang karyasiswa di MAP UGM, dan 5 orang karyasiswa di MIA UNSRI. **(Penulis: Wiky Witarni/ Pusbindiklatren)** ■



PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA 2021 (AHLI PERTAMA, AHLI MUDA, DAN AHLI MADYA) SECARA DARING/*ONLINE*

Perubahan paradigma pembangunan, sebagaimana tercermin dalam UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan tentang semakin pentingnya peran dan fungsi para perencana, baik di Pusat maupun di daerah.

Salah satu konsekuensi terhadap adanya perubahan tersebut adalah perlunya program peningkatan kompetensi para perencana sehingga mereka mampu mengakomodasi berbagai perubahan, yang selanjutnya diantisipasi dan dijabarkan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat luas.

Selain itu, sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kekuatan daya saing suatu bangsa. Bagi Indonesia, mewujudkan SDM berkompeten

dan berdaya saing di kanvas internasional merupakan kunci memenangkan persaingan pada era global. Sumber daya manusia yang berkompeten dapat diwujudkan, salah satunya melalui standardisasi dan sertifikasi kompetensi. Dengan bekal sertifikasi kompetensi, sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020

tentang Jabatan Fungsional Perencana, yang menyebutkan bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya manusia pada aparatur negara yang bertugas melakukan kegiatan perencanaan pembangunan diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan secara penuh sebagai perencana, dan untuk menjamin pembinaan karier, kepangkatan/jabatan dan profesi di bidang perencanaan pembangunan ditetapkan Jabatan Fungsional Perencana.

Selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana, agar pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana dapat berjalan dengan baik, Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun soal uji kompetensi dengan menggunakan acuan dari kurikulum berbagai pelatihan perencanaan yang telah dilaksanakan sehingga materi dan pokok bahasanya lebih dalam dan komprehensif serta berjenjang sesuai dengan tingkatan perencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Paragraf 4 - Pengangkatan dan Persyaratan Jabatan Fungsional, Pasal 75 menyebutkan bahwa

- a. Ayat (1) telah dihapus butir (e) perihal mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi Pembina;
- b. Ayat (2) Persyaratan dimaksud pada butir (a) di atas diperuntukkan bagi

pengangkatan pertama yang merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana (JFP) telah dijelaskan pada

- a. Bagian Kedua, Pengangkatan Pertama, Pasal (15)
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JFP dari calon PNS;
- b. Bagian Ketiga, Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain, Pasal (16)
Pengangkatan dalam JFP melalui perpindahan dari jabatan lain setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Pengangkatan dalam JFP melalui perpindahan jabatan harus mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan jenjang JFP yang akan diduduki.

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan peraturan tersebut di atas maka tidak ada lagi syarat pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk menduduki jabatan fungsional. Namun, uji kompetensi tetap merupakan salah satu syarat untuk menduduki jabatan fungsional. Ketentuan di dalam JFP, kewajiban mengikuti dan lulus uji kompetensi diperuntukkan bagi

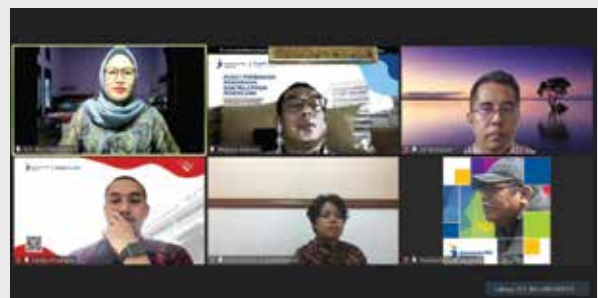
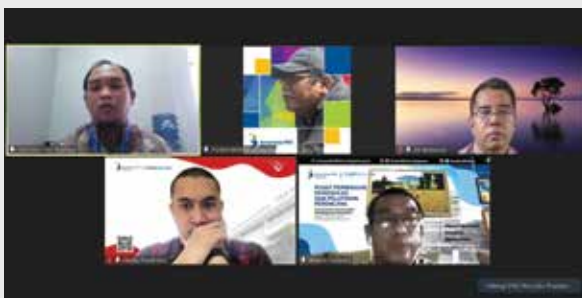
perencana yang akan naik jabatan ke satu jenjang lebih tinggi, yaitu ke Perencana Ahli Muda, ke Perencana Ahli Madya, dan ke Perencana Ahli Utama, serta bagi PNS yang akan diangkat menjadi perencana melalui jalur perpindahan jabatan dari jabatan lain.

Bedasarkan hal-hal tersebut di atas, pada tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas melalui Pusbindiklatren selaku Instansi Pembina JFP telah menyelenggarakan Uji Kompetensi JFP untuk Perencana Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.

TUJUAN

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan diselenggarakannya Uji Kompetensi JFP Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya ini adalah

- a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas JFP secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;
- b. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemimpinan yang baik;
- e. memenuhi kompetensi minimal bagi para calon pemangku JFP Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya;



Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Wawancara secara daring

- f. meningkatkan wawasan, pengetahuan dan perilaku kepada perencana untuk mendukung tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan;
- g. sarana untuk melaksanakan uji kompetensi kepada perencana yang akan masuk dalam JFP atau ingin memasuki ke jenjang yang lebih tinggi dalam JFP.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Uji Kompetensi JFP Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya adalah

- a. Seleksi calon peserta uji kompetensi untuk dapat diikutsertakan dalam kegiatan Uji Kompetensi JFP;
- b. Penyelenggaraan Uji Kompetensi JFP untuk jenjang ahli pertama, ahli muda dan ahli madya;
- c. Khusus untuk Uji Kompetensi JFP Ahli Madya, selain uji kompetensi juga dilakukan wawancara oleh

Instansi Pembina Perencana (Pusbindiklatren);

SASARAN PESERTA

Sasaran peserta Uji Kompetensi JFP Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya adalah

- a. Staf Perencana/Calon Pejabat Fungsional Perencana yang akan memasuki JFP yang bekerja di Instansi Perencanaan, baik di pusat maupun di daerah;
- b. Pejabat Fungsional Perencana yang akan memangku jabatan ke

TABEL 1. TABULASI DATA PESERTA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA TAHUN 2021

NO.	UJI KOMPETENSI	PELAKSANAAN			PELAKSANAAN
		PESERTA			
		Panggil	Hadir	Tidak Hadir	
1.	Gelombang I	316	310	6	19-20 Juni 2021
	Ahli Pertama	81	80	1	
	Ahli Muda	184	179	5	
	Ahli Madya	51	51	0	
2.	Gelombang II	175	137	38	28-29 Agustus 2021
	Ahli Pertama	33	21	12	
	Ahli Muda	111	92	19	
	Ahli Madya	31	24	7	
3	Gelombang III	570	505	65	23, 324, 30 dan 31 Oktober 2021
	Ahli Pertama	120	101	19	
	Ahli Muda	382	346	36	
	Ahli Madya	68	58	10	
4	Gelombang IV	259	200	59	20-21 November 2021
	Ahli Pertama	74	49	25	
	Ahli Muda	139	110	29	
	Ahli Madya	46	41	5	
	Jumlah Ahli Pertama	308	251	57	
	Jumlah Ahli Muda	816	727	89	
	Jumlah Ahli Madya	196	174	22	
	KESELURUHAN KEHADIRAN PESERTA	1320	1152	168	

jenjang yang lebih tinggi yang bekerja di instansi perencanaan, baik di pusat maupun di daerah.

PENYELENGGARA

Uji Kompetensi JFP Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama tahun 2021 diselenggarakan oleh Instansi Pembina JFP (Kementerian PPN/Bappenas melalui Pusbindiklatren). Selain itu, seleksi wawancara untuk Perencana Ahli Madya juga telah dilakukan oleh Tim Wawancara dari Pusbindiklatren.

HASIL UJI KOMPETENSI

Hasil pelaksanaan Uji Kompetensi JFP Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya dikeluarkan oleh Pusbindiklatren dan ditandatangani oleh Kepala Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas dalam format Pernyataan Kompeten dan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi.

TABULASI DATA KEHADIRAN PESERTA UJI KOMPETENSI

Tabulasi pelaksanaan Uji Kompetensi JFP Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1 di atas.

Semoga dengan diadakannya uji kompetensi jabatan fungsional perencana pada tahun 2021 ini, semakin mendukung Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas dalam upaya pembinaan dan peningkatan kompetensi para Aparatur Sipil Negara (ASN) Perencana, baik pusat maupun daerah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan ASN yang mempunyai wawasan dan kemampuan di bidang perencanaan. **(Penulis: Rita Miranda/Pusbindiklatren)** ■



KLINIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PERENCANA

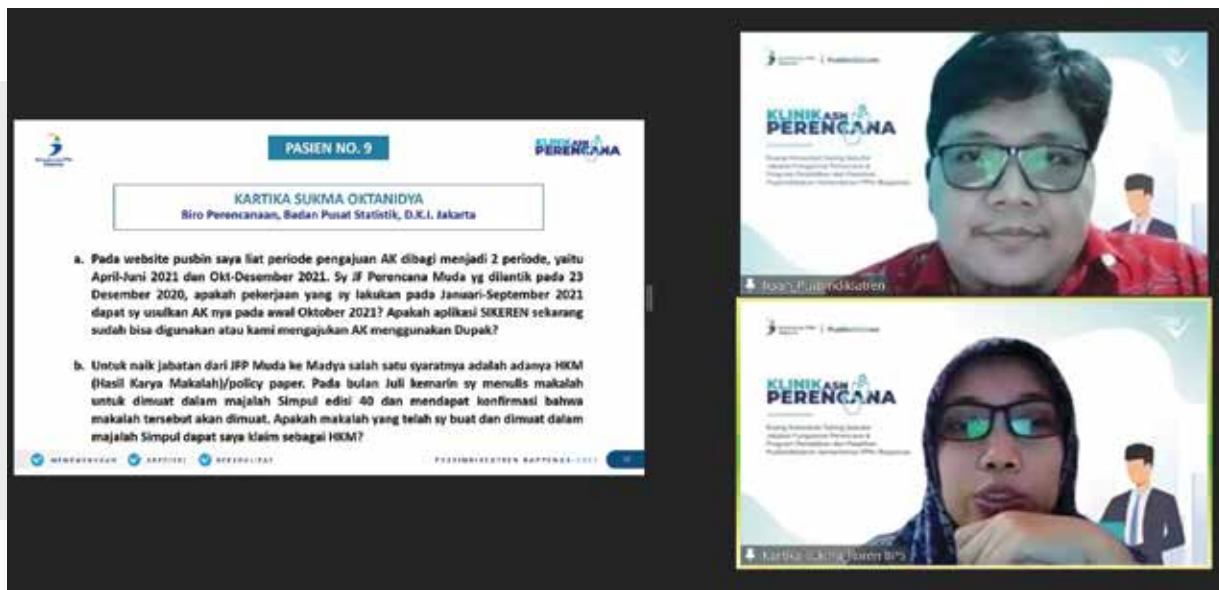
DARI, OLEH, DAN UNTUK PERENCANA

Klinik ASN Perencana adalah sarana bagi para ASN Perencana di instansi pusat dan daerah untuk berkonsultasi mengenai Jabatan Fungsional Perencana, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perencana yang menjadi tugas dan fungsi Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) merupakan salah satu unit kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan program pendidikan dan pelatihan serta institusi perencana di pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusbindiklatren telah melakukan berbagai kegiatan. Bentuk kegiatan

tersebut di antaranya penyiapan berbagai ketentuan tentang kurikulum diklat, uji kompetensi, penyelenggaraan diklat, organisasi tim penilaian, *workshop* penilaian angka kredit, tunjangan untuk JFP, sosialisasi di berbagai instansi pusat dan daerah, serta fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan JFP. Salah satu kegiatan fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan JFP yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren, yaitu melalui kegiatan Klinik ASN Perencana secara daring (*online*).

Klinik ASN Perencana memfasilitasi konsultasi bagi para Aparatur Sipil Negera (ASN) Perencana di



Pelaksanaan Klinik ASN Perencana secara daring

instansi pusat dan daerah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif atas permasalahan yang dihadapi oleh Pejabat Fungsional Perencana dan ASN Perencana. Adapun ruang lingkup permasalahan yang dapat dikonsultasikan melalui Klinik ASN Perencana adalah mengenai Jabatan Fungsional Perencana serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.

Klinik ASN Perencana dilaksanakan pada setiap Jumat terakhir setiap bulan. Kegiatan dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Klinik ASN Perencana dapat diikuti dengan bergabung melalui aplikasi Zoom. Dalam setiap pelaksanaannya akan dipilih maksimal 10 pertanyaan untuk dibahas.

Untuk mengikuti Klinik ASN Perencana ini, calon peserta terlebih dahulu mengakses tautan

bit.ly/qna-kliper dan mengajukan pertanyaan. Sebelum mengajukan pertanyaan, calon peserta dapat melihat daftar pertanyaan dan jawaban (QnA) atas pelaksanaan Klinik ASN Perencana sebelumnya. Setelah memastikan pertanyaannya belum pernah dibahas, maka calon peserta dapat mengakses bit.ly/klinik-perencana guna melakukan pendaftaran. Setelah itu, calon peserta menekan tombol daftar yang tertera pada bagian bawah laman tersebut, untuk mengisi beberapa data, termasuk pertanyaan yang akan ditanyakan.

Setelah pertanyaan-pertanyaan diajukan, Pusbindiklatren akan menyeleksi 10 peserta terpilih untuk dibahas pertanyaannya. Pusbindiklatren akan memberikan undangan melalui *e-mail* kepada para peserta terpilih. Selanjutnya, pada hari pembahasan, peserta dapat mengonsultasikan pertanyaan yang sudah terpilih tersebut dan didiskusikan secara bergantian dengan tim dari Pusbindiklatren.

Klinik ASN Perencana telah diselenggarakan sejak bulan November tahun 2020 hingga sekarang. Awalnya kegiatan ini direncanakan untuk bisa dilaksanakan dua kali dalam sebulan. Namun, melihat kondisi pandemi Covid-19 dan masih belum banyaknya calon peserta yang mengajukan pertanyaan maka per Februari 2021, Klinik ASN Perencana dilaksanakan hanya satu kali dalam setiap bulannya.

Dalam pelaksanaannya, Klinik ASN Perencana menampung pertanyaan dan permasalahan seputar JFP dari para perencana, baik di pusat maupun daerah. Pertanyaan dari perencana mendapat jawaban dari perencana (di Pusbindiklatren) dan hasil konsultasi akan memberikan pemahaman dan informasi penting sekaligus pengetahuan untuk perencana. Semangat para perencana pembangunan!
(Penulis: Eko Slamet Suratman/ Pusbindiklatren) ■



OBROLAN DJUMAT PAGI (ODP)

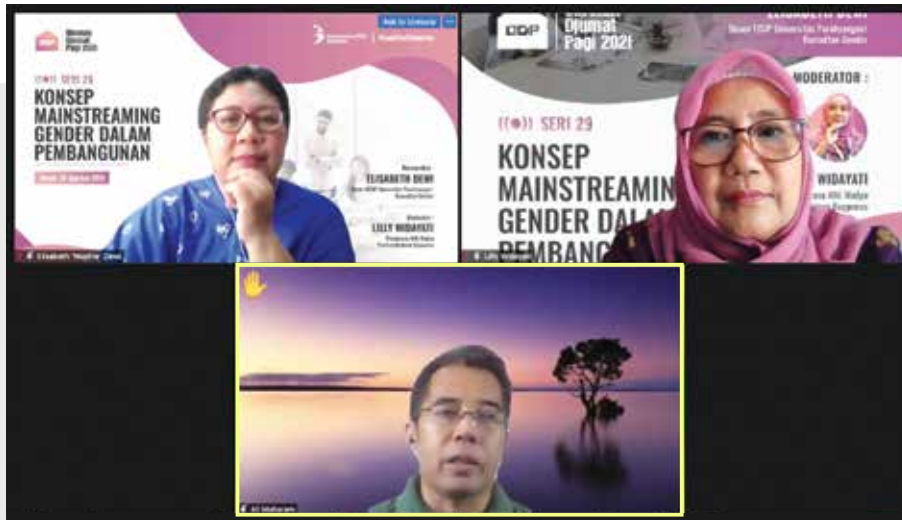
MENUMBUHKAN, MENYATUKAN, MENGUATKAN

Obrolan Jumat Pagi (ODP) merupakan forum Jumat Pagi Pusbindiklatren yang membahas tentang isu, tema, informasi, dan hal-hal terkini di kalangan internal Pusbindiklatren.

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) merupakan salah satu unit kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan program pendidikan dan pelatihan serta institusi perencana di pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusbindiklatren

menerapkan nilai-nilai organisasi, yaitu menumbuhkan, kredibel, dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada para perencana. Menumbuhkan berarti Pusbindiklatren tidak pernah berhenti untuk menumbuhkan kapasitas instansi perencanaan pembangunan di pusat dan daerah, baik dari sisi organisasi, struktur organisasi maupun sumber daya manusianya. Kredibel berarti Pusbindiklatren dapat diandalkan dan dapat dipercaya oleh seluruh instansi perencanaan pembangunan yang dibinanya. Berkualitas berarti setiap pelaksanaan tugas oleh pegawai Pusbindiklatren



Sesi Tanya-Jawab pada kegiatan Obrolan Djumat Pagi (ODP)

harus berorientasi pada kualitas/ mutu, bukan sekedar kuantitas/ jumlah. Kualitas diperoleh melalui ketelitian, kecermatan, dan presisi dalam setiap prosedurnya. Di tengah pandemi Covid-19, serta untuk tetap konsisten, komitmen dan senantiasa menjaga serta meningkatkan pemahaman nilai-nilai organisasi dan meningkatkan pengetahuan bagi para staf perencana di Pusbindiklatren maka Pusbindiklatren berinisiatif menyelenggarakan semacam diskusi santai tapi serius berupa Obrolan Djumat Pagi atau dikenal dengan ODP.

Obrolan Djumat Pagi (ODP) merupakan forum internal Pusbindiklatren setiap Jumat pagi yang membahas isu, tema, dan informasi, serta hal-hal yang cukup menarik dan dirasa mendesak untuk dibicarakan oleh kalangan internal Pusbindiklatren. ODP adalah forum bincang-bincang yang diinisiasi oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Pusbindiklatren untuk memfasilitasi seluruh staf Pusbindiklatren ataupun menghadirkan para pakar di bidangnya (pihak luar Pusbindiklatren) untuk menyampaikan pengalaman dan gagasannya (*knowledge sharing*). Gagasan yang disampaikan tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Pusbindiklatren pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, tetapi lebih memberikan nuansa baru dalam menggali informasi dan pengetahuan di luar tugas dan fungsi Pusbindiklatren. Hal ini bertujuan untuk menggali pengalaman sebagai pembelajaran dengan mendapatkan berbagai pokok bahasan dari berbagai pemangku kepentingan baik secara internal maupun eksternal Pusbindiklatren.

ODP dilaksanakan pada setiap hari Jumat selama pada hari tersebut tidak termasuk dalam kategori hari libur nasional. Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 10.30 WIB. ODP dapat

diikuti secara daring dengan bergabung melalui aplikasi Zoom Meeting. Dalam pelaksanaannya, narasumber yang dihadirkan tidak hanya dari internal Pusbindiklatren, tetapi bisa juga dari unit kerja lain dalam Kementerian PPN/Bappenas, atau bahkan dari instansi di luar Kementerian PPN/Bappenas.

ODP telah diselenggarakan mulai tahun 2021. ODP menumbuhkan internal Pusbindiklatren melalui pengetahuan, pengalaman, dan gagasan yang dibagikan. ODP semakin menyatukan internal Pusbindiklatren melalui interaksi komunikatif dan kooperatif antar staf internal yang dilakukan dalam kegiatan ODP. Diharapkan dengan adanya kegiatan ODP ini dapat memberikan nilai positif dalam pelaksanaan tugas unit kerjanya dan secara individual dapat memberikan nilai tambah serta menjalin erat sesama staf Pusbindiklatren sehingga tercipta *team work* yang lebih baik. **(Penulis: Eko Slamet Suratman/Pusbindiklatren)** ■

VOL. 2 NO. 3 DECEMBER 2021



6 RESEARCH PAPERS

1 COMMENTARY

1 BOOK REVIEW

PUBLISHED

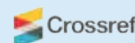


Download Online Version on:



journal.pusb̄indiklatren.bappenas.go.id

JISDeP is indexed by



Adri Roseno

Alumni peserta diklat Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan Tahun 2020 yang diselenggarakan Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas; saat ini menjabat Fungsional Perencana Pertama Dinas ESDM Provinsi Riau



PENGALAMAN MENGIKUTI PELATIHAN PADA MASA PANDEMI

Saya mendaftar Pelatihan Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan pada awal tahun 2020. Saat itu belum diberitakan ada kasus pandemi Covid-19 di Indonesia. Pada saat itu, saya baru saja selesai mengikuti *workshop* tentang *climate budget tagging* yang diadakan Kementerian Keuangan sehingga saya rasa cocok untuk mendalami mengenai perencanaan berbasis lingkungan dengan mendaftar diklat yang diadakan oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.

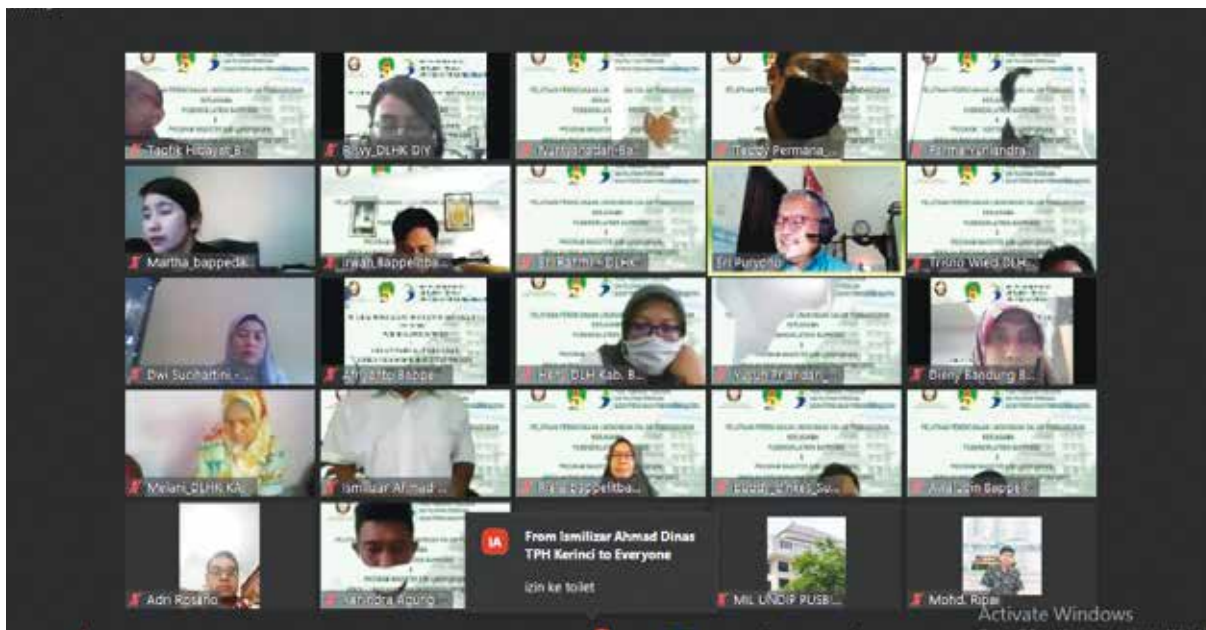
Bulan berlalu, Indonesia pun mulai dilanda pandemi Covid-19. Tiba-tiba seluruh kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang diadakan secara daring (*online*). Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah memaksa disrupti cara masyarakat hidup termasuk cara pembelajaran. Diklat yang biasanya dilakukan dengan berkumpul di suatu tempat dan dilakukan tatap muka, mau tak mau harus dilakukan secara daring di tempat masing-masing.

Pada akhir September 2020, saya menerima surat panggilan dari Pusbindiklatren untuk mengikuti Pelatihan Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan. Saya membaca di surat pemanggilan bahwa pelatihan dilaksanakan oleh Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro (MIL Undip) dan tentu saja dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoo, mulai 5 Oktober 2020 hingga 16 Oktober

2020. Antara senang dan bingung karena ini merupakan pelatihan pertama saya yang dilakukan secara daring. Segera saya mengurus surat-surat yang diperlukan sebagai syarat kelengkapan administrasi dan mengunggah ke aplikasi Sipena.

Pelatihan diikuti oleh 25 orang PNS yang berasal dari kabupaten/kota di Gorontalo, Jawa Timur, Jawa Barat, Jambi, daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan provinsi saya sendiri, Riau. Secara garis besar, diklat ini mengajarkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan yang antara lain menjelaskan hal-hal berikut.

1) **Green Economy.** Topik ini mengajarkan tentang bagaimana pembangunan yang selain memberikan dampak positif, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan hidup, juga memberikan dampak negatif, yaitu pencemaran lingkungan, pemanasan global,



kesenjangan sosial, serta berkurangnya sumber daya alam. Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan yang bukan hanya memenuhi kebutuhan generasi saat ini, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Cara yang dilakukan adalah dengan pembangunan berkelanjutan yang memadukan tiga pilar utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial yang juga tertuang dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pelaku pembangunan saat ini harus memiliki *mindset* proaktif melalui suatu *grand design* pembangunan berbasis lingkungan yang di dalamnya terintegrasi manajemen pencegahan, produksi bersih, dan *eco efficiency*.

- 2) **Energi Baru Terbarukan dan Efisiensi Energi.** Hampir seluruh energi baru terbarukan ada di Indonesia dengan jumlah

yang cukup. Tantangannya, infrastruktur bauran energi saat ini masih tergolong cukup mahal dan mensyaratkan penguasaan teknologi tinggi. Di samping itu, komitmen pemerintah dalam pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) hingga 23 persen pada tahun 2025 yang sudah di depan mata perlu dikejar lebih cepat lagi dengan terobosan-terobosan baru.

Di samping pemanfaatan energi yang bersumber dari energi yang ramah lingkungan, manajemen energi juga tidak kalah pentingnya. Pemanfaatan energi yang efisien juga memberikan kontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca dan kelangsungan sumber energi yang saat ini masih didominasi energi fosil.

- 3) **Pemodelan Lingkungan.** Topik yang satu ini merupakan topik favorit bagi saya sebagai seorang yang memiliki latar belakang

pendidikan di bidang teknik. Pemodelan lingkungan bisa memprediksi yang akan terjadi apabila lingkungan tercemar, terdegradasi, atau menurunnya fungsi jasa berdasarkan waktu. Dengan data yang cukup dan akurat, pemodelan khususnya berbasis spasial memberikan gambaran yang komprehensif mengenai lokasi dan waktu serta luasan dampak yang ditimbulkan apabila terjadi bencana lingkungan.

Seluruh pengajar dari MIL Undip merupakan profesional di bidangnya dengan pengalaman dalam keterlibatan perencanaan pembangunan berbasis lingkungan yang sudah teruji. Selama pengajaran yang dimulai pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB cukup memberikan tantangan tersendiri. Ketakutan akan jaringan internet yang bisa tiba-tiba hilang/tidak stabil atau bahkan mati listrik yang diakibatkan hujan lebat sehingga



tepatus dari Zoom kerap dirasakan teman-teman bahkan terkadang pengajar. Kelelahan duduk dan menatap layar laptop selama kurang lebih 8 jam non-stop selama 11 hari pasti dirasakan. Belum lagi pekerjaan kantor yang masih saja diberikan. Tentu saja hal ini harus disiasati seperti misalnya menyediakan cemilan serta kopi yang selalu tersedia agar tidak merasa bosan dan tetap fit bahkan jika terpaksa mengikuti pelatihan dari halaman rumah untuk mengubah *mood*.

Pada saat diskusi kelompok, *breakout room* dilakukan menjadi lima kelompok sehingga kami bisa saling berdiskusi yang kemudian dilakukan pemaparan tiap-tiap kelompok untuk dinilai. Presensi, kuesioner umpan balik (*feedback*), dan tugas-tugas dari masing-masing pengajar dikumpulkan melalui aplikasi Sipena. Bahkan *pre-test* dan *post-test* juga dilakukan melalui aplikasi ini.

Field Trip (kunjungan lapangan) pun dilakukan secara daring

dengan mengambil lokasi di dua tempat. *Field trip* pertama adalah pengelolaan TPA Jatibaring di Kota Semarang, sedangkan *field trip* kedua dengan contoh penerapan desa sadar lingkungan. Kami diajak berkeliling, secara virtual tentu saja, melihat pemanfaatan kotoran sapi sebagai sumber biogas sehingga dapat dimanfaatkan sehari-hari.

Walaupun masih terdapat beberapa keterbatasan, baik dari peserta maupun panitia, secara keseluruhan pelatihan ini dapat berjalan dengan sangat baik dan pembelajaran dapat diterima tiap-tiap peserta. Sudah selayaknya dan menjadi kepedulian peserta untuk menerapkan ilmu, pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang diperoleh dari pelatihan pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kompetensi yang menjadi target pelatihan. Ketika target kompetensi pelatihan dirumuskan dengan jelas, disiapkan dengan baik, secara konten maupun teknis, dan diberikan secara profesional oleh pengajar,

serta dijalani oleh pesertanya dengan penuh komitmen maka sudah selayaknya jika dikatakan pelatihan ini memiliki nilai-nilai positif. Saya mengucapkan terimakasih kepada MIL Undip dan Pusbindiklatren yang telah menyelenggarakan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya.

Akhirnya pada Jumat 16 Oktober 2020, pelatihan ini pun ditutup dengan sepatah dua patah kata dari panitia dan perwakilan peserta serta disertai pengumuman tiga pemuncak. *Alhamdulillah* saya menjadi pemuncak kedua pada pelatihan kali ini. Selesai acara, peserta diberi kesempatan untuk mengobrol ringan melalui aplikasi Zoom. Tidak ada sisa cerita tentang Soto Ayam Mbak Lin yang anaknya melegenda, atau foto-foto di Lawang Sewu dengan berbagai pose entah itu mengepalu atau melompat dengan senyum yang sangat lebar. Yang tersisa hanya foto *screenshot* ukuran petak-petak dengan latar belakang *virtual banner* pelatihan. ■

Nenden Suwardini

FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MADYA
BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT



PERENCANA PILIHAN KARIERKU

Saya adalah seorang ibu dari dua putri, kelahiran 11 April 1973. Saya lulusan S-1 Ekonomi Manajemen Universitas Padjadjaran dan S-1 Teknik Manajemen Industri Universitas Pasundan.

Pada saat awal CPNS, yaitu tahun 1999, dengan golongan III/a, saya ditempatkan di Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Bandung. Pada tahun 2003, saya mencoba mengikuti seleksi S-2 Program Beasiswa Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas dan *alhamdulillah* lolos. Selama kurun waktu 2003–2005 saya menempuh S-2 di Jurusan Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung (ITB). Sekembalinya dari sekolah S-2, saya disarankan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung untuk pindah ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

dengan pertimbangan ilmunya akan lebih banyak teraplikasikan di sana sehingga pada tahun 2006 saya pindah ke Bappeda Kota Bandung. Pada tahun 2007, saya berkesempatan untuk mengikuti Pelatihan Fungsional Perencana Muda bertempat di ITB dan Universitas Padjadjaran (Unpad). Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas, Bappeda Jawa barat, ITB, dan Unpad.

Pilihan untuk menduduki jabatan Fungsional Perencana (JFP) pada masa itu bukan merupakan suatu hal yang lazim karena masih baru di daerah. Pada saat itu, proses pengurusan untuk menjadi JFP ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berjalan cukup panjang dan berliku. Saya mencoba berdiskusi dengan BKD terkait ketentuan pengangkatan seorang JFP sampai akhirnya saya diangkat menjadi JFP Muda pada tahun 2008 dan pada saat itu masih menjadi satu-satunya JFP di Kota Bandung.

Mengingat semuanya masih serba baru, selama dua tahun pertama menjadi JFP, saya belajar berbagai hal termasuk bagaimana mengintegrasikan penugasan sehari-hari agar dapat diklaim dan diajukan menjadi angka kredit. Saat itu pedoman yang digunakan adalah Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya. Penjelasan di dalam peraturan sering kali diinterpretasikan berbeda antara pengusul dan tim penilai sehingga perolehan nilai sering kali kurang sesuai harapan. Minimnya forum diskusi sebagai tempat bertanya juga menjadi tantangan tersendiri. Dengan berbagai kendala yang dihadapi tersebut, saya mencoba terus belajar, mencermati, bereksplorasi, dan berdiskusi dengan berbagai pihak yang berkompeten agar penyusunan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dapat disetujui lebih besar oleh tim penilai.

Saya banyak belajar juga dari persoalan yang dihadapi teman-teman sesama JFP. Tidak dapat dimungkiri bahwa penyusunan angka kredit merupakan hal yang masih menjadi kendala bagi sebagian besar JFP, mengingat tugas yang diberikan setiap harinya sangat padat sehingga membutuhkan ketekunan bagi JFP untuk segera mengumpulkan bukti-bukti fisik sebagai dokumen pendukung. Apabila hal tersebut tidak segera dilakukan maka bukti fisik akan tertumpuk dengan surat-surat lain sehingga JFP cukup kebingungan dalam mengidentifikasi waktu dan tempat kejadian penugasan.

Fenomena tersebut membuat saya mencoba membantu teman-teman berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki untuk berbagi, terus belajar dan memotivasi, baik melalui forum konsultasi secara formal maupun informal. Pengalaman saya menjadi tim penilai adalah menemukan kesalahan-kesalahan yang sering

ditemui dalam pengajuan DUPAK. Kesalahan ini kemudian dicatat dan disampaikan kepada pengusul serta menjadi studi kasus yang dibagikan kepada teman-teman agar kesalahan yang sama tidak berulang.

Pada tahun 2010, saya pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan ditempatkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Saya melanjutkan kefungsionalan saya pada tahun 2011. Pada tahun 2013, saya mencoba mengikuti Pelatihan Fungsional Perencana Madya di MAP UGM dan berhasil lulus dengan predikat terbaik. Pada tahun 2014, *alhamdulillah* saya memperoleh kenaikan jabatan dari Fungsional Perencana Muda menjadi Fungsional Perencana Madya.

Proses penyusunan angka kredit memang tidak mudah, tetapi bukan sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan dan diraih. Dalam kurun waktu 2012–2016, saya naik pangkat sebanyak dua kali berturut-turut atau

dengan kata lain dapat naik pangkat dalam jangka waktu dua tahun sekali, yaitu pada saat naik golongan dari III/d (TMT 1 April 2012) ke golongan IV/a (TMT 2 April 2014) dan dari golongan IV/a (TMT 2 April 2014) ke golongan IV/b (TMT 3 Oktober 2016).

Keberadaan JFP sangat ditentukan pula oleh formasi sehingga pada saat Kepgub Nomor 821.29/Kep.680-BKD/2019 tanggal 26 Agustus 2019 turun, dimana JFP Madya sudah tidak ada formasinya di DP3AKB, saya kemudian ditarik oleh BKD untuk ditempatkan di Bappeda Jabar.

Pengalaman saya menjadi JFP di awal golongan saya III/c sampai sekarang ini pada saat mencapai IV/c sangat berharga. Sekalipun saya ditempatkan di berbagai dinas/badan yang keilmuannya seperti yang tidak terlalu paralel, tetapi justru menambah penguasaan wawasan dan pengalaman. Kegiatan perencanaan di antaranya terkait dengan keterlibatan saya sebagai salah satu anggota tim dalam penyusunan



Employee of The Month pada kategori Jabatan Fungsional untuk bulan November 2020, Agustus 2021, dan November 2021



Konsultasi DUPAK untuk Bapelitbangda
(Kota Bandung, 28 November 2019)



Konsultasi DUPAK untuk BPPPPD
(Kota Cirebon, 26—27 Februari 2020)



Menjadi koordinator dewan juri dan mengumumkan pemenang
Lomba Karya Tulis/Esai 2021 (8 November 2021)



Pengukuhan Pengurus PPPI Komisariat Jawa Barat
(30 Juli 2020)



Moderator pada kegiatan Forum Perangkat Daerah DP3AKB
Provinsi Jawa Barat (20—22 Maret 2019)



Narasumber pada Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana
Kerja (Renja) di DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi (21 Februari 2019)





Bersama Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat,
Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si., QCRO



Bersama Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Barat,
Dr. Iendra Sofyan, S.T., M.Si.



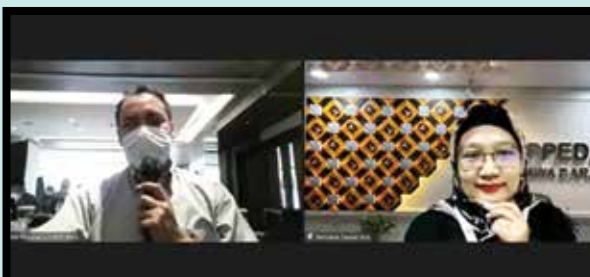
Menjadi pembahas dalam *workshop* dari BRIN bertemakan "Penguatan Ekosistem Ekonomi Digital UKM Indonesia" (19 Agustus 2021)



Moderator IHT bertemakan "Dokumen Unsur Perencanaan Pembangunan sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2020" (3 Desember 2021)



Narasumber pada Pembahasan bersama Kementerian Perekonomian tentang Sektor UMKM dan Koperasi di Pemrov Jabar (19 November 2021)



Narasumber pada Pembahasan Penilaian Angka Kredit (PAK) Perencana Tahun 2021 di lingkup Pusbindiklatren Bappenas (11 November 2021)



Buku berjudul *Inovasi dan Kolaborasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah* yang di-launching 19 November 2020



Pembahasan Juknis PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2020 bersama rekan-rekan Bappeda Jabar (21 Desember 2021)

dokumen perencanaan seperti RPJMD Perubahan 2018–2023 dan RKPD 2023.

Pada unsur kegiatan pengembangan profesi, saya pernah menang dalam Lomba Penyusunan *Call on Paper* bertemakan “UU ASN dan Prospek Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Meningkatkan Efektivitas Pemerintah Baru 2015–2019” yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas (2014). Saya juga pernah mendapat kesempatan menjadi anggota tim penyusun buku di Bappeda Jawa Barat berjudul *Inovasi dan Kolaborasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Saya pernah menyusun makalah dan berpartisipasi dalam Lomba PNS Berprestasi serta menulis artikel ilmiah berjudul *Menguatkan Profesionalisme ASN Jawa Barat* dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-50 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

Selain menyusun tulisan, penugasan untuk menjadi narasumber telah menuntut saya untuk terus mempelajari hal yang baru. Saya perlu berkoordinasi dengan atasan terkait koridor materi yang harus disampaikan. Saya juga harus berkoordinasi dengan panitia terkait konfirmasi waktu pelaksanaan, durasi penyampaian materi serta audiens yang dihadapi agar pesan dari materi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan jelas sesuai kebutuhan.

Saat ditugaskan menjadi moderator, *soft skill* terus senantiasa dituntut agar dapat memediasi antara narasumber dengan peserta serta memandu acara diskusi agar berlangsung lancar dan tidak

membosankan. Saya mendapat kesempatan untuk menjadi moderator di berbagai kegiatan termasuk *In House Training* (IHT) yang diselenggarakan oleh Bappeda Jawa Barat. Sampai saat ini, Bappeda Jawa Barat telah rutin menyelenggarakan IHT setiap hari Jumat dan per tanggal 3 Desember 2021 telah mencapai Volume ke-77. Penyelenggaraan IHT mendapat respons dan animo yang cukup tinggi dari para peserta baik JFP maupun non-JFP, yang berasal dari Sumatra sampai Papua, dari perangkat daerah sampai kementerian/lembaga. Forum IHT ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan bagi para JFP se-Indonesia, menguatkan silaturahmi sekaligus melatih para JFP Bappeda Jawa Barat untuk tampil meningkatkan kemampuan komunikasinya di depan publik.

Dari sisi pengalaman berorganisasi, pada saat ini, saya aktif menjadi Sekretaris Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) Komisariat Jawa Barat dimana kepengurusannya dilantik pada tanggal 30 Juli 2020. Saya juga mendapat kepercayaan menjadi koordinator dewan juri saat Lomba Karya Tulis (Esai) 2021 yang merupakan hasil kerja sama antara PPPI Komisariat Jawa Barat dengan Bappeda Jawa Barat.

Dari berbagai rangkaian kegiatan yang telah saya lakukan, *alhamdulillah* saya telah meraih beberapa penghargaan yaitu Juara Harapan II pada Lomba Pegawai Negeri Sipil Teladan Kategori Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013; *Employee of The Month* untuk bulan November 2020, Agustus 2021, dan

November 2021; serta penghargaan atas kedisiplinan dan konsistensi sebagai PNS Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Pada akhirnya, seorang JFP harus mampu menerjemahkan tugas yang diberikan. Selain itu, JFP harus inovatif menggali ide-ide sehingga tidak hanya menunggu tugas yang diberikan atasan dan adaptif dengan berbagai perubahan yang terjadi sekarang. Seorang JFP harus mampu berkolaborasi dan berkoordinasi baik dengan lingkungan kerja, atasan, maupun masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan dapat optimal. Saya masih terus banyak belajar dengan berbagai dinamika proses perencanaan yang ada.

Saya bangga dengan pilihan saya untuk menjadi seorang fungsional perencana. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bimbingan dari semua pihak, khususnya Pusbindiklatren, Bappeda Jawa Barat, keluarga, sahabat, dan lingkungan kerja; sehingga sudah sampai ke tahap ini. Perjuangan masih panjang, semoga cerita saya ini dapat sedikitnya menginspirasi bagi rekan-rekan sesama JFP, untuk tetap semangat berkarya dan berkontribusi semaksimal mungkin bagi lembaga dan negara. ■





Foto: quipper.com

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PAPUA

Universitas Papua (Unipa) didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2000, tanggal 3 November 2000 sebagai pengembangan dari Fakultas Pertanian Universitas Cenderawasih.

SEJARAH BERDIRINYA UNIVERSITAS PAPUA

Sejarah Unipa dapat dibagi dalam beberapa periode. Periode 1962–1982 adalah periode Unipa masih bernama Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan Universitas Cenderawasih (FPPK Uncen). Periode 1982–2000, Unipa mengalami perubahan nama dari FPPK Uncen menjadi Fakultas Pertanian Universitas Cenderawasih (FAPERTA Uncen). Periode 2000–sekarang adalah periode dimana Unipa berdiri secara resmi.

Periode 1962–1982

Pemerintah Indonesia mendirikan Universitas Cenderawasih (Uncen) di Kota Baru (Jayapura sekarang),

berdasarkan Keputusan bersama Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat/Menteri PTLP No. 140/PTLP Tahun 1962 pada tanggal 10 November 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri Cenderawasih di Hollandia (Jayapura) dan disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 389 tanggal 31 Desember 1962. Dua dari empat (Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan) dilebur menjadi Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan (FPPK UNCEN), berdasarkan Keputusan Menteri PTIP Nomor 77/PTIP/1964, tanggal 17 Juli 1964.

FPPK UNCEN berkedudukan di Manokwari karena Manokwari cocok untuk pengembangan pertanian

di samping telah ada Lembaga Penelitian dan Pendidikan Pertanian Manokwari (LP3M). Lembaga ini didirikan pada tahun 1961 oleh Pemerintah Belanda dengan nama Agrarische Proefstation Manokwari (APM), sebagai suatu lembaga penelitian pertanian di kawasan Pasifik. Berdasarkan Keputusan Gubernur Irian Jaya Nomor 60/GIJ/1978, tanggal 21 April 1978, LP3M diserahkan pengelolaannya kepada Universitas Cenderawasih dan diubah namanya menjadi Lembaga Penelitian Pertanian Universitas Cenderawasih (LPP Uncen). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-Pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri dan Surat Keputusan Rektor UNCEN Nomor 071/a/RUC/82, tanggal 18 Juli 1982, merupakan dasar seluruh aset LPP Uncen diserahkan ke FPPK Uncen.

Periode 1982–2000

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1982, tanggal 7 September 1982, FPPK berubah nama menjadi Fakultas Pertanian Universitas Cenderawasih (FAPERTA Uncen). Pada tahun yang sama (1982), terdapat beberapa tonggak sejarah penting dalam proses pendirian Unipa yang menghasilkan penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2000, tanggal 3 November 2000, tentang Pendirian Universitas Negeri Papua (Unipa).

SELAYANG PANDANG TENTANG PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PAPUA

Program Pascasarjana (PPs) Universitas Papua (Unipa) diresmikan pada tanggal 26 Maret 2010 oleh Wakil Menteri Pendidikan Nasional di Kampus Unipa Amban, Manokwari

dengan tiga program studi (prodi), yaitu Prodi S-2 Ilmu Pertanian, Prodi S-2 Peternakan, dan Prodi S-2 Ilmu Lingkungan. Penerimaan mahasiswa baru angkatan pertama pada ketiga program studi tersebut dilaksanakan pada tahun akademik 2010/2011. Prodi S-2 Ilmu Kehutanan, Prodi S-2 Sumber Daya Air (SDA), dan Prodi S-2 Ilmu Biologi dibuka pada tahun 2017. Sementara Prodi S-3 Ilmu Lingkungan pada tahun 2018. Jumlah lulusan prodi S-2 hingga tahun 2021 sebanyak 445 orang.

Kerja Sama Program Pascasarjana Unipa

Sejak berdiri tahun 2010, PPs Unipa telah menjalin kerja sama dengan beberapa Pemerintah Daerah di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Di samping itu, terdapat juga kerja sama dengan perguruan tinggi swasta dan sekolah menengah umum di Tanah Papua.

Program Pascasarjana Unipa bekerja sama dengan Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas

telah melaksanakan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PPD-RPJMD) berdasarkan Surat Keputusan PKSO 04/P.01/07/2021 dan No. 584/UN42.14/KS/2021. Kerja sama ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 sampai 2021. Pada tiga tahun pertama, pelatihan tersebut dilaksanakan secara *offline* (tatap muka langsung), sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 dilaksanakan secara *online* (daring) sebagai upaya pencegahan penularan Corona *Virus Disease* (COVID-19).

Pelatihan tersebut mendapatkan respons positif dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditandai dengan banyaknya jumlah pelamar. Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan PPD-RPJMD pada kurun waktu 2017–2021 sebanyak 127 orang yang berasal dari berbagai kabupaten dan satu Kotamadya di Papua Barat. Pada pelaksanaan *offline*, jumlah peserta tiap tahun konstan 25 orang (Tabel 1), tetapi meningkat menjadi 28 orang pada tahun 2021.

TABEL 1. JUMLAH PESERTA DIKLAT PPD-RPJMD TAHUN 2017–2021

TAHUN PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA
2017	25
2018	25
2019	25
2020	24
2021	28
TOTAL	127

Penggunaan Sipena

Aplikasi Sipena (Sistem Informasi dan Pembelajaran Elektronik Perencana) digunakan sejak tahun 2020 untuk menunjang pelaksanaan program pelatihan Pusbindiklatren. Namun, pemanfaatannya lebih dioptimalkan pada kegiatan tahun 2021. Sejak pendaftaran, semua calon peserta diklat mendaftar dan mengunggah berkas-berkas melalui Sipena. Materi diklat, presensi, *pre/post-test*, tugas dan jawaban peserta pelatihan di-*submit* melalui Sipena.

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap materi diklat sejak tahun 2017–2021 (skala 1–4) diperoleh nilai rata-rata 3,693 dengan interval 3,512–3,814. Nilai rata-rata tersebut mengindikasikan penilaian peserta tergolong baik terhadap aspek penilaian.

Penilaian peserta pelatihan terhadap instruktur/pemateri pelatihan berkisar 3,605–3,767 dengan nilai rata-rata 3,670 (kategori baik). Hal ini menunjukkan instruktur menguasai dengan baik materi yang disampaikan, materi diklat disampaikan dengan jelas, serta mampu menciptakan suasana kondusif, walaupun pemaparan dan interaksi dalam bentuk daring (Zoom). Dari aspek kebutuhan belajar peserta, instruktur dinilai mampu menjelaskan tugas dan manfaat tiap materi dengan baik sehingga dapat mempertahankan perhatian (fokus) dan ketertarikan peserta selama penyajian materi.

Evaluasi terhadap metode penyampaian materi pendidikan dan pelatihan (Gambar 6) dilakukan melalui beberapa indikator, yaitu

- a) metode yang digunakan dalam diklat sudah tepat;
- b) perbandingan antara penyajian materi, diskusi, dan pembahasan;
- c) metode penyajian sesuai dengan kebutuhan dan menciptakan suasana belajar dengan baik;
- d) penyajian materi, diksusi dan pembahasan disajikan secara sistematis dan dapat dimengerti;
- e) suasana dalam kegiatan dirasakan hidup dan menarik.

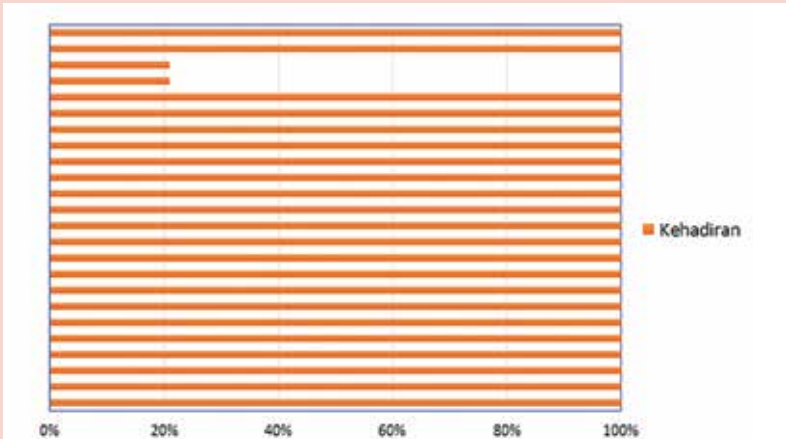
Penilaian peserta terhadap penyampaian materi diklat berada pada kisaran nilai 3,395–3,581 dengan rata-rata 3,502 (kategori baik). Hal ini mengindikasikan metode belajar dalam pelatihan sudah tepat; proporsi antara penyajian materi, diskusi, dan pembahasan sudah memadai serta

Gambar 1.

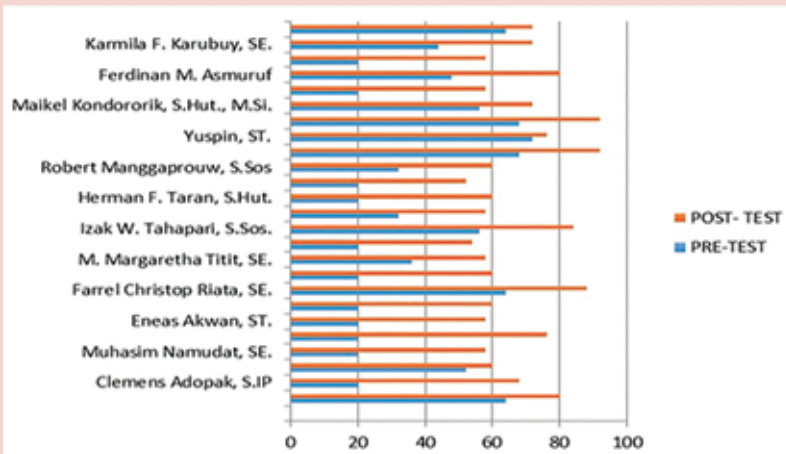
Gedung Program Pascasarjana Universitas Papua



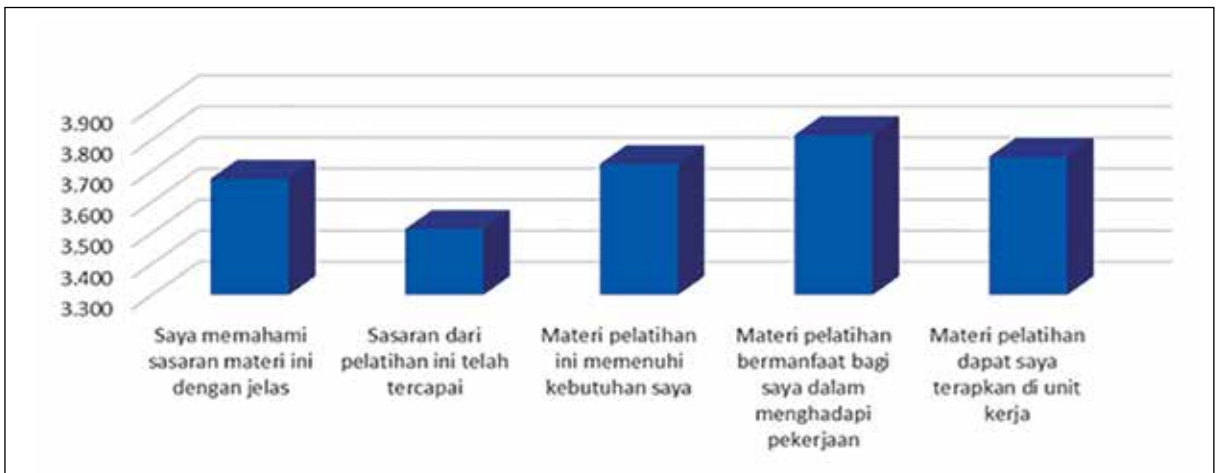
Foto: quipster.com



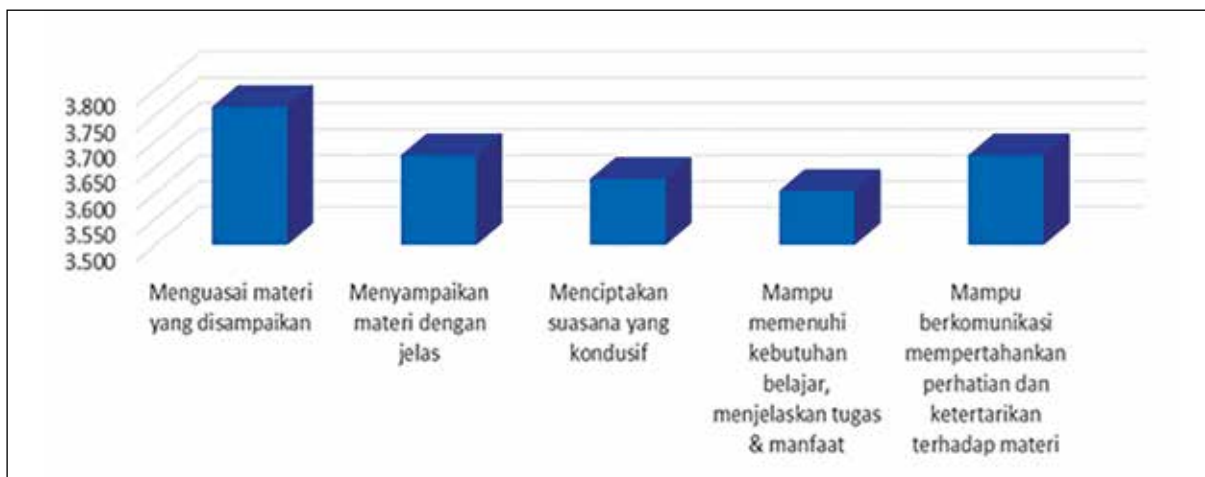
Gambar 2.
Persentase kehadiran peserta diklat



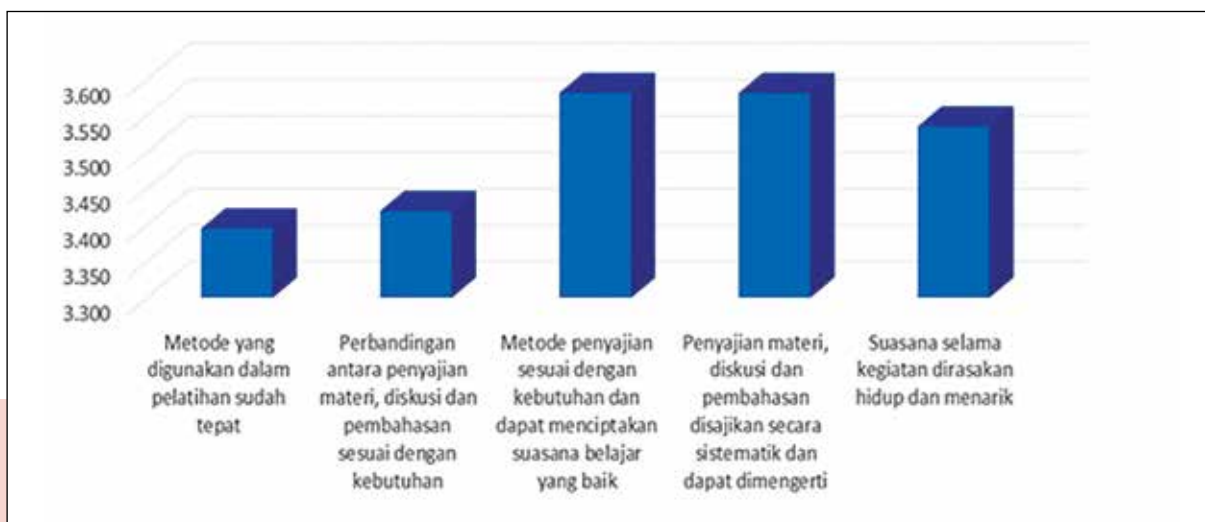
Gambar 3.
Perbandingan Nilai Pre-Test dan Post-Test



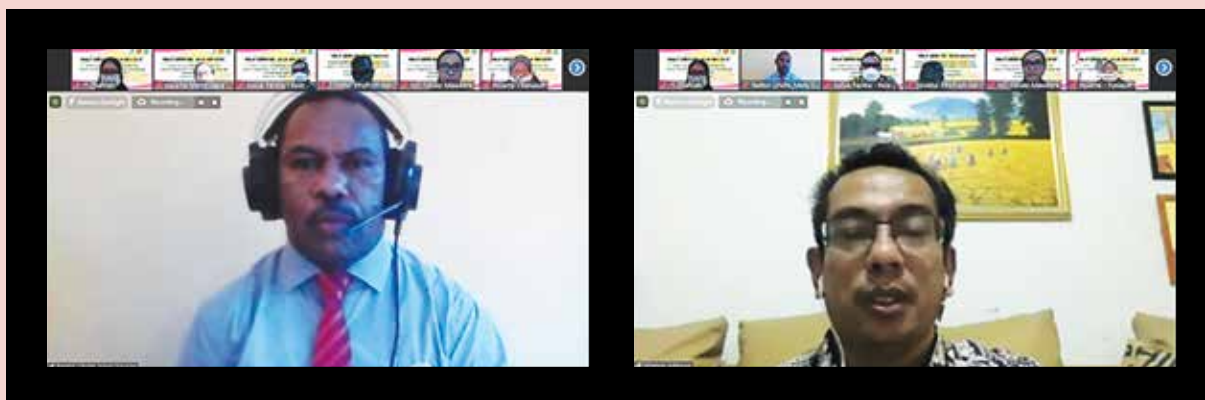
Gambar 4. Penilaian Peserta terhadap Materi Diklat



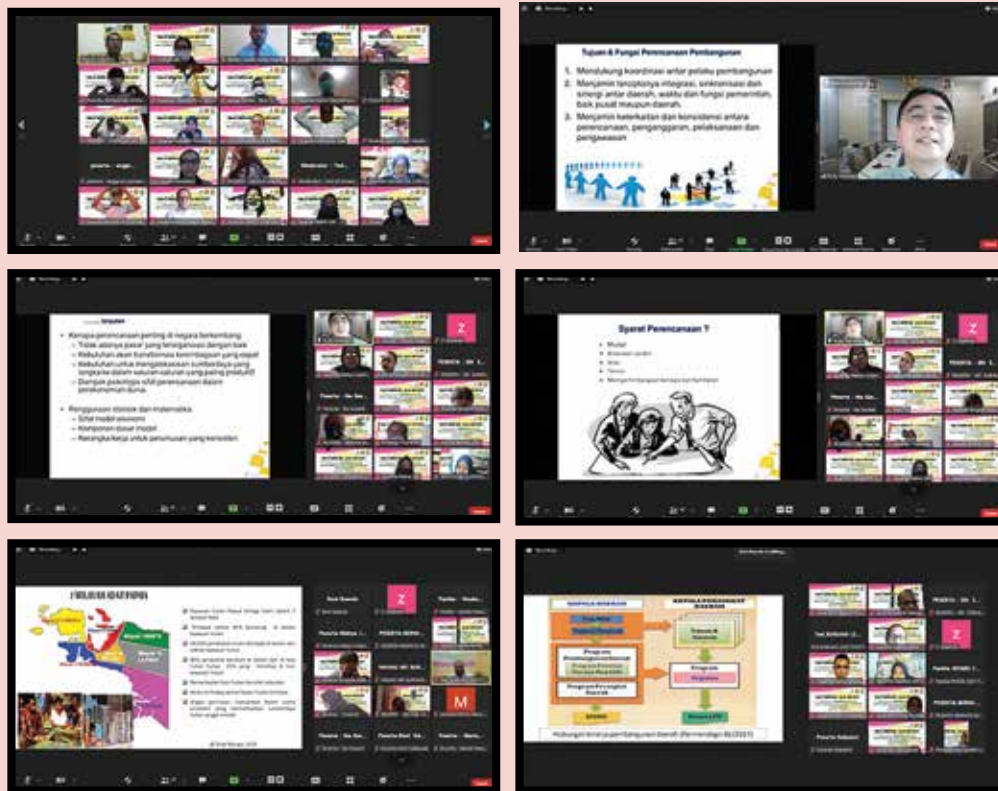
Gambar 5. Penilaian Peserta terhadap Pemateri



Gambar 6. Evaluasi Metode Penyampaian Materi



Gambar 7. Pembukaan Pelatihan PPD-RPJMD 2021 secara daring oleh Rektor Unipa dan Penyerahan Tanda Peserta oleh Ketua Pokja Renbang Pusbindiklatren



Gambar 8. Pelaksanaan Pelatihan PPD-RPJMD 2021 secara daring

metode penyajian sudah sesuai kebutuhan sehingga menciptakan suasana belajar yang baik. Peserta pelatihan juga menilai penyajian materi, diskusi, dan pembahasan disajikan sistematis sehingga mudah dimengerti dan suasana selama pelatihan dirasakan hidup dan menarik.

Pada pelaksanaan pelatihan daring, peserta tidak mengunjungi langsung lokasi/tempat tertentu (*benchmarking*), tetapi melalui studi kasus berdasarkan masalah pada daerah asal tiap peserta. Kondisi daring menyebabkan tidak semua peserta terlibat aktif

pada sesi ini walaupun sudah mendapat arahan dan umpan balik dari pemateri. Kondisi ini sangat berbeda dibandingkan dengan *benchmarking* sebelumnya (*offline*) yang dilaksanakan di PT. Medcopapua Hijau Selaras dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Papua Barat.

PENUTUP

Kerja sama Program Pascasarjana Universitas Papua dengan Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas selama kurun waktu lima tahun (2017–2021) mendapat respons positif dari ASN Papua

Barat dan telah diikuti 127 orang ASN. Keaktifan peserta pelatihan pada pelaksanaan diklat *offline* lebih baik dibandingkan saat daring (*online*). Para peserta menilai materi pelatihan dengan nilai rata-rata 3,693; pemateri pelatihan mendapat nilai rata-rata 3,670; sedangkan penyampaian materi pelatihan diberikan nilai 3,502. **(Penulis: Dr. Alce Ilona Noya, S.P., M.Si. - Program Pascasarjana Universitas Papua) ■**

Nenden Budiarti

BERHENTI BEKERJA DAN SUBJECTIVE WELL BEING

Analisis Penduduk
Usia 50 Tahun ke Atas
di Indonesia

**TESIS
PILIHAN**

KARYA ALUMNI
PENERIMA BEASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN
PUSBINDIKLATREN
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS

Foto: freepik.com

ABSTRAK

Berhenti bekerja berkaitan dengan perubahan kehidupan yang penting. Bagi sebagian besar individu yang telah berhenti bekerja, masa berhenti bekerja memberi mereka lebih banyak waktu untuk mencurahkan hobi atau olahraga. Di sisi lain, banyak di antara mereka merasa gelisah dan menderita depresi akibat situasi baru yang mereka hadapi. Sejumlah penelitian telah menemukan bahwa berhenti bekerja dapat memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap *subjective well-being*.

Penelitian ini mengungkapkan pengaruh berhenti bekerja terhadap *subjective well-being* individu berusia 50 tahun ke atas. Estimasi dilakukan terhadap variabel karakteristik demografi dan sosial ekonomi yang bersumber dari data IFLS5. Temuan hasil empiris mengenai pengaruh status bekerja terhadap *subjective well-being* yang dirasakan oleh individu usia 50 tahun ke atas menunjukkan indikasi kepuasan hidup yang semakin menurun, tetapi pengaruh status bekerja tersebut tidak signifikan.

LATAR BELAKANG

Berhenti bekerja merupakan pengunduran diri dari posisi atau pekerjaan seseorang. Sebagian besar memilih untuk berhenti bekerja ketika mereka memenuhi syarat untuk menerima tunjangan pensiun swasta atau publik, meskipun beberapa dipaksa untuk berhenti bekerja ketika kondisi tubuh tidak lagi memungkinkan untuk bekerja lebih lama, misalnya karena sakit atau kecelakaan, atau sebagai ketetapan undang-undang tentang posisi mereka dalam suatu pekerjaan. Para ekonom percaya bahwa keputusan seseorang untuk berhenti maupun terus bekerja, merupakan produk dari maksimalisasi utilitas yang dibatasi oleh sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Ada banyak faktor yang memengaruhi seseorang dalam memutuskan untuk berhenti bekerja. Gruber, Jonathan & Wise (1999) mengungkapkan bahwa faktor utama yang memengaruhi keberhasilan pengalaman pensiun seseorang adalah dana pensiun pendidikan. Selain itu, jaminan sosial memainkan peran penting, sebab sebagian besar individu mengandalkan jaminan sosial sebagai satu-satunya pilihan pensiun mereka. Berikutnya kekayaan yang lebih besar cenderung mengarah pada pensiun

dini, karena individu yang lebih kaya pada dasarnya dapat "membeli" waktu luang tambahan.

Beberapa negara saat ini, seperti di Austria telah menyajikan umur pensiun standar. Umur pensiun "standar" tersebut bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, tetapi umumnya antara 50 dan 70 tahun. Sebagian besar negara maju saat ini memiliki sistem pemberian tunjangan pensiun untuk hari tua, bisa disponsori oleh pengusaha atau negara. Namun, di banyak negara miskin dan berkembang, dukungan bagi penduduk lanjut usia sebagian besar diberikan oleh keluarga. Kondisi tersebut tentunya akan memengaruhi kesejahteraan individu yang telah berhenti bekerja/pensiun. Beberapa faktor yang berkaitan dengan keputusan seseorang untuk berhenti bekerja/pensiun juga akan memengaruhi kesejahteraan hidup individu yang bersangkutan.

Istilah kesejahteraan mencakup segala hal di mana individu mengalami dan mengevaluasi hidup mereka secara positif. Beberapa menyamakan kesejahteraan dengan kebahagiaan. Diener (1984) mengatakan bahwa kesejahteraan subjektif atau *subjective well-being* (SWB) merupakan istilah umum yang digunakan

untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dialami individu berdasarkan evaluasi subjektif hidup mereka secara keseluruhan, baik positif maupun negatif. Adapun *subjective well-being* yang dikaji dalam penelitian ini digambarkan melalui tingkat kepuasan hidup. Pendekatan ini menekankan evaluasi seseorang terhadap kehidupan mereka, baik secara emosional maupun kognitif (Ryan & Deci, 2001). Menurut Ryan & Deci (2001), konsep kesejahteraan mengacu pada pengalaman dan fungsi psikologis yang optimal. Bukan hanya fokus pada pertanyaan antarpribadi sehari-hari (misalnya "Apa kabar?"), akan tetapi melibatkan penelitian ilmiah yang intens. Veenhoven (2015) mengatakan bahwa *life satisfaction* cenderung mengevaluasi kehidupan saat ini, sesuai dengan definisi dari *life satisfaction* itu sendiri, yaitu sejauh mana seseorang mengevaluasi kualitas keseluruhan kehidupannya saat ini sebagai keseluruhan secara positif. Dengan kata lain, seberapa besar seseorang menyukai kehidupan yang dilaluinya.

Penelitian mengenai pengaruh retirement terhadap *subjective well-being* (SWB) masih sangat terbatas. Studi empiris sebelumnya mengenai topik tersebut, dengan menggunakan

berbagai data dan pendekatan yang berbeda menghasilkan temuan yang cukup beragam, yaitu pengaruh positif maupun negatif. Temuan mengenai pengaruh *retirement* terhadap *subjective well-being* yang mengidentifikasi pengaruh yang positif diungkapkan oleh (Latif, 2011; Johnston & Lee, 2009; Charles, 2004; Gall et al., 1997; Baker et al., 2009).

Temuan berbeda mengenai pengaruh berhenti bekerja terhadap *subjective well-being* ditemukan dalam penelitian Bonsang dan Klein (2012), Abolhassani (2012), Horner (2012), Fonseca et al. (2014), Rider (2014), Kesavayuth, Rosenman, Zikos (2015), dan Klotz, Gollner, Gartner (2018), yaitu adanya pengaruh negatif dari berhenti bekerja terhadap *subjective well-being*. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh status bekerja individu usia 50 tahun ke atas terhadap kepuasan hidup yang mereka alami dan rasakan.

SUMBER DATA

Penelitian ini hanya terbatas pada data satu tahun saja yang bersumber dari Indonesian Family Life Survey (IFLS) tahun 2014. Data IFLS tersebut tersedia atas kerja sama RAND dan Survey Meter. IFLS merupakan data survei longitudinal yang dimulai pada tahun 1993. Data IFLS mewakili 83 persen populasi Indonesia yang tinggal di 13 provinsi dari 26 provinsi pada tahun 1993 yang meliputi pulau Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi.

Pemilihan IFLS sebagai sumber data dalam studi ini karena wawancara yang dilakukan didalamnya melibatkan berbagai topik penting bagi kehidupan individu paruh baya dan lebih tua di Indonesia, termasuk kesehatan, *subjective well-being*, rencana, dan pilihan pensiun, keadaan keluarga dan sosial, tingkat pendidikan dan pendapatan, kegiatan utama, rencana dan pengalaman

pensiun, pemberian atau penerimaan perawatan dan sebagainya. Selain itu, data IFLS memuat informasi yang mencoba melihat kondisi responden pada tahun sebelumnya, misalnya informasi mengenai status bekerja responden, apakah masih bekerja atau tidak.

Sampel yang digunakan dalam studi ini adalah seluruh individu umur 50 tahun ke atas, baik individu yang pernah bekerja sebelumnya, tetapi telah berhenti bekerja maupun individu yang bekerja pada saat pencacahan. Sampel tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang pengaruh status bekerja individu berumur 50 tahun ke atas terhadap *subjective well-being*, dilihat dari tingkat kepuasan hidup (*life satisfaction*). Adapun individu umur 50 tahun ke atas yang tidak pernah bekerja sebelumnya tidak termasuk sampel model ini. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 3.834 responden.

DISKUSI

Profil individu berusia 50 tahun ke atas, terkait karakteristik individu dan karakteristik lainnya mengungkapkan bahwa lebih dari 50 persen responden berumur 50 tahun ke atas adalah perempuan dengan usia rata-rata 61 tahun.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden berstatus menikah, yaitu sekitar 72 persen. Ada sekitar 58 persen responden berumur 50 tahun ke atas yang berstatus sebagai kepala rumah tangga dan rata-rata terdapat 3 orang dewasa yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut.

Merujuk data yang digunakan, ada sekitar 52 persen rumah tangga yang memiliki anak masih bersekolah dan menjadi tanggungan rumah tangga tersebut. Data juga menunjukkan sekitar 45 persen responden berumur

50 tahun ke atas dalam penelitian ini merupakan suku Jawa. Adapun responden berumur 50 tahun ke atas yang tinggal sendiri, tanpa anggota keluarga lainnya ada sekitar 9 persen.

Berdasarkan aspek religiusitas, diketahui bahwa individu berumur 50 tahun ke atas cenderung memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Di samping itu, mereka memiliki keterlibatan yang tinggi dalam kegiatan kemasyarakatan. Ada sekitar 82 persen yang menyatakan keikutsertaannya dalam kegiatan kemasyarakatan. Jika dilihat berdasarkan aspek pendidikan, individu berumur 50 tahun ke atas dalam studi ini rata-rata mengenyam bangku sekolah selama 6 tahun, atau setara sekolah dasar (SD).

Hasil estimasi yang dilakukan dengan menggunakan model ordered probit menampilkan nilai marginal effect guna memprediksi probabilitas hasil estimasi yang telah dilakukan. Namun, sayangnya nilai *marginal effect* yang diperoleh tidak dapat menampilkan perbedaan *life satisfaction* antara individu usia 50 tahun ke atas laki-laki dan perempuan, karena *Chow Test* yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Studi ini mempertimbangkan pengaruh berhenti bekerja atau variabel (*retirement*) terhadap *life satisfaction* individu berumur 50 tahun ke atas. Ada perbedaan pendapat mengenai pengaruh berhenti bekerja terhadap *life satisfaction* tersebut, baik positif maupun negatif. Berdasarkan hipotesis, berhenti bekerja diduga memengaruhi *life satisfaction* individu berumur 50 tahun ke atas. Namun, hasil merujuk estimasi yang telah dilakukan, berhenti bekerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *life satisfaction*. Artinya, kepuasan hidup yang dirasakan oleh individu usia 50 tahun ke atas yang telah berhenti bekerja, tidak jauh berbeda bila dibandingkan individu

yang masih bekerja. Meskipun hasil estimasi mengindikasikan kepuasan hidup yang semakin lama akan semakin berkurang, secara statistik pengaruh status bekerja tersebut tidak signifikan. Hal ini diduga karena sebagian besar individu usia 50 tahun ke atas masih aktif bekerja, yang ditunjukkan oleh persentase sampel penduduk yang bekerja sebanyak 78,05 persen. Selain itu waktu berhenti bekerja yang telah dilalui oleh individu usia 50 tahun ke atas yang menjadi sampel penelitian ini bervariasi, sehingga kepuasan hidupnya tidak lagi dipengaruhi oleh status berhenti bekerja. Coe & Zammaro (2011) mengonfirmasi hasil penelitian yang telah dilakukan. Menurut Coe & Zammaro (2011) kepuasan hidup tidak dipengaruhi oleh status bekerja, tetapi secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat kesehatan.

Berbeda halnya dengan variabel berhenti bekerja, variabel religiusitas (*religiosity*) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *life satisfaction*. Artinya, kepuasan hidup individu berumur 50 tahun ke atas yang taat beragama akan semakin meningkat dibandingkan individu yang tidak taat beragama. Kenaikan 1 tingkat ketaatan dalam beragama akan meningkatkan kepuasan hidup = 4 (*Very Satisfied*) bagi individu berumur 50 tahun ke atas sebesar 0,051 *percentage point* dan 0,011 *percentage point* pada kepuasan hidup = 5 (*Completely Satisfied*). Ketaatan beragama mendorong manusia untuk selalu bersyukur dan berpikir positif agar dapat menerima kehidupan dalam kondisi apapun. Selain itu, pelaksanaan ibadah yang teratur serta menghadiri acara-acara keagamaan dapat membangun jejaring sosial di kalangan jemaat.

Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel religiusitas terhadap *life satisfaction*. Hasil yang ditemukan dalam studi ini

juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lim & Putnam (2010), yang menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepuasan hidup seseorang. Menurut Lim & Putnam (2010), umat beragama lebih puas dengan kehidupan mereka karena mereka secara teratur menghadiri layanan keagamaan dan membangun jejaring sosial dalam kalangan jemaat mereka.

Hubungan positif antara *life satisfaction* dan religiusitas dalam studi yang telah dilakukan memperkuat hasil temuan Myers & Diener (1995). Myers & Diener (1995) menyimpulkan bahwa religiusitas berkaitan dengan positifnya *life satisfaction* dalam beragam kondisi yang dialami oleh individu. Sama halnya dengan Myers & Diener, Cohen (2002) berpendapat bahwa salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam studi mengenai *life satisfaction* adalah religiusitas. Cohen mengungkapkan hasil penelitiannya, bahwa spiritualitas dan religiusitas merupakan penduga terbaik dalam melihat *happiness* dan *life satisfaction* bagi penganut katolik dan protestan.

Kate et al. (2017) mengungkapkan hasil yang bertolak belakang dengan studi yang telah dilakukan oleh Myers & Diener (1995) serta Cohen (2002). Temuan Kate et al. (2017) mengungkapkan bahwa *non-religious group* memiliki *life satisfaction* yang lebih tinggi dibandingkan muslim. Hal tersebut menurut mereka lebih disebabkan oleh posisi sosial yang kurang mampu, bukan karena faktor *believing* dan *belonging*. Hasil tersebut mengonfirmasi adanya kemungkinan konsekuensi positif dan negatif dari religiusitas terhadap *subjective well-being*.

Kate et al. (2017) menambahkan, meskipun berdoa sebagai manifestasi dari ketaatan seseorang merupakan hal yang umum dilakukan oleh kelompok umat beragama, tetapi

mereka yang berdoa benar-benar mengungkapkan tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan usaha keras mereka dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapinya.

Selain religiusitas, variabel lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap *life satisfaction* adalah konsumsi (*ln pce*). Dalam studi ini ditemukan, bahwa setiap kenaikan 1 level konsumsi akan meningkatkan kepuasan hidup = 4 (*Very Satisfied*) bagi individu berumur 50 tahun ke atas sebesar 0,058 *percentage point* dan 0,014 *percentage point* pada kepuasan hidup = 5 (*Completely Satisfied*). Hal ini berarti kepuasan hidup individu yang berusia 50 tahun ke atas akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan konsumsinya.

Individu usia 50 tahun ke atas akan semakin banyak mengalami keluhan kesehatan. Hal ini diduga akan meningkatkan konsumsi di kalangan individu kelompok usia tersebut terkait dengan kebutuhan perawatan kesehatan, di samping untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan terpenuhinya konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan perawatan kesehatan maka kepuasan hidup individu usia 50 tahun ke atas akan semakin meningkat.

Hal yang sama terjadi pada variabel tingkat partisipasi individu usia 50 tahun ke atas dalam kegiatan masyarakat (*community participation*), yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *life satisfaction*. Berdasarkan studi yang telah dilakukan, diketahui bahwa setiap kenaikan 1 tingkat partisipasi individu dalam kegiatan masyarakat maka akan meningkatkan *life satisfaction* bagi individu berumur 50 tahun ke atas sebesar 0,033 *percentage point* pada level kepuasan hidup = 4 (*Very Satisfied*) serta 0,007 *percentage point* pada level kepuasan hidup = 5 (*Completely Satisfied*).



”
 Penurunan kapasitas fisik, kesehatan, dan disabilitas dipastikan akan terjadi ketika usia bertambah semakin tua. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap aktivitas individu sehari-hari.
 “

Artinya kepuasan hidup individu usia 50 tahun ke atas yang berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat akan semakin meningkat dibanding dengan individu yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.

Kondisi ini diduga terkait jejaring sosial yang tercipta ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Dengan terlibat dalam kegiatan masyarakat maka individu usia 50 tahun ke atas akan terus aktif

dan produktif dalam menghadapi masa tuanya. Selain itu mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari secara normal, dapat berpikir jernih sehingga dapat memperpanjang usia harapan hidup.

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi *life satisfaction* individu berumur 50 tahun ke atas. Berbagai penelitian mengungkapkan tentang pengaruh variabel kesehatan

terhadap *life satisfaction*, melalui berbagai pendekatan. Di antaranya dengan melihat penilaian pribadi individu yang bersangkutan mengenai status kesehatannya, atau melalui kemampuan seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari (*activity daily living/ADL*).

Status kesehatan yang digunakan dalam studi ini dilihat melalui kemampuan individu berumur 50

tahun ke atas dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri (*activity daily living/ADL*), yang selanjutnya disebut *ADL_katz*. Adapun *ADL* tersebut dihitung berdasarkan Indeks Katz. Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diketahui bahwa semakin *dependent* individu berumur 50 tahun ke atas maka akan meningkatkan *life satisfaction* sebesar 0,032 *percentage point* pada level kepuasan hidup = 4 (*Very Satisfied*) serta 0,008 *percentage point* pada level kepuasan hidup = 5 (*Completely Satisfied*). Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan hidup individu usia 50 tahun ke atas akan semakin meningkat sesuai dengan kemandiriannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari, yang memperlihatkan kondisi kesehatan individu tersebut.

Penurunan kapasitas fisik, kesehatan, dan disabilitas dipastikan akan terjadi ketika usia bertambah semakin tua. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap aktivitas individu sehari-hari. Kondisi fisik yang baik dan sehat dapat mendukung individu usia 50 tahun dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, tanpa harus bergantung kepada orang lain, seperti pendamping atau perawat kesehatan. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan kepuasan hidup yang dapat mereka rasakan. Variabel kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan hidup, baik bagi laki-laki dan perempuan. Wilson (1967) memperkuat hasil argumen studi yang telah dilakukan, bahwa kesehatan berkaitan erat dengan *subjective well-being*.

Variabel selanjutnya yang memengaruhi *subjective well-being* secara signifikan adalah *pensionpaid*. Semakin terjadwal sistem pembayaran pensiun, yang mana dalam studi ini dibayarkan per bulan/tahun bagi individu berumur 50 tahun ke atas, akan meningkatkan *life satisfaction* sebesar 0,062 *percentage point* pada level kepuasan hidup = 4 (*Very*

Satisfied) serta 0,018 *percentage point* pada level kepuasan hidup = 5 (*Completely Satisfied*). Artinya kepuasan hidup individu usia 50 tahun ke atas dengan jenis pembayaran pensiun yang terjadwal akan semakin meningkat dibandingkan individu yang memiliki jenis pembayaran pensiun lainnya. Hal ini diduga dengan pembayaran pensiun yang terjadwal maka individu tersebut akan merasa tenang dalam menjalani hidupnya, karena memiliki sumber penghasilan yang pasti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Faktor suku bangsa atau variabel *Javanese* turut menjadi penentu *life satisfaction* individu berumur 50 tahun ke atas yang telah berhenti bekerja. Studi ini menemukan bahwa terdapat perbedaan *life satisfaction* antara suku Jawa dan suku di daerah lainnya. Adapun *life satisfaction* individu berumur 50 tahun ke atas akan meningkat sebesar 0,043 *percentage point* pada level kepuasan hidup = 4 (*Very Satisfied*) serta 0,010 *percentage point* pada level kepuasan hidup = 5 (*Completely Satisfied*). Hal ini berarti kepuasan hidup individu usia 50 tahun ke atas yang bersuku Jawa semakin meningkat bila dibandingkan dengan individu suku bangsa lainnya. Sebagai suku bangsa mayoritas, individu yang merupakan suku Jawa akan memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan suku bangsa lainnya. Menurut sensus penduduk 2010, suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41 persen dari total populasi.

Berikutnya pengaruh variabel *age* dalam studi ini menunjukkan bahwa semakin bertambah usia seseorang, maka akan mengurangi *life satisfaction* sebesar 0,015 *percentage point* pada level kepuasan hidup = 4 (*Very Satisfied*) serta 0,004 *percentage point* pada level kepuasan hidup = 5 (*Completely Satisfied*). Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan hidup

individu usia 50 tahun ke atas akan semakin menurun seiring dengan penambahan umur. Seiring dengan bertambahnya umur, maka akan terjadi penurunan kapasitas fisik, kesehatan, dan disabilitas, sehingga individu di kelompok usia tersebut tidak sepenuhnya dapat menikmati hidup. Kepuasan hidup yang dirasakan oleh individu usia 50 tahun ke atas akan semakin berkurang karena umur yang semakin tua.

Hal menarik ditemukan pada pengaruh variabel jenis kelamin (*female*) terhadap *life satisfaction*. Penelitian ini menunjukkan bahwa wanita berumur 50 tahun ke atas memiliki tingkat kepuasan hidup yang semakin meningkat pada level kepuasan hidup = 4 (*Very Satisfied*), yaitu sebesar 0,031 *percentage point* serta 0,007 *percentage point* pada level kepuasan hidup = 5 (*Completely Satisfied*). Kondisi ini menunjukkan kepuasan hidup wanita usia 50 tahun ke atas akan semakin meningkat bila dibandingkan dengan laki-laki berusia 50 tahun ke atas.

Hal tersebut diduga karena perempuan lebih sering mengalami emosi positif maupun negatif dibandingkan laki-laki. Kondisi ini terkait dengan usia harapan hidup perempuan yang lebih panjang dibandingkan laki-laki. Selain itu, perempuan umumnya memiliki sifat yang lebih sabar dibandingkan laki-laki sehingga mereka dapat menerima kondisi hidup apa adanya tanpa mengeluh. Oleh sebab itu, perempuan memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi dibanding laki-laki.

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan, status perkawinan (*married*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepuasan hidup individu berumur 50 tahun ke atas. Demikian pula dengan status sebagai kepala rumah tangga (*head*), jumlah orang dewasa dalam rumah tangga (*adult*), jumlah anak yang masih

bersekolah dan menjadi tanggungan dalam rumah tangga (*depchild*), dan lokasi tempat tinggal (*rural*).

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan seseorang yang ditunjukkan dengan lama tahun bersekolah (*school*), tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepuasan hidup individu berumur 50 tahun ke atas. Kepuasan hidup individu usia 50 tahun ke atas yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, tidak jauh berbeda dengan individu berpendidikan rendah. Hal ini diduga karena individu di kelompok usia tersebut, sebagian besar berpendidikan rendah. Kondisi tersebut tidak terlepas dari proses pengembangan pendidikan di Indonesia, di mana akses terhadap pendidikan masih relatif sedikit, meskipun ada sebagian kecil individu usia 50 tahun ke atas yang beruntung mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Perluasan pendidikan massal baru dijalankan sejak tahun 1973 melalui program SD Inpres, jadi bagi individu yang sudah berusia 50 tahun atau lebih pada tahun 2014 maka pendirian sekolah tahun 1973 tersebut sangat terlambat karena individu di kohor tersebut sudah berusia 19 tahun (Adioetomo, 2018).

Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian Rojas (2015), yang mengatakan bahwa pendidikan pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai signal terhadap kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang. Pendidikan lebih lanjut dapat memainkan peranan dalam menyediakan nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Tingkat pendidikan seseorang dianggap berbanding lurus dengan pola pikir seseorang dalam menghadapi kehidupannya. Individu dengan tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan lebih bijak dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya.

Namun Clark & Oswald (1994) mengungkapkan hal yang bertolak belakang. Menurut mereka individu berpendidikan tinggi lebih banyak mengalami kesulitan dibandingkan individu berpendidikan rendah. Hal ini diduga karena adanya semacam efek perbandingan yang disebabkan oleh aspirasi yang tinggi.

Status perkawinan (*married*) yang menunjukkan hubungan personal antarindividu, tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap individu usia 50 tahun ke atas. Meskipun hasil estimasi menunjukkan indikasi kepuasan hidup yang semakin tinggi, namun kepuasan hidup individu usia 50 tahun ke atas berstatus menikah tidak jauh berbeda dibandingkan individu dengan status belum atau tidak menikah. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Clark & Oswald (1994). Menurut Clark & Oswald, orang yang menikah memiliki tingkat tekanan mental terendah, yang tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup yang dirasakannya.

Status kepemilikan rumah (*house*) turut memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan hidup individu berumur 50 tahun ke atas. Namun, variabel tersebut secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan hidup individu usia 50 tahun ke atas. Artinya tidak ada perbedaan kepuasan hidup antara individu yang memiliki rumah sendiri ataupun lainnya. Hal ini diduga karena sebagian besar individu usia 50 tahun ke atas dalam studi ini sudah memiliki rumah sendiri, sehingga kehidupan mereka jauh lebih nyaman.

Hal lain yang dapat diungkapkan dalam studi ini berhubungan dengan kehadiran anak dalam sebuah keluarga. Studi ini menggunakan variabel jumlah anak yang masih bersekolah dan menjadi tanggungan dalam suatu rumah tangga (*depchild*). Hal yang mendasari pemakaian variabel tersebut adalah terkait dengan

tingkat kepuasan hidup yang akan dialami oleh individu berumur 50 tahun ke atas.

Apabila dalam rumah tangga individu berumur 50 tahun ke atas memiliki anak yang masih bersekolah, maka akan mendorong partisipasi mereka dalam pasar tenaga kerja. Sementara di umur mereka yang sudah senja, tentunya menginginkan ketenangan dengan menikmati waktu luang (*leisure*) mereka. Kondisi tersebut diduga akan mengurangi kepuasan hidup individu berumur 50 tahun ke atas, mengingat hal ini bertolak belakang dengan kepuasan (*contentment*) yang dirasakannya. Penelitian Bonsang & Klein (2012) mengonfirmasi dugaan tersebut, dimana jumlah anak akan menurunkan *life satisfaction* individu berusia tua. Penelitian yang mereka lakukan mengungkapkan, individu menggantikan waktu luangnya untuk konsumsi ketika mereka pensiun.

Studi yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang berbeda. Semakin banyak anak yang masih bersekolah dan menjadi tanggungan dalam suatu rumah tangga, tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan *life satisfaction* individu berumur 50 tahun ke atas. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemilikan anak yang masih bersekolah bagi individu usia 50 tahun ke atas, tidak memengaruhi kepuasan hidupnya. Hal ini diduga karena budaya di Indonesia, dimana masyarakat pada umumnya tinggal dalam keluarga besar dan memiliki sifat kekeluargaan yang tinggi. Oleh karena itu, penambahan anak dalam keluarga tidak berpengaruh terhadap kepuasan hidupnya sebab mereka dapat berbagi peran bersama anggota keluarga lainnya.

Berikutnya studi ini melihat pengaruh kepemilikan asuransi kesehatan terhadap *life satisfaction* individu berumur 50 tahun ke atas. Hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa kepemilikan asuransi kesehatan/jiwa

(*insurance*) memiliki pengaruh negatif terhadap *life satisfaction* individu berumur 50 tahun ke atas. Namun, variabel tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap *life satisfaction* individu berumur 50 tahun ke atas. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gu et al. (2017) di China. Gu et al. mengungkapkan bahwa asuransi kesehatan dapat secara signifikan meningkatkan status kesehatan dan kepuasan hidup penduduk usia tua.

Tidak adanya perbedaan pengaruh kepemilikan asuransi kesehatan/jiwa terhadap *life satisfaction* yang dirasakan oleh individu berumur 50 tahun ke atas di Indonesia, diduga karena masih sedikitnya cakupan asuransi kesehatan tersebut. Hal ini terlihat dari persentase kepemilikan asuransi kesehatan/jiwa yang dimiliki oleh individu usia 50 tahun ke atas, yaitu sekitar 46,93 persen, sedangkan sisanya tidak memiliki asuransi kesehatan/jiwa. Selain itu, kualitas pelayanan asuransi kesehatan yang masih rendah dapat menyebabkan para pengguna asuransi kesehatan merasa enggan untuk memanfaatkannya. Hal ini memungkinkan para pengguna asuransi kesehatan lambat laun meninggalkan jasa asuransi kesehatan tersebut. Selain itu, Indonesia sendiri baru memulai sistem jaminan nasional kesehatan di Indonesia pada tahun 2014, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai pelaksanaan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2004, yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kemudian diikuti oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun, pemerintah masih mencari cara yang tepat untuk mengaplikasikan program tersebut bagi tenaga kerja di sektor informal, karena program ini masih dalam transisi. Oleh karena itu, manfaat dari jaminan sosial kesehatan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh para pekerja.

Variabel lain yang memengaruhi *life satisfaction* individu berumur 50 tahun ke atas, yaitu variabel *pensionpaid* atau sistem pembayaran dana pensiun yang diterima. Sistem pembayaran dana pensiun yang lebih terjadwal akan meningkatkan kepuasan hidup individu usia 50 tahun ke atas. Hal ini diduga dengan pembayaran pensiun yang terjadwal maka individu tersebut akan merasa tenang dalam menjalani hidupnya, karena memiliki sumber penghasilan yang pasti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Merujuk hasil estimasi, individu usia 50 tahun ke atas yang tinggal sendiri kepuasan hidupnya tidak berbeda bila dibandingkan dengan individu yang tinggal dengan anak atau kerabatnya. Hal ini ditunjukkan oleh tidak signifikannya pengaruh variabel tersebut terhadap kepuasan hidup individu usia 50 tahun ke atas. Hidup sendiri tentunya akan terasa sepi dan berpengaruh terhadap kondisi psikologis seseorang, terutama bagi individu yang menua. Kehidupan masa tua tentu ingin ditemani pasangan ataupun anak cucu yang dapat memberikan kebahagiaan. Namun, budaya di Indonesia umumnya menunjukkan bahwa orang tua tinggal berdekatan atau tinggal bersama dengan anak-anak dan kerabat keluarga lainnya sehingga status tinggal sendiri tidak terlalu berpengaruh terhadap kepuasan hidupnya.

Hasil estimasi menunjukkan perempuan ternyata memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun hasil *Chow Test* yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang tidak signifikan, namun untuk mempertegas temuan ini dilakukan estimasi dengan mempertimbangkan gender.

Berdasarkan perbedaan jenis kelamin, terlihat adanya beberapa perbedaan arah koefisien dari variabel yang

merupakan penduga *life satisfaction*. Arah koefisien variabel status perkawinan (*married*) adalah positif dan signifikan bagi laki-laki, sedangkan perempuan memiliki arah negatif meski secara statistik tidak signifikan. Berikutnya variabel status kepala rumah tangga (*head*) memiliki arah negatif dan signifikan bagi perempuan. Sementara arah koefisien variabel tersebut bagi laki-laki positif, meskipun secara statistik tidak signifikan.

Variabel kepemilikan anak yang masih bersekolah (*depchild*) memiliki arah koefisien positif dan signifikan bagi perempuan, tetapi bagi laki-laki, arah koefisien variabel kepemilikan anak memiliki arah negatif dan tidak signifikan secara statistik. Selain variabel-variabel yang telah disebutkan di atas, perbedaan arah koefisien ditunjukkan pada variabel kepemilikan rumah (*house*). Arah koefisien positif dan signifikan ditunjukkan pada responden laki-laki, sedangkan kepemilikan rumah bagi perempuan memiliki arah koefisien negatif serta tidak signifikan secara statistik.

Merujuk hasil studi secara keseluruhan maka dapat ditunjukkan bahwa individu berumur 50 tahun ke atas dengan jenis kelamin perempuan, berstatus menikah, masih bekerja, terdapat orang dewasa dan anak yang masih bersekolah, suku Jawa, memiliki rumah sendiri, tingkat pendidikannya tinggi, menerima pembayaran pensiun per bulan/tahun, memiliki status kesehatan yang baik ditunjukkan dengan kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari, memiliki konsumsi tinggi yang secara tidak langsung menunjukkan tingginya pendapatan yang mereka miliki, taat beragama, serta aktif dalam kegiatan kemasyarakatan cenderung memiliki kepuasan hidup yang tinggi. Berdasarkan variabel demografi dan sosio-ekonomi tersebut, variabel umur, suku bangsa, jenis pembayaran dana pensiun, status kesehatan, konsumsi, ketaatan beragama, dan partisipasi

dalam kegiatan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kepuasan hidup individu usia 50 tahun ke atas.

Studi ini tidak mengonfirmasi bahwa status bekerja berpengaruh positif terhadap kepuasan hidup seperti yang ditemukan pada studi-studi sebelumnya. *Life satisfaction* lebih dipengaruhi oleh aspek yang melekat pada individu itu sendiri. Diener (2009) mengungkapkan bahwa tingkat *subjective well-being* dipengaruhi oleh faktor genetik yang meliputi lingkungan keluarga, faktor kepribadian diantaranya kecenderungan temperamen, faktor demografis meliputi hasil pendapatan, status pernikahan, usia, dan lain-lain, serta faktor hasil dan perilaku di antaranya kontak sosial, aktivitas, kejadian hidup yang baik maupun buruk. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepuasan hidup seseorang maka individu perlu didorong melalui aspek yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat individu pula. Secara umum, temuan dalam studi ini sejalan dengan temuan-temuan sebelumnya, seperti Clark & Oswald (1994), Abolhassani (2012), Rider (2014), Haller & Hadler (2006), Kutubaeva (2019), Rojas (2015), Lim & Putnam (2010), Myers & Diener (1995), dan Cohen (2002).

KESIMPULAN

Temuan hasil empiris mengenai pengaruh status bekerja terhadap *subjective well-being* yang dirasakan oleh individu usia 50 tahun ke atas, menunjukkan indikasi kepuasan hidup (*life satisfaction*) individu usia 50 tahun ke atas yang telah berhenti bekerja semakin lama semakin menurun. Namun, pengaruh status bekerja tersebut tidak signifikan terhadap *subjective well-being* individu berusia 50 tahun ke atas yang dilihat melalui kepuasan hidup.

Studi ini tidak mengonfirmasi bahwa status bekerja berpengaruh positif terhadap kepuasan hidup seperti

yang ditemukan pada studi-studi sebelumnya. *Life satisfaction* lebih dipengaruhi oleh aspek yang melekat pada individu itu sendiri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepuasan hidup seseorang maka individu perlu didorong melalui aspek yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat individu pula, seperti konsumsi, pendapatan, status perkawinan, usia, kontak sosial, aktivitas dan kejadian hidup baik maupun buruk yang mereka alami.

Hasil studi yang telah dilakukan menunjukkan adanya variasi pengaruh di antara berbagai variabel demografi dan sosio-ekonomi dalam menjelaskan hubungan antara status berhenti bekerja terhadap kepuasan hidup individu usia 50 tahun ke atas. Salah satu variabel yang memegang peranan penting dalam menentukan kepuasan hidup bagi individu usia 50 tahun ke atas adalah variabel kondisi kesehatan yang dilihat melalui kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari (*Activity Daily Living/ADL*).

Penurunan kapasitas fisik, kesehatan, dan disabilitas dipastikan akan terjadi ketika usia bertambah semakin tua. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap aktivitas individu sehari-hari. Kondisi fisik yang baik dan sehat dapat mendukung individu usia 50 tahun dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, tanpa harus bergantung kepada orang lain, seperti pendamping atau perawat kesehatan. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan kepuasan hidup yang dapat mereka rasakan. Variabel kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan hidup, baik bagi laki-laki dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Abolhassani, M. (2012). Subjective Well-Being Around Retirement. https://www.netspar.nl/assets/uploads/020_MSc_Marzieh_Abolhassani.pdf

- Adioetomo, S. M. (2018). Memetik Bonus Demografi (S. M. Adioetomo & E. L. Pardede (eds.)). PT Raja Grafindo Perkasa.
- Baker, M., Milligan, K. S., & Baker, M. (2009). Retirement Income Security and Well-Being in Canada (No. 14667; Working Paper). <https://www.nber.org/papers/w14667.pdf>
- Bonsang, E., & Klein, T. J. (2012). Retirement and Subjective Well-Being. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 83(3), 311-329. <https://doi.org/10.1016/j.ebo.2012.06.002>
- Charles, K. K. (2004). Is Retirement Depressing?: Labor Force Inactivity and Psychological Well-Being in Later Life. *Research in Labor Economics*, 23, 269-299. [https://doi.org/10.1016/S0147-9121\(04\)23008-4](https://doi.org/10.1016/S0147-9121(04)23008-4)
- Clark, A. E., & Oswald, A. J. (1994). Unhappiness and Unemployment. *The Economic Journal*, 104(424), 648-659. <https://doi.org/10.2307/2234639>
- Coe, N. B., & Zamarro, G. (2011). Retirement Effects on Health in Europe. *Journal of Health Economics*, 30(1), 77-86. <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2010.11.002>
- Cohen, A. B. (2002). The Importance of Spirituality in Well-Being for Jews and Christians. *Journal of Happiness Studies*, 3(3), 287-310. <https://doi.org/10.1023/A:1020656823365>
- Diener, E. (1984). Subjective Well-Being. *Psychological Bulletin*, 95(3), 542-575. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2162125
- Diener, E., & Ryan, K. (2009). Subjective Well-Being : A General Overview. *South African Journal of Psychology*, 39(4), 391-406. <https://doi.org/10.1080/008245408023900402>
- Fonseca, R., Kapteyn, A., Lee, J., Zamarro, G., & Feeney, K. (2014). A Longitudinal Study of Well-

- Being of Older Europeans: Does Retirement Matter? *Journal of Population Ageing*, 7(1), 21-41. <https://doi.org/10.1007/s12062-014-9094-7>
- Gall, T. L., Evans, D. R., & Howard, J. (1997). The Retirement Adjustment Process: Changes in the Well-Being of Male Retirees Across Time. *Journals of Gerontology: Psychological Sciences*, 52B(3), 110-117. <https://doi.org/10.1093/geronb/52B.3.P110>
- Gruber, J., & Wise, D. A. (1999). *Social Security and Retirement around the World* (J. Gruber & D. A. Wise (eds.)). The University of Chicago Press. <https://www.nber.org/books/grub99-1>
- Gu, L., Feng, H., & Jin, J. (2017). Effects of Medical Insurance on the Health Status and Life Satisfaction of the Elderly. *Iranian Journal of Public Health*, 46(9), 1193-1203. <http://ijph.tums.ac.ir>
- Haller, M., & Hadler, M. (2006). How Social Relations and Structures Can Produce Happiness and Unhappiness: An International Comparative Analysis. *Social Indicators Research*, 75(2), 169-216. <https://doi.org/10.1007/s11205-004-6297-y>
- Horner, E. M. (2012). Subjective Well-Being and Retirement: Analysis and Policy Recommendations. *Journal of Happiness Studies*, 15(1), 125-144. <https://doi.org/10.1007/s10902-012-9399-2>
- Johnston, D. W., & Lee, W.-S. (2009). Retiring to The Good Life? The Short-Term Effects of Retirement on Health. *Economics Letters*, 103(1), 8-11. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2009.01.015>
- Kate, J. ten, Koster, W. de, & Waal, J. van der. (2017). The Effect of Religiosity on Life Satisfaction in a Secularized Context: Assessing the Relevance of Believing and Belonging. *Review of Religious Research*, 59, 135-155. <https://doi.org/10.1007/s13644-016-0282-1>
- Kesavayuth, D., Rosenman, R. E., & Zikos, V. (2015). Retirement, Personality, and Well-Being (No. 3). <http://ses.wsu.edu/wp-content/uploads/2015/05/WP2015-3.pdf>
- Klotz, J., Gollner, T., & Gartner, K. (2018). Case Study The Impact of Retirement on Subjective Well-Being in Austria: An Analysis of National EU-SILC Data (WP 2.2). Federal Ministry of Education, Science and Research. https://www.factage.eu/pubs/FACTAGE_STAT_D2-2_Report_The Impact of Retirement on Subjective Well-Being in Austria.pdf
- Kutubaeva, R. Z. (2019). Analysis of Life Satisfaction of the Elderly Population on the Example of Sweden, Austria and Germany. *Population and Economics*, 3(3), 102-116. <https://doi.org/10.3897/popecon.3.e47192>
- Latif, E. (2011). The Impact of Retirement on Psychological Well-Being in Canada. *Journal of Socio-Economics*, 40(4), 373-380. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2010.12.011>
- Lim, C., & Putnam, R. D. (2010). Religion, Social Networks, and Life Satisfaction. *American Sociological Review*, 75(6), 914-933. <https://doi.org/10.1177/0003122410386686>
- Myers, D. G., & Diener, E. (1995). Who Is Happy? *Psychological Science*, 6(1), 10-19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1995.tb00298.x>
- Rider, E. (2014). The Impact of Retirement on Subjective Well-Being [Union College]. <https://digitalworks.union.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1590&context=theses>
- Rojas, M. (2015). Poverty and People's Wellbeing. In W. Glatzer, L. Camfield, V. Møller, & M. Rojas (Eds.), *Global Handbook of Quality of Life: Exploration of Well-Being of Nations and Continents* (pp. 317-350). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9178-6_14
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On Happiness and Human Potentials: A Review of Research on Hedonic and Eudaimonic Well-Being. *Annual Review of Psychology*, 52, 141-166. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.141>
- Veenhoven, R. (2015). Overall Satisfaction with Life: Subjective Approaches (1). In W. Glatzer, L. Camfield, V. Møller, & M. Rojas (Eds.), *Global Handbook of Quality of Life: Exploration of Well-Being of Nations and Continents* (pp. 207-238). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9178-6_9
- Wilson, W. (1967). Correlates of Avowed Happiness. *Psychological Bulletin*, 67(4), 294-306. <https://doi.org/10.1037/h0024431> ■

PROFIL PENULIS

Nenden Budiarti, S.ST., S.E., M.Si.

merupakan alumni program S-3 Dalam Negeri Pusbindiklatren tahun 2016; Penulis bekerja di Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung.



Salasa Leib

MAGANG KARYASISWA AFIRMASI BAPPENAS DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Tema: Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik Menuju *Good Governance*
di Pemerintahan Kota Palembang

Karyasiswa Afirmasi Kementerian PPN/Bappenas, merupakan penerima beasiswa perencana Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas yang diadakan melalui proses seleksi utusan aparatur sipil negara (ASN), khususnya para perencana di daerah tertinggal dan terluar.

Beasiswa Pusbindiklatren bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia ASN di bidang perencanaan yang kemudian diharapkan mampu berkontribusi positif dalam perencanaan pembangunan daerah dan menjadi aktor dalam menyinergikan kebijakan pembangunan nasional dan daerah dalam rencana strategi pembangunan daerah, hingga dapat menciptakan percepatan serta pemerataan pembangunan daerah yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dalam mengimplementasikan

kebijakan terkait beasiswa tersebut, Kementerian PPN/Bappenas melalui Pusbindiklatren bekerja sama dengan tiga perguruan tinggi negeri di Indonesia salah satunya adalah Universitas Sriwijaya pada program studi Magister Administrasi Publik. Kebijakan tersebut juga mengamanatkan agar karyasiswa dapat melaksanakan kegiatan Magang Karyasiswa Afirmasi sebagai salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mengimplementasikan teori kebijakan publik yang telah dipelajari sekaligus meningkatkan

kompetensi, membangun jejaring, serta adopsi inovasi pelayanan publik yang ada pada lokus magang, serta mengaplikasikan teori ke dalam sistem kerja melalui formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, maupun evaluasi kebijakan dengan pendekatan teoretis.

Dalam merealisasikan amanat Pusbindiklatren, Universitas Sriwijaya bekerja sama dengan Pemerintah Kota Palembang. Instansi yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang.

Dalam pelaksanaan magang, karyasiswa dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari Kelompok I, yang menganalisis pelayanan perizinan di Kota Palembang; dan Kelompok II, yang menganalisis tentang penanaman modal di Kota Palembang. Tiap-tiap kelompok didampingi oleh satu pembimbing yang bertugas membimbing karyasiswa dalam kegiatan magang hingga dapat melahirkan rekomendasi dalam bentuk karya ilmiah yang menjadi ide serta gagasan teoretis dari karyasiswa kepada instansi tersebut.

Kegiatan magang dilaksanakan selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan 15 Desember 2021. Pelaksanaan kegiatan tersebut dimulai dengan pembekalan selama dua hari yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya untuk memberikan gambaran kepada karyasiswa terkait teknis pelaksanaan magang, penulisan

laporan magang, serta karya tulis yang akan menjadi pedoman bagi karyasiswa selama proses magang berlangsung. Dalam kegiatan tersebut, karyasiswa dibekali terkait teknis pelaksanaan magang oleh Guru besar Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Kiagus M. Sobri dan Dr. Raniasa Putra M.Si. Adapun materi metodologi penulisan laporan dan karya tulis disampaikan oleh Dr. H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D.

Selain kegiatan pembekalan, karyasiswa peserta magang dilepas dengan kegiatan pelepasan yang diselenggarakan di Ruang Doktor I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya (FISIP Unsri) Kampus Palembang, dan dilepas secara resmi oleh Dekan FISIP Unsri, Prof. Dr. Alfity, M.Si. yang didampingi oleh Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, Dr. Raniasa Putra, S.I.P., M.Si. dan Guru Besar Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Kiagus M. Sobri, M.Si., selaku pembimbing magang.

Dalam sambutan, Dekan FISIP Unsri menyampaikan bahwa kegiatan magang seperti ini penting dilakukan oleh mahasiswa program magister guna mengimplementasikan dan melihat bagaimana bentuk pelayanan prima kepada masyarakat serta memberikan sumbangan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan magang ini sangat bermanfaat dalam membangun jaringan, baik mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang maupun institusi khususnya Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP Unsri.

Dekan juga berpesan kepada karyasiswa agar dalam pelaksanaan kegiatan magang tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai wujud tanggung kepada negara dalam mencegah dan mengendalikan pandemi Covid-19. Selain itu, Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP Unsri, Dr. Raniasa Putra, S.I.P., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan magang ini sangat penting guna mengimplementasikan ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan khususnya di Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP Unsri. Sebagai ilmuwan muda, karyasiswa diharapkan selalu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan. Beliau juga berpesan agar karyasiswa menjaga nama baik alamamater dan nama baik Pusbindiklatren selaku *provider* beasiswa selama mengikuti kegiatan magang ini.

Selain kegiatan pembukaan tersebut, karyasiswa juga diterima oleh perwakilan DPMPTSP Kota Palembang, yakni Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan layanan, Citra Martikalini, S.STP., M.Si. selaku koordinator pelayanan Mal Pelayanan Publik Kota Palembang. Dalam sambutannya, beliau berpesan agar karyasiswa selaku calon analis intelektual kiranya dapat memberikan masukan-masukan dengan cara-cara ilmiah lewat pengetahuan teoretis yang telah diterima di perguruan tinggi agar dapat menjawab kebutuhan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat selaku kelompok sasaran atau penerima manfaat dari pelayanan pemerintah. Selain itu, Karyasiswa Afirmasi Bappenas merupakan orang-orang terpilih dari berbagai daerah di Indonesia

diharapkan dapat mengadaptasi kebijakan yang diterapkan di instansi tersebut agar dapat menjadi pembandingan saat kembali ke daerahnya.

Selama proses pelaksanaan magang, karyasiswa mendapatkan banyak pengalaman berharga di antaranya transformasi teknologi

informasi dalam pelayanan publik, baik implementasi kegiatan maupun pada saat evaluasi kegiatan. Hal tersebut tentunya lebih efektif, efisien, dan transparan. Ini tentunya akan memudahkan para penerima layanan atau kelompok sasaran dalam mengakses pelayanan, serta menghindari adanya praktik korupsi dalam pelayanan publik.

Karyasiswa juga mempelajari bagaimana Pemerintah Kota Palembang membangun jejaring dalam kolaborasi pelayanan publik yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik hingga menciptakan keterpaduan sistem pelayanan. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan yang maksimal kepada masyarakat selaku penerima layanan.

Karyasiswa juga dapat mempelajari kemampuan DTMPTSP Kota Palembang dalam menerjemahkan kebijakan yang bersifat *top down* dari pemerintah pusat sebagai *policy making* dalam pembangunan yang bertujuan memberikan pelayanan perizinan yang maksimal serta membuka peluang usaha bagi investor agar mendorong pembangunan ekonomi di Kota Palembang. Seperti diketahui, Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan daerah *major project* pusat perdagangan barang dan jasa, simpul produksi, distribusi industri, dan perdagangan nasional dalam pusat kegiatan global. ■



PROFIL PENULIS

Salasa Leib merupakan karyasiswa S-2 Afiriasi Pusbindiklatren, Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya tahun 2021.

#ZonaIntegritas

#ZonaIntegritas

PIMPINAN DAN STAF

PUSBINDIKLATREN BAPPENAS

MENOLAK SEGALA BENTUK GRATIFIKASI



Kementerian PPN/ Bappenas

Pusbindiklatren
Bappenas | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

www.pusbindiklatren.bappenas.go.id

Instagram: @pusbindiklatren Bappenas

Kementerian PPN/ Bappenas

Pusbindiklatren Bappenas

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pelayanan di Pusbindiklatren Bappenas tidak memungut biaya dalam bentuk apapun. Jika terdapat pihak-pihak yang meminta biaya atas pelayanan di Pusbindiklatren Bappenas, silakan Anda laporkan melalui alamat pos-el (e-mail) berikut:
pusbindiklatren@bappenas.go.id



JAM PELAYANAN
SENIN—JUMAT
08.30—11.30 & 12.30—15.00

PELAYANAN PRIMA

- BEBAS PUNGLI
- BEBAS KORUPSI
- BEBAS KOLUSI
- BEBAS NEPOTISME
- BEBAS GRATIFIKASI

ZONA INTEGRITAS

www.pusbindiklatren.bappenas.go.id

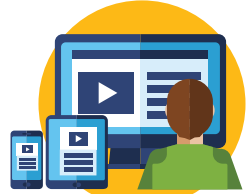
#ZonaIntegritas

WBS | WHISTLE BLOWING SYSTEM

LAPORKAN SEKARANG JUGA!

SEGALA BENTUK PENYALAHGUNAAN DI SEKITAR ANDA MELALUI:

irtama.bappenas.go.id/wbs



Masukkan tempat kejadian, waktu, pihak terlapor, dan *upload* dokumen seperti: foto, video, rekaman suara, dan lain-lain.

JANGAN KHAWATIR
IDENTITAS PELAPOR DIJAMIN KERHASIAANNYA

Kementerian PPN/ Bappenas

Pusbindiklatren
Bappenas | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

www.pusbindiklatren.bappenas.go.id

Instagram: @pusbindiklatren Bappenas

Pada bulan Desember 2020, Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas meraih predikat WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) dari Kementerian PANRB





**KLINIK ASN
PERENCANA**

TANYA JAWAB JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

SEPUTAR PENILAIAN ANGKA KREDIT

Sumber: Klinik ASN Perencana

PERTANYAAN 1:

Terkait penilaian angka kredit JFP dengan peraturan terbaru (PermenPANRB 4/2020), apakah produk dokumen perencanaan yang merupakan kerja rutin seorang JFP seperti, Renstra, Renja, DPA, LKJIP, dll. bisa langsung diajukan/diklaim angka kreditnya tanpa membuat tulisan/makalah lagi seperti aturan yang lama (Kepmenpan 16/2001)?

Jawaban:

- Dokumen yang secara rutin bisa diajukan angka kreditnya adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan. Adapun dokumen perencanaan seperti Renstra yang disusun oleh orang lain tidak dapat diklaim angka kreditnya. Dokumen yang dapat diklaim adalah bagian dari Renstra yang Anda susun sendiri.
- Untuk satu Renstra yang disusun oleh Tim Pejabat Fungsional Perencana dan mendapat penugasan tertulis dari atasan langsung (persentase penugasan

yang sama) maka mendapatkan Angka Kredit yang sama.

PERTANYAAN 2:

Saat ini saya sedang mengumpulkan angka kredit untuk pengusulan naik jabatan menjadi Perencana Madya, sebelumnya Perencana Muda (III/d). Jika saya mengusulkan sebelum Desember 2020, apakah penilaian masih menggunakan peraturan yang lama? Untuk nantinya kenaikan jabatan menjadi Perencana Madya tentunya harus melalui diklat yang masih menunggu tahun depan. Dengan demikian, saya ingin menanyakan, bagaimana jadinya dengan sistem penilaian angka kredit saya dan kenaikan jabatan saya?

Jawaban:

- Bagi perencana yang telah dan masih menduduki JF Perencana pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2020 tentang JFP (sebelum 9

Maret 2020), dapat mengajukan penilaian dokumen perencanaan sampai Desember 2020 dengan menggunakan aturan lama (Kepmenpan 16/2001) dan masih dapat mengumpulkan di bulan November 2021.

Namun, apabila angka kredit fungsional perencana belum mencukupi untuk kenaikan pangkat/golongan 1 (satu) tingkat di atasnya maka yang bersangkutan masih harus mengumpulkan angka kredit dengan penilaian integrasi, yaitu berdasarkan PermenPANRB 4/2020 tentang JFP sampai angka kredit mencukupi untuk kenaikan pangkat/golongan 1 (satu) tingkat di atasnya atau selambat-lambatnya hingga kenaikan pangkat/golongan periode 1 Oktober 2022.

- Untuk persyaratan diklat pada kenaikan jabatan tidak wajib. Pengganti dari diklat tersebut adalah Uji Kompetensi dan HKM, yaitu mempublish *policy paper*

bagi yang akan naik ke jenjang JFP Ahli Madya dan JFP Ahli Utama berdasarkan PermenPANRB 4/2020 tentang JFP.

PERTANYAAN 3:

Apabila SK Pangkat IV/c saya sudah keluar, apakah kelebihan angka kredit saya di nol kan otomatis, karena PAK terakhir kemarin jumlahnya 853?

Jawaban:

Berdasarkan perubahan kebijakan dari angka kredit kumulatif konvensional (KepmenPAN 16/2001) ke dalam angka kredit kumulatif integrasi (PermenPANRB 4/2020) maka Penilaian Angka Kredit (PAK) pada saat sudah mengalami kenaikan pangkat mengikuti PermenPANRB 4/2020.

Dalam hal ini angka kredit konvensional tidak terdapat kelebihan angka kredit. Adapun pada saat JFP Ahli Madya dengan pangkat/golongan IV/c, harus mengumpulkan angka kredit kumulatif sebanyak 150 untuk dapat naik pangkat, dengan tetap mengumpulkan kewajiban angka kredit minimal setiap tahun.

PERTANYAAN 4:

Kapan mulai mengumpulkan angka kredit berdasarkan integrasi?

Jawaban:

Pada tahun 2021, seluruh perencana sudah wajib mengumpulkan dan mengajukan angka kredit berdasarkan PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2020 tentang JFP.

Begitu juga untuk penilaian angka kredit oleh Tim Penilai juga wajib pada tahun 2021, berdasarkan PermenPANRB 4/2020, .

PERTANYAAN 5:

Kewajiban angka kredit pertahun untuk JFP Ahli Muda adalah 25 dari angka kredit kumulatif 100, dalam arti ini dibutuhkan 4 tahun untuk kenaikan pangkat dari III/c ke III/d, mohon penjelasannya?

Jawaban:

Untuk Perencana Ahli Muda wajib memenuhi target angka kredit minimal tahunan sebanyak 25 yang berasal dari tugas jabatan, yaitu kegiatan perencanaan. Jika hanya mengumpulkan angka kredit minimal maka perencana akan naik pangkat dalam waktu 4 tahun.

Namun, perencana dapat mengoptimalkan perolehan angka kredit tahunan menjadi setinggi-tingginya 150 persen dari Jumlah angka kredit minimal tahunan. Dalam hal ini Perencana Ahli Muda dapat mengoptimalkan angka kredit tahunan menjadi 37,5 yang berasal dari unsur perencanaan, profesi, dan/ atau penunjang. Jadi, jika perencana mengumpulkan angka kredit maksimal setiap tahun yaitu 37,5 maka dalam waktu tiga tahun, perencana dapat naik pangkat/golongan.

PERTANYAAN 6:

Saya baru diangkat menjadi Perencana Ahli Pertama melalui pengangkatan pertama pada Oktober 2020, sesuai dengan PermenPANRB 4/2020 tentang JFP. Dalam mengajukan angka kredit, saya perlu menyusun SKP dengan target angka kredit setahun minimal 12,5. Apakah target per tahun itu dapat disesuaikan mengingat waktu efektif saya sebagai JFP hanya selama tiga bulan saja pada tahun ini?

Jawaban:

Jika pada revisi SKP berada pada tahun berjalan maka target angka kredit mengikuti sisa bulan pada tahun

tersebut. Contoh pada kasus tersebut dimana sisa waktu tiga bulan maka target angka kredit tahunan menjadi $3/12 \times 12,5 = 3,125$

PERTANYAAN 7:

Perihal pengajuan angka kredit, apakah ada ketentuan format dokumen pengusulan angka kredit serta lampiran dokumen output hasil kerja? Misalnya, saya mengerjakan bahan paparan koordinasi, apa yang harus saya lampirkan sebagai evidence sehingga butir kegiatan itu dapat dijadikan angka kredit?

Jawaban:

Untuk Perencana Ahli Pertama dan Perencana Ahli Muda, pengumpulan dokumen berbasis *by process*, di mana *output* yang dihasilkan terdiri atas beberapa butir kegiatan.

Contoh, Perencana Ahli Pertama melakukan kegiatan perencanaan. Hasil dari kegiatan tersebut dapat dibuat makalah atau laporan perencanaan yang terdiri atas butir-butir kegiatan pada PermenPANRB 4/2020, misalnya 7 butir kegiatan dapat dijadikan 1 laporan perencanaan.

Adapun untuk Perencana Ahli Madya dan Perencana Ahli Utama, pengumpulan dokumen berbasis *by output*, yaitu satu butir kegiatan menghasilkan satu dokumen perencanaan.

PERTANYAAN 8:

Saya pangkat/golongan III/a dan sudah diajukan kenaikan pangkat untuk April 2021, tetapi saya baru diangkat Perencana Ahli Pertama dengan nilai angka kredit 103 dan sudah dilantik pada tanggal 9 Maret 2021 sehingga kenaikan pangkat ke golongan III/b saya dibatalkan.

Berapa lama sebagai Jafung Perencana ini saya bisa naik ke golongan III/b? Apabila dalam dua tahun angka kredit tidak terpenuhi, apakah ada sanksi?

Jawaban:

Argo penilaian angka kredit baru dimulai sejak SK pengangkatan JFP diterima. Berdasarkan hasil simulasi kami dalam menghitung angka kredit dengan mempertimbangkan angka kredit minimal dan maksimal. Apabila tiap tahun seorang JFP mampu mengumpulkan angka kredit maksimal maka diprediksi pada tahun ke-3 sudah dapat naik pangkat/golongan satu tingkat di atasnya.

Apabila perencana tidak mampu mengumpulkan angka kredit tahunan maka akan berlaku hukuman disiplin yang diatur oleh mekanisme internal instansi masing - masing.

PERTANYAAN 9:

Jika tidak bisa naik jabatan ke dalam Fungsional Perencana Ahli Madya, apakah berarti pengumpulan angka kredit hanya untuk pemeliharaan? Bagaimana JFP di daerah seperti kami bisa mengikuti diklat perencanaan?

Jawaban:

Betul, menggunakan aturan angka kredit *maintenance* (angka kredit pemeliharaan) seperti diatur dalam PermenPANRB 4/2020 Pasal 27. Untuk perencana yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, tetapi belum tersedia kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target angka kredit dari unsur perencanaan yang sudah ditentukan. Untuk angka kredit pemeliharaan bagi Perencana Ahli Muda adalah 20 AK.

Pusbindiklatren menawarkan berbagai pelatihan yang bertujuan untuk pengayaan materi dan pemenuhan

kapasitas kompetensi perencana. Informasi lengkap bisa cek situs *web* Pusbindiklatren dan media sosial Pusbindiklatren.

PERTANYAAN 10:

Sering kali yang mengajukan DUPAK tidak mendapatkan *feedback* bagaimana penilaian terhadap DUPAK-nya sehingga yang mana yang sudah benar dan masih salah (tidak sesuai kriteria penilai) tidak terinformasikan dengan baik. Dalam pengajuan DUPAK, apakah tidak diperkenankan untuk melakukan "banding" oleh pengaju kepada Tim Penilai?

Jawaban:

Tidak ada mekanisme banding. Apabila seorang JFP ingin mendapatkan *feedback* bisa di awal, dengan cara mengumpulkan pada minggu pertama atau kedua setelah surat pemberitahuan keluar. Itu merupakan saringan pertama dari sekretariat.

Dalam penyusunan DUPAK, sampaikan proses-proses dari kegiatan perencanaan yang ada di dalam laporan, bukan hanya *output* misalnya Renstra. Nantinya di dalam aplikasi Sikeren, misalnya Tim Penilai mencoret tiga dari tujuh elemen dalam satu laporan seorang Perencana Ahli Pertama atau Ahli Muda, Tim Penilai harus menyampaikan alasan pencoretan di sana. Nantinya secara otomatis setelah penilaian selesai dilakukan dan bersifat final, perencana tersebut dapat melihat tanggapan-tanggapan dari Tim Penilai.

Pelaksanakan penilaian sebenarnya dilakukan oleh dua Tim Penilai. Ketika terjadi perbedaan lebih dari 10 persen antara Tim Penilai 1 dan Tim Penilai 2 maka akan diadakan sidang pleno. Pusbindiklatren akan menanyakan alasan Tim Penilai 1 dan Tim Penilai 2 memberikan angka

kredit yang berbeda signifikan, dicarikan solusinya, kemudian hasilnya disampaikan kepada JFP yang mengajukan. Pusbindiklatren menawarkan pelatihan yang bersifat substantif contohnya pelatihan menulis *policy paper*. Ini merupakan salah satu usaha Pusbindiklatren dalam meningkatkan kapasitas JFP.

PERTANYAAN 11:

Seorang perencana pangkat III/c (Perencana Ahli Muda) setiap tahun berhasil mengumpulkan angka kredit maksimal sebanyak 37,5 sehingga dalam dua tahun dia sudah bisa mengumpulkan 75 angka kredit. Di sisi lain, perencana tersebut lulus kuliah S-2 dan mendapatkan ijazah pascasarjana. Berdasarkan aturan baru, ijazah diakui 25 persen. Apakah perencana yang bersangkutan dapat naik pangkat dalam dua tahun atau tetap tiga tahun?

Jawaban:

Tidak bisa naik pangkat dalam dua tahun, karena ijazah S-2 hanya dapat diklaim dalam unsur pengembangan profesi dan 25 angka kreditnya hanya bisa dari unsur perencanaan.

PERTANYAAN 12:

Seorang Perencana Ahli Muda menyusun SKP dengan total angka kredit di SKP 37,5 angka kredit, tetapi dia mengajukan ke Tim Penilai Bappenas sebanyak 60 angka kredit dengan alasan *evidence* takut banyak yang tidak mendapat angka kredit. Dalam menyusun SKP cuma maksimal 37,5, sedangkan yang diajukan 60 angka kredit. Bagaimana memilih butir-butir kegiatan yang dituangkan dalam SKP?

Jawaban:

Pada awal tahun ada forum SKP yang merupakan dialog antara atasan dan bawahan. Pada SKP tidak membahas angka kredit, tetapi merupakan

cascading dari eselon II yang dibagi habis ke bawah. Lampiran SKP membahas angka kredit. Forum SKP dapat mengarahkan pejabat fungsional dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan. Ada tim yang akan memeriksa apakah SKP yang kita buat sudah sesuai dengan fungsi dan tugas yang diamanatkan kepada kita.

PERTANYAAN 13:

Saya diangkat sebagai Perencana Ahli Madya pada tanggal 1 Februari 2021. Berapa angka kredit yang harus saya penuhi dan tertuang dalam SKP untuk tahun 2021. Selain itu, pada bulan Mei terjadi pergantian pimpinan. Apakah saya perlu mengganti penandatanganan SKP untuk keperluan penilaian akhir tahun?

Jawaban:

Untuk Perencana Ahli Madya, target angka kredit dari unsur perencanaan minimalnya adalah 37,5 per tahun. Karena diangkat pada bulan Februari maka target angka kredit minimal untuk ibu adalah 11/12 dikali 37,5. Perlu mengganti penandatanganan SKP karena pimpinan sebagai pejabat penilai SKP berdasarkan PermenPANRB No. 8 Tahun 2021 dan pimpinan juga yang menyerahkan SKP staf di unit kerjanya ke pengampu kepegawaian.

PERTANYAAN 14:

Saya sudah penyetaraan dari Pengawas (struktural eselon IV) ke Fungsional Perencana Ahli Muda, memiliki golongan IV/a. Apakah untuk ke Fungsional Ahli Madya syaratnya adalah harus ikut Uji Kompetensi dan memiliki angka kredit sebanyak 360?

Jawaban:

Saat ini adalah model Angka Kredit (AK) konversi-integrasi, bukan konvensional. Untuk penyetaraan dari Jabatan Pengawas eselon IV golongan

IV/a maka Anda mendapatkan angka kredit sebesar 100. Untuk menjadi Perencana Ahli Madya, Anda harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, serta memiliki angka kredit paling sedikitnya 200. Berarti saat ini, Anda harus mengumpulkan 100 angka kredit lagi. Untuk ketentuan mekanisme pengumpulan angka kredit bisa melihat PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2020 tentang JF Perencana.

PERTANYAAN 15:

Dari referensi yang saya baca, angka kredit dalam penyetaraan adalah 300. Apakah artinya perlu waktu dua tahun baru bisa mengikuti Uji Kompetensi Fungsional Perencana Ahli Madya?

Jawaban:

Untuk Perencana Ahli Muda, target angka kredit minimal adalah 25 per tahun dan angka kredit maksimal adalah 37,5 per tahun. Target angka kredit minimal tersebut harus dipenuhi dari unsur perencanaan, dan selisih antara angka kredit maksimal dengan minimal boleh dipenuhi dari unsur pengembangan profesi dan penunjang.

Saat ini target angka kredit yang harus Anda kumpulkan untuk ke jenjang Perencana Ahli Madya adalah 100 angka kredit. Jadi, jika bisa mengumpulkan angka kredit maksimal, yaitu sebesar 37,5 setiap tahunnya maka Anda dapat naik ke Perencana Ahli Madya dalam waktu tiga tahun.

PERTANYAAN 16:

Saya lulus *inpassing* pada tahun 2020. Berapakah angka kredit yang harus saya kumpulkan dan kapan waktunya untuk saya bisa naik pangkat ke III/b? Hal ini mengingat harusnya kenaikan pangkat reguler III/b saya per 1 April 2021, tetapi karena SK JF Perencana Ahli Pertama saya turun tanggal 16

Februari 2021 dan ada ketentuan harus dilantik maksimal 1 bulan dari tanggal SK sehingga saya dilantik JF Perencana Ahli Pertama tanggal 16 maret 2021 dan usulan kenaikan pangkat reguler saya dibatalkan.

Jawaban:

Untuk Perencana Ahli Pertama, minimal angka kredit setahun adalah 12,5 dan maksimalnya 18,75. Karena Anda mulai di pertengahan Februari, maka SKP nya Maret–Desember 2021. Anda bisa mengumpulkan 10/12 dikali 18,75 karena Januari–Februari tidak dihitung. Kenaikan pangkat dari III/a ke III/b dibutuhkan 50 angka kredit. Apabila mampu mengumpulkan angka kredit maksimal setiap tahunnya berarti dalam tiga tahun Anda bisa usulkan kenaikan pangkat ke III/b. Sebanyak 5,25 angka kredit lebihnya dapat digunakan sebagai penambahan angka kredit.

PERTANYAAN 17:

Jika angka kredit saya mencukupi untuk kenaikan pangkat/golongan, dapatkah pangkat saya otomatis akan naik, meskipun saya hanya berlatar belakang pendidikan S-1, sementara pada jabatan struktural untuk peralihan dari III/d ke IV/a setidaknya harus mengikuti Diklatpim III atau berlatar pendidikan S-2 (dapat saya tambahkan contoh seperti guru/dosen dapat naik otomatis)?

Jawaban:

Untuk persyaratan kenaikan jabatan adalah terpenuhi persyaratan angka kredit, terdapat formasi, untuk jenjang ahli muda ke ahli madya harus memenuhi persyaratan angka kredit di unsur profesi sebesar 6 angka kredit, mengikuti uji kompetensi, dan persyaratan HKM, yaitu publikasi *policy paper* tentang perencanaan pembangunan di tingkat instansi. Jadi untuk persyaratan pendidikan tidak memengaruhi persyaratan kenaikan pangkat atau jabatan.

PERTANYAAN 18:

Sesuai aturan baru, Perencana Ahli Pertama membutuhkan 100 angka kredit untuk naik ke Perencana Ahli Muda. Kalau perencana tersebut sudah memiliki 100 lebih angka kredit, apakah bisa langsung naik jabatan dengan uji kompetensi? Kalau yang diangkatnya pada tahun 2018 atau 2016, apakah bisa naik jabatan sesuai aturan baru atau mengikuti aturan yang lama, yaitu terkumpul dulu hingga 200 angka kredit untuk naik ke Perencana Ahli Muda?

Jawaban:

Untuk kenaikan pangkat dari III/b ke III/c dibutuhkan persyaratan 50 angka kredit, karena angka kredit Anda 153 maka Anda masih butuh 47 angka kredit. Pengumpulan 47 angka kredit menggunakan aturan baru, karena Anda Perencana Ahli Pertama maka per tahunnya harus mengumpulkan minimal 12,5 angka kredit atau maksimalnya adalah 18,75 angka kredit.

PERTANYAAN 19:

Saya diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda melalui penyetaraan dari jabatan struktural terhitung mulai 1 Januari 2021. Golongan terakhir adalah III/d terhitung mulai 1 Oktober 2018. Kapan saya dapat mengajukan DUPAK untuk kenaikan golongan IV/a? Mohon penjelasan prosedur penilaian angka kredit. Apakah di satker saya, BNN, sudah ada penilai angka kredit untuk JFP?

Jawaban:

Posisi Anda pada saat penyetaraan ada di Jabatan Pengawas sehingga angka kredit penyetaraan yang diberikan sebesar 300 dengan JFP jenjang Ahli Muda. Syarat untuk naik pangkat ke golongan IV/a adalah harus naik jenjang jabatan dahulu ke Perencana Ahli Madya. Persyaratan untuk naik

jabatan adalah mengikuti dan lulus uji kompetensi ahli madya dengan syarat memiliki angka kredit 90 persen dari 400 angka kredit yakni 360 angka kredit, pemenuhan persyaratan angka kredit, persyaratan HKM, persyaratan angka kredit unsur profesi, dan ada formasi Perencana Ahli Madya di unit kerja Anda. Perencana Ahli Muda setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit minimal 25 dan maksimal 37,5.

Jika di instansi Anda belum memiliki Tim Penilai maka dapat dilakukan di Tim Penilai Pusat, yaitu Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.

PERTANYAAN 20:

Saya sebelumnya adalah Kasubbag Program Data, golongan III/d dari bulan Oktober 2020 melalui penyetaraan jabatan menjadi JFP Ahli Muda dan sub-koordinator sejak Desember 2020. Apabila angka kredit saya sudah mencukupi, apakah saya bisa langsung naik ke IV/a atau harus menyelesaikan S-2?

Jawaban:

Karena belum satu tahun menjadi JFP maka Anda tidak mendapatkan angka kredit bonus. Anda harus menyusun SKP sesuai PermenPANRB 4/2020 untuk periode Januari–Desember 2021 dan harus mengumpulkan kewajiban angka kredit minimal. Jika ingin bekerja secara maksimal, maka Anda bisa mengusulkan angka kredit pada akhir 2021 sebesar 37,5 dan pada akhir 2022 juga 37,5.

Sebagai sub-koordinator, Anda mendapatkan angka kredit bonus sebesar 25 persen dari kebutuhan kenaikan pangkat/golongan III/d ke IV/a pada tahun 2022. Pada Oktober 2022, Anda bisa mengajukan kenaikan pangkat untuk Mei 2023.

Perlu diingat bahwa Anda tetap harus mengikuti uji kompetensi jenjang ahli madya ke Pusbindiklatren, serta memenuhi persyaratan lainnya yaitu

harus ada formasi kebutuhan JFP Ahli Madya dan mempunyai HKM yakni pernah menulis makalah atau jurnal.

PERTANYAAN 21:


Saya dilantik menjadi Fungsional Perencana Ahli Madya per September 2020 melalui jalur *inpassing*. Selama bulan September hingga bulan Desember, saya sudah melakukan dan mengumpulkan dokumen pendukung untuk usulan angka kredit pada awal tahun 2021 ini. Apakah DUPAK yang saya ajukan sudah berdasarkan PermenPANRB 4/2020 atau masih berdasarkan peraturan lama, yaitu KepmenPANRB 16/2001? Ini mengingat Anjab dan ABK untuk penetapan formasi di instansi kami sudah merujuk PermenPANRB 4/2020.

Jawaban:

Berdasarkan SE Menteri PPN/ Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis JFP dan SE SesmenPPN/Sestama Bappenas, kriteria JFP terbagi menjadi dua, yaitu JFP yang diangkat sebelum 9 Maret 2020 dan JFP yang diangkat setelah 9 Maret 2020 atau saat terbitnya PermenPANRB 4 Tahun 2020.

Kondisi Anda merupakan JFP yang diangkat setelah 9 Maret 2020 sehingga untuk pengumpulan berkas penilaian dan penilaian angka kredit mengikuti kebijakan PermenPANRB 4/2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana.

Perlu diperhatikan untuk pengumpulan angka kredit berdasarkan PermenPANRB 4/2020 harus diintegrasikan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), butir-butir kegiatan JFP juga harus sudah mengikuti PermenPANRB 4/2020, dan yang paling penting agar dipastikan bahwa Tim Penilai Angka Kredit sudah menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam PermenPANRB 4/2020. **(Penulis: Rita Miranda/ Pusbindiklatren)** ■



**Anda memiliki
masalah/pertanyaan
seputar Jabatan
Fungsional Perencana
atau Program Diklat
Pusb̄indiklatren
Kementerian PPN/
Bappenas?**

Konsultasikan secara daring dengan
Tim Pusb̄indiklatren Kementerian PPN/Bappenas melalui

**KLINIKASN
PERENCANA**



Setiap Jumat Terakhir Tiap Bulan
Pukul 14.00–16.00 WIB

Via  **zoom**

Info lengkap & Pendaftaran:

bit.ly/klinik-perencana





PERAN RISET DAN INOVASI LIPI PADA MASA PANDEMI COVID-19

Oleh: Erna Martini dan Mai Damai Ria

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Republik Indonesia yang berada dalam koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

PENDAHULUAN

LIPI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas tersebut LIPI berorientasi pada penelitian untuk memajukan ilmu pengetahuan berbagai bidang penelitian, sekaligus berfungsi sebagai lembaga pembina di Indonesia. Kegiatan penelitian LIPI bertujuan untuk menciptakan terobosan, penemuan, dan pembaruan dalam bidang sosial dan kemanusiaan, ilmu pengetahuan hayati, kebumian, keteknikan, dan pengukuran. Adapun bidang riset dan inovasi yang ada

di LIPI, antara lain Penelitian Ilmu Pengetahuan Hayati; Penelitian Ilmu Pengetahuan Kebumian; Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora; Penelitian Ilmu Pengetahuan Teknik; Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan; Pengembangan Sistem Dokumentasi dan Informasi Ilmiah; Penelitian, Konservasi Tumbuhan dan Pengembangan Kebun Raya, Pengembangan Multimedia; Penerbitan Ilmiah, Pembinaan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti; serta Pemanfaatan dan Inovasi Iptek.

Pada tahun 2020, dunia digemparkan dengan adanya *Corona Virus Disease*

2019 (Covid-19). Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Corona yang baru-baru ini teridentifikasi pertama kali di Wuhan, China pada bulan Desember 2019 dan hanya dalam waktu sebulan virus ini terus menyebar ke seluruh dunia. Selanjutnya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global pada bulan Maret 2020.

Penyebaran virus corona secara global masih terus bertambah. Melansir dari data Worldometers, hingga Kamis 26/8/2021 tercatat kasus Covid-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 214 juta lebih kasus. (Kompas, 26/8/2021). Bagi Indonesia, pandemi Covid-19 banyak membawa perubahan kebiasaan dan perilaku sehat bagi masyarakat. Di sisi lain, pandemi juga menjadi momentum kebangkitan kemandirian riset dan inovasi di tanah air yang dilakukan melalui sinergi, kolaborasi, dan *refocusing* program riset dalam Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19. LIPI sebagai salah satu lembaga pemerintah, telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung sinergi dan kolaborasi program Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19.

Menghadapi kondisi pandemi global tersebut dan sejalan dengan misi LIPI untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara berbasis hasil riset dan inovasi, maka LIPI melakukan serangkaian kegiatan penelitian yang bertujuan untuk membantu menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Seluruh kegiatan penelitian difokuskan pada topik riset dan inovasi terkait Covid-19. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan hasil-hasil riset LIPI tahun 2020 yang terkait langsung dengan penanganan pandemi Covid-19, sehingga dapat

diketahui peran riset dan inovasi yang dilakukan LIPI pada masa pandemi. Data diperoleh dari dokumen laporan yang telah dipublikasikan dan berbagai sumber resmi lainnya.

PEMBAHASAN

Situasi darurat wabah Covid-19 di Indonesia disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 yang diperkuat oleh Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Hingga kini, kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19, kian meningkat dan belum menunjukkan adanya penurunan. Berdasarkan Kepres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 maka diperlukan percepatan penanganan Covid-19 yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menanggulangi wabah ini.

Selaras dengan Kepres Nomor 7 tahun 2020 tersebut, LIPI sebagai salah satu lembaga penelitian di Indonesia ikut serta berkontribusi dalam upaya melakukan Penanganan Percepatan Penanggulangan Covid-19 di Indonesia melalui penelitian dan kegiatan secara multidisiplin ilmu. Peran serta LIPI dalam penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 diantaranya melalui beberapa kegiatan berikut.

1. Program "Indonesia Memanggil"

Program Indonesia Memanggil adalah program pelatihan nasional untuk melakukan deteksi virus dan menangani mikroorganisme patogen di antaranya virus SARS CoV-2 atau lazim disebut sebagai virus corona. Pelatihan ini diadakan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) terlatih dalam penanganan pandemic Covid-19,

terutama untuk penanganan langsung virusnya. Materi pelatihan di antaranya adalah pengetahuan mengenai patogenesis virus, cara bekerja di Laboratorium *Biosafety Level 2* dan 3, manajemen biorisiko dan *Emergency Response* untuk menghindari *Laboratory Acquired Infection (LAI)*, pemakaian Alat Pelindung Diri (APD), dan metode isolasi RNA dan RT PCR, dan uji praktikum. Pelatihan ini dilaksanakan di Kompleks Cibinong Science Center – Botanical Garden (CSC-BG) LIPI, Cibinong, Jawa Barat, kerja sama antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Peneliti (Pusbindiklat Peneliti), Pusat Penelitian Bioteknologi, dan Pusat Penelitian Biologi.

Selama tahun 2020, program ini telah diadakan sebanyak dua gelombang dengan total peserta 835 orang. Gelombang 1 sebanyak delapan *batch* dengan total peserta 778 orang, sedangkan Gelombang 2 sebanyak dua *batch* dengan jumlah peserta 57 orang. Peserta terdiri dari berbagai kalangan baik dari rumah sakit, klinik perguruan tinggi, pemerintah pusat dan daerah, BUMN, swasta, *start up* bidang kesehatan, dan umum yang tersebar di laboratorium rujukan nasional untuk deteksi virus Covid-19.

2. Deteksi Virus Corona (SARS CoV-2)

Penelitian ini adalah penelitian sampel klinis virus corona yang bertujuan untuk mengembangkan protocol uji berbagai variasi spesimen, koleksi virus Corona untuk mengembangkan kandidat vaksin, dan pengembangan baku obat anti-virus. Kegiatan dilaksanakan menggunakan fasilitas laboratorium *Biosafety Level (BSL) 2* dan 3 di Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI Cibinong.

Kegiatan yang dilakukan adalah (1) pemeriksaan sampel virus Corona dengan kapasitas uji maksimal 200 sampel per hari. Selama bulan April sampai Desember 2020 telah melakukan pemeriksaan sampel



1



2



3



4

(1-2) Pelatihan “Indonesia Memanggil” *Risk Management*; (3-4) Pelaksanaan Uji Klinis di RSDC Wisma Atlet Jakarta

virus Corona sebanyak 19.857 spesimen. Kegiatan ini bekerja sama dengan BNPB dan mitra swasta yaitu berbagai fasilitas kesehatan di Jabodetabek; (2) Pemeriksaan *Whole Genome Sequencing* (WGS) virus Corona yang menghasilkan 28 WGS; (3) Pengembangan kandidat vaksin rekombinan dengan membuat virus Corona tipuan atau palsu yang bertujuan membentuk antigen untuk meningkatkan system imun; dan (4) Pengembangan *RT Lamp* sebagai *kit* deteksi mandiri virus Corona dengan menggunakan desain baru.

3. Riset Herbal *Immunomodulator* untuk Penanganan Covid-19

Kegiatan ini adalah penelitian dan pengembangan obat herbal, pendampingan regulasi, serta uji klinik obat herbal yang dapat menghasilkan produk herbal untuk penanganan virus Covid-19 di Indonesia. Obat herbal tersebut dihasilkan dari kombinasi sejumlah tanaman herbal seperti jahe, sambiloto, daun sembung, dan meniran. Uji klinis telah dilakukan pada pasien di RSDC Wisma Atlet pada bulan Juni s.d. Agustus 2020. Telah dihasilkan prototipe obat herbal yang sudah lulus uji klinis tahap akhir dan keluar izin edar dari BPOM yaitu dua

produk obat herbal *Fatigon Promuno* dan *Cordyceps*. Obat herbal ini bersifat mengobati dan meningkatkan sistem imunitas tubuh untuk melawan infeksi virus, tetapi tidak berlaku untuk pasien kronis yang membutuhkan ventilator. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI bekerja sama dengan Kalbe Farma, BNPB, Badan POM, RSDC Wisma Atlet, TNI, dan UGM.

4. Riset *Ultraviolet C (UV-C) Sterilizer Portable*

Riset ini adalah mengembangkan teknologi sterilisasi dan disinfeksi yang mampu membunuh berbagai

macam bakteri, kuman, dan virus termasuk virus Corona dengan menggunakan Ultraviolet C (UV-C). Teknologi tersebut disematkan dalam alat *sterilizer* berbentuk portabel dan meja untuk mensterilkan benda yang mempunyai tingkat kontaminasi tinggi. Teknologi ini dikembangkan oleh tim Loka Penelitian dan Teknologi Bersih (LPTB), Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi (PPET), dan Pusat Penelitian Bioteknologi. Sasaran pengguna dari alat tersebut adalah Laboratorium BSL- 3, Rumah Sakit rujukan Covid-19, fasilitas umum, kantor, jasa pengiriman barang, dan pasar/supermarket.

5. Perangkat Disinfeksi Ruang Ultraviolet Cerdas Murah untuk Sterilisasi Virus Corona

Perangkat ini adalah pengembangan dari perangkat disinfeksi dan sterilisasi ruangan *portable* menggunakan sinar UV-C yang dapat dikendalikan melalui aplikasi android, portabel *Simple Smart UV-C Sanitizer* (Si-SUSan). Pengembangan prototipe alat ini dilakukan oleh Pusat Penelitian

Elektronika dan Telekomunikasi LIPI dan Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronika LIPI. Prototipe versi 1 telah mendapatkan sertifikasi Kementerian Kesehatan dan saat ini dalam proses pengembangan desain dan software Si-SUSan versi 2. Sasaran pengguna, yaitu klinik/ puskesmas, kantor, rumah tangga, dan lain sebagainya. .

6. Alat Terapi Oksigen High Flow untuk Percepatan Penyembuhan Pasien Covid-19 (Ventilator dan HFNC)

Kegiatan ini adalah mengembangkan prototipe alat ventilator yang dapat digunakan untuk memberikan terapi oksigen beraliran tinggi terhadap pasien Covid-19. Terdapat dua prototipe, yaitu *High Flow Nasal Cannula* (HFNC) dan *Smart Innovative Ventilator Indonesia* (SI-Venesia). Pengembangan alat ini dilakukan oleh Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronika dan Pusat Penelitian Teknologi dan Pengujian yang bermitra dengan PT Gerlink Utama Mandiri, Pemda Surabaya, dan Tim Gugus Tugas Covid-19. Saat ini alat

tersebut dalam proses duplikasi untuk uji klinis dan telah mendapatkan izin edar alat kesehatan. Gambar 6 menunjukkan prototipe Ventilator Tipe HFNC dan Penyerahan Prototipe Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

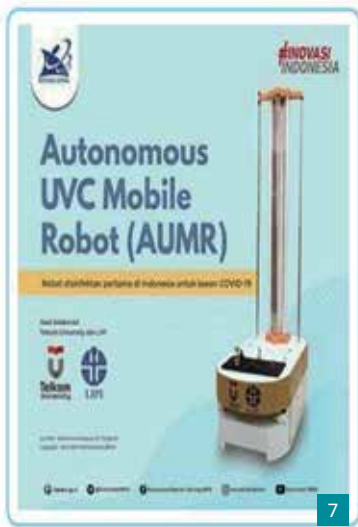
7. Autonomous Ultraviolet-C Mobile Robot (AUMR)

Perangkat ini adalah hasil pengembangan dari penggunaan sinar UV untuk sterilisasi dan desinfeksi. *Autonomous Ultra Violet C (UV-C) Mobile Robot* (AUMR) sebagai alat sterilisasi dan desinfeksi ruang isolasi medis pasien Covid-19 dengan memanfaatkan sinar ultraviolet tipe C pada panjang gelombang 254 nm. Pengembangan alat ini merupakan hasil kerjasama antara Balai Pengembangan Instrumentasi (BPI) dan Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI dengan Telkom University. Alat ini telah berhasil diuji coba di RSDC Wisma Atlet Jakarta, RSHS Bandung, dan RS Pindad Bandung. Gambar 7 menampilkan infografis prototipe *Autonomous Ultraviolet C (UV-C)*.



(5) Alat Deteksi RT Lamp; (6) *High Flow Nasal Cannula* (HFNC)





(7) Prototipe *Autonomous Ultra Violet C (UV-C) Mobile Robot (AUMR)*;

(8) *Airborne Terminator*



8. Robot Otonom Multiguna (ROM-20)

Robot Otonom Multiguna (ROM 20) merupakan robot multifungsi yang bagian atasnya bersifat modular atau dapat dipertukarkan sesuai dengan kebutuhan yang diletakkan pada sebuah *platform mobile robot*. Fungsi-fungsi robot tersebut di antaranya, yaitu sebagai (1) robot UVC yang dapat melakukan inaktivasi patogen menggunakan lampu ultraviolet tipe C (UV-C) sebagai upaya penyebaran virus termasuk Covid-19; (2) robot penyemprot cairan disinfektan yang dapat mencegah penyebaran mikroorganisme seperti bakteri, virus, spora, dan lain sebagainya; serta (3) robot pengantar makanan yang mempunyai kemampuan menjaga suhu makanan agar tetap hangat.

9. Pembuatan APD Proses *Crosslink* Material *Antimicrobial* Pada Material Kain Melalui *Surface Modification*

Kebutuhan untuk menyediakan alat pelindung diri (APD) sebagai

perangkat pelindungan diri yang utama telah mendorong penelitian ini. Pembuatan purwarupa alat pelindung diri dengan material dasar kain yang mampu membunuh mikroorganisme (virus, bakteri, jamur, dan khamir). APD tersebut dapat melindungi pengguna secara aktif dari penyebaran infeksi secara menyeluruh dimana seluruh tubuh dan tungkai bawah tertutup. Kelebihan APD tersebut di antaranya adalah (1) dapat secara aktif membunuh virus dan mikroorganisme lainnya saat terjadi kontak antara mikroorganisme dengan material APD (*active protection*); serta (2) material APD memiliki ketahanan terhadap darah, aerosol, *airborne*, dan partikel padat. Material APD telah diuji penetrasi cairan tubuh dan memenuhi persyaratan ISO 16603 dan dalam proses pengujian penetrasi patogen (ISO 16604).

10. *Airborne Terminator*

Airborne terminator merupakan alat sterilisasi udara dengan menggunakan teknologi *Ozone Nanobubble* yang diterapkan untuk penanganan

Covid-19 atau disebut juga *Ozone Nanomist*. Teknologi ini mengubah air menjadi uap air berozon sehingga bisa mensterilkan udara di dalam ruangan tanpa bahan kimia. Alat ini dihasilkan oleh Balai Pengembangan Instrumentasi bekerjasama dengan Kementerian Ristek/BRIN. *Airborne Terminator* telah digunakan pada beberapa Puskesmas di Bandung.

11. *Hands-free Door Opener*

Alat ini merupakan alat bantu untuk membuka pintu tanpa menyentuh gagang pintu. Berguna untuk mengurangi penyebaran Covid-19 melalui permukaan gagang pintu pada tempat umum. Alat ini dihasilkan oleh Pusat Penelitian Telimek (P2 Telimek) dan Loka Penelitian Teknologi Bersih (LPTB).

KESIMPULAN

LIPI sebagai salah satu lembaga pemerintah, telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung sinergi dan kolaborasi program Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19. LIPI mengambil peran sesuai dengan kapasitasnya sebagai lembaga penelitian dengan melakukan berbagai riset dan inovasi sesuai bidang keilmuan yang dimiliki. Kepedulian LIPI ikut serta berperan dalam penanganan pandemi Covid-19 yang saat ini melanda Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya diwujudkan dengan menghasilkan karya penelitian LIPI dari multidisiplin ilmu yang merupakan hasil kolaborasi antara para peneliti dari berbagai pusat penelitian LIPI.

Pandemi Covid-19 telah menggerakkan seluruh elemen bangsa khususnya dalam bidang penelitian untuk mengambil peran secara langsung dan nyata. Pandemi juga meningkatkan kolaborasi dan kerja sama berbagai lembaga penelitian baik pemerintah maupun swasta untuk menghasilkan terobosan dan inovasi dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Hal itu terbukti

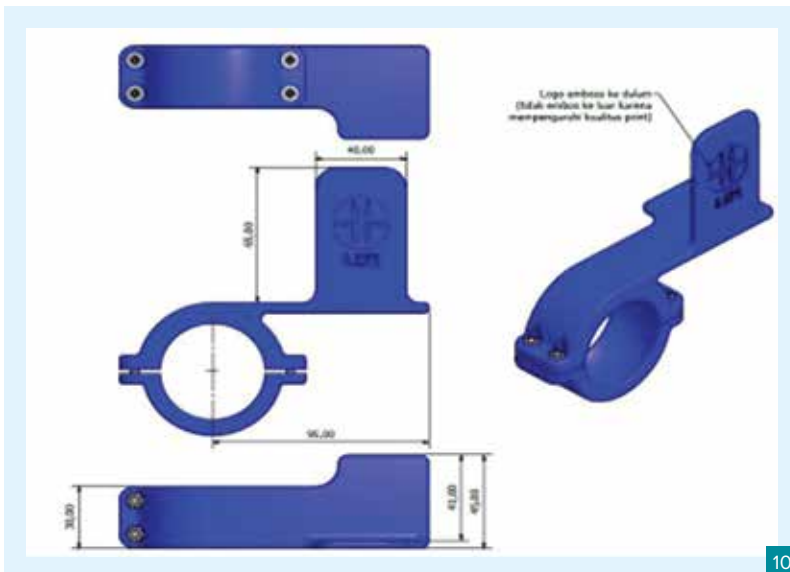
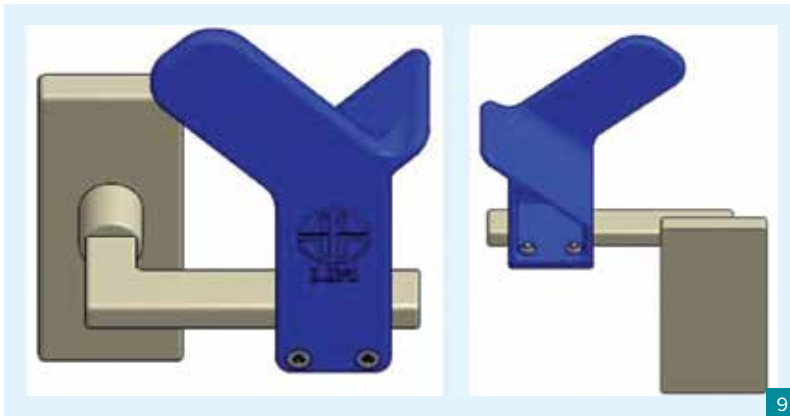
dari berbagai hasil riset LIPI terkait Covid-19 yang merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, baik dalam pelaksanaan maupun dalam pemanfaatannya.

Mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir, beberapa hal dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan penelitian tahun 2020 ini, antara lain sebagai berikut:

1. Melanjutkan riset terkait Covid-19 yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut, baik dengan pendanaan APBN maupun pendanaan swasta. Terkait hal ini beberapa penelitian terkait Covid-19 diketahui terus berjalan pada tahun 2021. Hal ini perlu dukungan dari instansi

pemerintah yang memiliki otoritas dalam hal pendanaan.

2. Menggandeng pihak industri untuk kerja sama lisensi terutama untuk hasil riset yang sudah siap untuk komersialisasi. Sebaiknya instansi pemerintah terkait menjembatani antara periset atau lembaga riset dengan pihak industri supaya kerja sama lisensi segera terwujud.
3. Memperluas implementasi hasil riset yang sudah bisa diterapkan langsung supaya segera berdampak pada upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Hal ini memerlukan dukungan dan kerja sama dari instansi pemerintah terkait terutama yang menangani langsung pandemi Covid-19, BUMN, dan pihak swasta lainnya.



(9) Handsfree Door Opener Model Gagang Ungkit;

(10) Handsfree Door Opener Model Gagang Puntir

DAFTAR PUSTAKA

Rencana Strategis LIPI 2020-2024

Laporan Kinerja LIPI Tahun 2020

Laporan Kinerja Deputi Bidang Ilmu Hayati Tahun 2020

Laporan Kinerja Deputi Bidang Jasa Ilmiah Tahun 2020

<http://lipi.go.id/>

www.kompas.com ■

PROFIL PENULIS

Erna Martini, S.E. merupakan Fungsional Perencana Madya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (LIPI/ BRIN). **Mai Damai Ria, M.Si.** merupakan Fungsional Perencana Muda di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/Badan Riset dan Inovasi Nasional (LIPI/BRIN).



Foto: freepik.com

SOLIDARITAS SOSIAL SEBAGAI WUJUD PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Oleh: Deti Kusmalawati

Bak dua sisi mata uang, Covid-19 yang ditetapkan World Health Organization/WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020, menimbulkan dampak positif sekaligus negatif bagi umat manusia, termasuk di Indonesia.

PENDAHULUAN

Di satu sisi, pandemi Covid-19 menyebabkan kesedihan luar biasa untuk jutaan umat manusia. Sampai dengan saat penulisan artikel ini, jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 di seluruh dunia mencapai 245.727.967 kasus dan jumlah kematian mencapai 4.986.838 jiwa (Worldometer, 2021). Sementara itu, di Indonesia sendiri total kasus terkonfirmasi positif mencapai 4.241.809 kasus atau di posisi ke-14 tertinggi di dunia dengan angka kematian mencapai total 143.299 orang (Worldometer, 2021). Selain

masalah kesehatan, pandemi ini ternyata juga meluluhlantakan berbagai aspek kehidupan yang krusial, seperti ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan sosial. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Juli 2021 World Bank (Bank Dunia) menurunkan status Indonesia dari negara berpendapatan menengah atas (*upper middle income country*) menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (*lower middle income country*).

Di sisi lain, pandemi ini juga memunculkan hal-hal positif dan

inovatif, yang tidak pernah dialami sebelumnya. Pandemi memaksa orang untuk lebih banyak tinggal di rumah sehingga memungkinkan adanya interaksi yang lebih intensif antaranggota keluarga di rumah. Pandemi juga memaksa manusia untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti bekerja dan belajar, sehingga manusia tetap bisa memenuhi target pekerjaan atau tugas sekolahnya dengan hasil yang optimal di tengah-tengah situasi yang penuh keterbatasan ini. Pada akhirnya, pandemi Covid-19 mengubah pola hidup manusia sehari-hari.

Hal positif lainnya yang muncul di kala pandemi Covid-19 adalah menjamurnya kembali gerakan solidaritas sosial di berbagai wilayah dunia, termasuk di tanah air. Di tengah memuncaknya kasus positif Covid-19 di Indonesia pada bulan Juni–Agustus 2021, solidaritas sosial yang tinggi menjadi alternatif bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk mendapat bantuan dalam berbagai bentuk. Hal ini terjadi karena sumber daya pemerintah sangat terbatas sehingga tidak mampu melayani kebutuhan semua warga, terutama yang berkaitan dengan akses pada fasilitas kesehatan, dalam waktu yang bersamaan.

PERMASALAHAN DAN TUJUAN

Untuk selanjutnya artikel ini akan menganalisis lebih dalam mengenai konsep solidaritas sosial terutama sebagai pencerminan bentuk peran atau partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Artikel ini juga mencoba menjawab pertanyaan mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan solidaritas

sosial sebagai gerakan yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh dalam menangani bencana pada masa yang akan datang.

PEMBAHASAN

Literatur yang berkembang saat ini menunjukkan adanya perdebatan mengenai konsep solidaritas sosial (De Deken, Ponds, & Van Riel; 2006). Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa konsep solidaritas mempunyai makna yang beragam seperti halnya konsep-konsep lain dalam cabang ilmu Sosiologi. Dalam hal ini, solidaritas dapat dipahami dalam dua perspektif, yaitu interpretasi individual dan interpretasi kolektif. Kedua perspektif ini menggarisbawahi *acceptance* (penerimaan) akan adanya kewajiban terhadap individu lain. Dalam perspektif interpretasi individual, *acceptance* ini berakar dari mekanisme *mutual self-interest* (kepentingan diri bersama), sedangkan di dalam konsep interpretasi kolektif, *acceptance* dipandang sebagai sesuatu yang sudah tertanam dalam kohesi sosial.

Perspektif interpretasi individual menekankan *pooling* risiko sebagai paradigma redistribusi risiko. Perspektif ini melihat bahwa seorang individu bisa memberikan kontribusi lebih tinggi daripada individu lain apabila ia merasa mempunyai kepentingan khusus dalam gerakan solidaritas sosial yang menguntungkan satu sama lain. Dalam hal ini, solidaritas dianggap sebagai bentuk ketergantungan antarindividu tersebut.

Pandangan ini berakar dari tradisi liberal dan dalam konteks ekonomi hal ini diwujudkan dalam bentuk

asuransi sosial wajib, seperti asuransi pensiun. Di sini, individu hanya mendukung mereka yang memberikan dukungan terhadap individu tersebut. Mereka yang tidak mampu memberikan kontribusi bagi *pooling of resources* bisa saja tidak dilibatkan atau dilibatkan dengan manfaat seminimal mungkin. Di sini yang berkembang adalah redistribusi horizontal, kelompok mungkin dibagi berdasarkan jenis pekerjaan atau tingkat pendapatan. Semakin tinggi kontribusi, semakin tinggi pula benefit untuk golongan tersebut. Sebaliknya, kontribusi yang rendah membatasi benefit mereka. Solidaritas semacam ini berisiko menimbulkan fragmentasi.

Sementara itu, interpretasi kolektif didasarkan pada konsepsi solidaritas yang dikembangkan Emile Durkheim dan mampu menangkap metafora "*fraternity*". Dalam interpretasi ini, masyarakat diharapkan bisa mendukung satu sama lain karena mereka merupakan anggota suatu komunitas dengan posisi yang sejajar. Solidaritas sebagai *fraternity* ini menghasilkan redistribusi vertikal di mana kontribusi yang kaya mengalir pada yang miskin, dan dari yang mempunyai risiko tinggi kepada yang berisiko rendah. Solidaritas sebagai *fraternity* didorong oleh adanya rasa empati terhadap mereka yang tergolong kelompok lemah dan marginal.

Dalam hal ini, konsep solidaritas sosial yang berkembang di Indonesia lebih cenderung menerapkan perspektif interpretasi kolektif. Hal ini mengingat solidaritas sosial atau yang lebih dikenal dengan istilah gotong royong, dianggap sebagai jati diri bangsa dan dimiliki setiap suku



Seorang lansia penyintas Covid-19 tengah melakukan telekonsultasi medis gratis yang disediakan relawan KUN Humanity System+

di Indonesia (Hamdi Moeloek seperti dikutip dalam Souisa, 2020). Dengan demikian, solidaritas sosial di masa pandemic Covid-19 bukanlah fenomena baru dan terbentuk dalam satu malam saja, namun sudah tertanam di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan diterapkan lebih intensif dan massif saat pandemi mendera (Rahman-Shepherd, dkk, 2021). Dalam hal ini, Covid-19 merupakan kondisi

darurat kesehatan publik yang menuntut adanya solidaritas sosial (English, 2021)

Solidaritas sosial pada masa pandemi ini dilakukan dalam bentuk, skala, dan cara yang beragam. Dari mulai yang sederhana sampai dengan massif dan menggunakan teknologi yang canggih. Bentuk solidaritas sosial yang sederhana antara lain dapat

dilihat dari gerakan pengumpulan donasi yang dilakukan suatu kelompok masyarakat untuk membantu anggota kelompoknya yang terpapar Covid-19. Mengingat jumlah warga Indonesia yang terpapar Covid-19 mencapai lebih dari empat juta orang, dapat diasumsikan bahwa bentuk solidaritas sosial semacam ini terjadi di mana-mana.

Sementara itu, solidaritas sosial dalam bentuk yang lebih rumit dan skala lebih besar antara lain bisa dilihat dari layanan *telemedicine* yang dilakukan organisasi masyarakat sipil, seperti KUN Humanity System+. Organisasi ini menyediakan layanan telekonsultasi medis dan psikologi secara gratis untuk pasien Covid-19 yang sedang dalam isolasi mandiri, keluarga atau orang dekat dari pasien Covid-19, serta masyarakat umum yang membutuhkan layanan telekonsultasi medis dan psikologis. KUN Humanity System+ ini merupakan gerakan kolaboratif yang melibatkan para dokter dan psikolog.

Rasa empati terhadap individu lain juga menggerakkan kelompok masyarakat penyintas Covid-19 untuk membuat jejaring, terutama menggunakan platform media sosial, untuk bertukar informasi mengenai donor plasma konvalesen. Penerapan terapi plasma konvalesen dinilai dapat mempercepat masa perawatan dan menurunkan tingkat kematian pada pasien Covid-19 (Sunita, 2021). Sayangnya, plasma konvalesen ini hanya dimiliki oleh mereka yang pernah terinfeksi Covid-19 dengan berbagai persyaratan lainnya. Mengingat tidak semua orang dapat melakukan donor plasma konvalesen, ketersediaan plasma darah konvalesen di Palang Merah Indonesia (PMI) pun sangat terbatas. Akibatnya, sering kali dibutuhkan waktu yang lama bagi pasien Covid-19 untuk mendapatkan donor plasma konvalesen tersebut. Dengan adanya jejaring penyintas Covid-19 ini, informasi mengenai ketersediaan dan lokasi donor plasma konvalesen bisa diketahui

warga yang membutuhkan lebih cepat.

Keterbatasan Sumber Daya

Pandemi Covid-19 berdampak Salah satu faktor pendorong maraknya solidaritas sosial adalah keterbatasan sumber daya dan kemampuan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pandemi Covid-19 berdampak buruk bagi berbagai sektor pembangunan. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik/BPS (2021) menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia pada triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 mengalami penurunan sebesar 0,74 persen (*y-on-y*). Sementara itu, angka kemiskinan pada bulan Maret 2021 mengalami peningkatan 0,36 persen dibandingkan Maret 2020. Pada bulan Maret 2021, *gini ratio*, yang menunjukkan indikator tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia, meningkat 0,003 poin menjadi 0,384 dibandingkan bulan Maret 2020. Dalam rangka penanganan dampak Covid-19, pemerintah pun terpaksa melakukan *refocusing* dan realokasi belanja K/L sebanyak empat kali selama tahun 2021.

Dengan kondisi seperti ini, pemerintah pun kewalahan ketika pandemi Covid-19 mengalami puncaknya di Indonesia pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2021. Pada tanggal 15 Juli 2021, jumlah kasus terkonfirmasi positif harian mencapai angka tertinggi sebesar 56.757 kasus sejak pandemi Covid-19 dinyatakan masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 (Worldometer, 2021). Fasilitas dan tenaga kesehatan tidak mampu membendung arus pasien Covid-19

yang memerlukan perawatan. Tak jarang, pasien harus berkeliling mencari rumah sakit yang bisa menerima mereka dan mana kala rumah sakit bersedia menerima, pasien tersebut harus mengantre untuk mendapat perawatan di ruang gawat darurat. Sebagai ilustrasi, pada akhir Juni 2021, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Chasbullah Abdulmajid di Kota Bekasi, bahkan terpaksa mendirikan tenda darurat bagi pasien setelah tingkat keterisian tempat tidur atau *bed occupancy rate* (BOR) di RSUD tersebut mencapai 100 persen (Kompas TV, 2021).

Di tengah keterbatasan kemampuan pemerintah tersebut, kehadiran gerakan solidaritas sosial menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan sesuai kebutuhan. Gerakan solidaritas sosial tersebut membuat warga terdampak Covid-19 tidak merasa terisolasi atau terlantar dalam menghadapi wabah ini. Dengan kondisi seperti ini, solidaritas sosial merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menangani Covid-19 yang harus dijaga keberlanjutannya, bahkan setelah pandemi Covid-19 berakhir.

SARAN DAN REKOMENDASI

Keberlanjutan solidaritas sosial perlu dijaga karena pemerintah memerlukan dukungan dari seluruh *stakeholder* pembangunan dalam rangka pemulihan seluruh sektor pembangunan, terutama ekonomi dan kesehatan, pascapandemi Covid-19. Mengingat solidaritas sosial bisa dilakukan dalam beragam bentuk dan skala, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pemulihan ini sesuai

dengan kapasitasnya masing-masing.

Sebagai contoh, jejaring solidaritas sosial yang di masa pandemi aktif menyebarkan informasi akurat dan bermanfaat mengenai Covid-19 dan cara penanggulangannya, dapat berperan sebagai hub untuk diseminasi informasi akurat terkait isu-isu kebencanaan krusial yang berkembang di tanah air (CIMICUS, 2020). Dengan berkaca dari pengalaman banyak negara, banyak kelompok masyarakat yang tidak bisa mengakses informasi dengan bahasa dan format yang dapat mereka pahami sehingga rentan terhadap berita palsu atau hoaks. Jejaring solidaritas sosial yang bekerja di level *grass root* ini dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Ada berbagai cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan solidaritas sosial. Pertama, pemerintah memberikan ruang yang lebih luas untuk partisipasi masyarakat dalam program penanganan bencana. Pencanaan Gerakan Solidaritas Nasional oleh pemerintah pada tanggal 19 Agustus 2021 lalu dapat dijadikan sebagai pintu masuk bagi jejaring solidaritas untuk berpartisipasi lebih aktif dalam program pemerintah.

Kedua, pemerintah juga sebaiknya menyusun *database* mengenai berbagai jenis layanan yang disediakan jejaring solidaritas sosial terkait penanganan bencana, yang dapat diakses masyarakat luas. Dengan adanya *database* ini, mobilisasi bantuan dan partisipasi

masyarakat dapat lebih cepat dan mudah dilakukan dalam penanganan bencana pada masa yang akan datang.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2021). Ringkasan eksekutif pengeluaran dan konsumsi penduduk Indonesia berdasarkan hasil Susenas Maret 2021.
- CIMICUS. (2020). Solidarity in the time of Covid-19: Civil society responses to the pandemic. Retrieved from https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/solidarity-in-the-time-of-covid-19_en.pdf
- English, M.D. (2021) The triple crisis: reevaluating socio-economic values in a period of social construction. In *Conflict Resolution after the Pandemic: Building Peace, Pursuing Justice*. Richard E. Rubenstein & Solon Simmons. Oxon: Routledge.
- De Deken, J.J., Ponds, E., and Van Riel, B. (2006) Social solidarity. In the *Oxford Handbook of Pensions and Retirement Income*. Gordon L. Clark, Alicia H. Munnell, & J. Michael Orszag (Eds). Oxford: Oxford University Press.
- Kemenko PMK. (2021, 19 Agustus). Pemerintah bangun gerakan solidaritas nasional penanganan Covid-19. Diambil dari <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-bangun-gerakan-solidaritas-nasional-penanganan-covid-19>
- Kompas TV. (25 Juni 2021). Penampakan tenda darurat RSUD Bekasi, pasien membludak. <https://www.kompas.tv/article/186938/penampakan-tenda-darurat-rsud-bekasi-pasien-membludak>
- Rahman-Shepherd, A., Clift, C., Ross, E., Hollman, L., van der Mark, N., Wakefield, B., Patel, C., & Yates, R (2021). Solidarity in response to the Covid-19 pandemic: Has the world worked together to tackle the coronavirus? Global Health Programme, Asia-Pacific Programme. Chatham House.
- Sousa, H. (28 April 2020). 'Daripada menunggu, melakukan apa yang bisa dilakukan': Solidaritas warga Indonesia saat pandemi Corona. ABC News. Diambil dari <https://www.abc.net.au/indonesian/2020-04-28/melawan-virus-corona-dengan-bergotong-royong/12190524>
- Sunita.(2021). Efektivitas dan keamanan plasma konvalesen sebagai terapi Covid-19. Alomedika. Diambil dari <https://www.alomedika.com/cme-efektivitas-dan-keamanan-plasma-konvalesen-sebagai-terapi-covid-19>
- Worldometer. (2021). Covid-19 Coronavirus pandemic (Last Updated: October 27,2021, 23:27 GMT) Retrieved from <https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries>. ■

PROFIL PENULIS

Deti Kusmalawati, S.I.P., M.A., Ph.D.

merupakan Staf Perencana Tingkat 1, Direktorat Kerja Sama Pendanaan Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas



Foto: freepik.com (repro)

PEMUDA DAN TEKNOLOGI, UPAYA MENANGGULANGI COVID-19

(STUDI KASUS : INDORELAWAN.ORG)

Oleh: Fera Diana

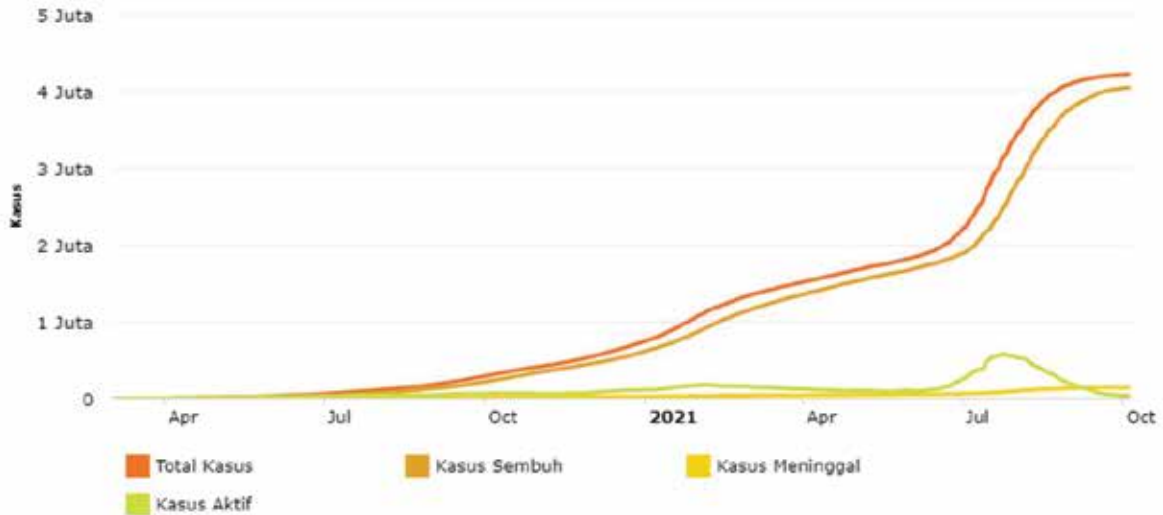
Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang disebabkan oleh virus sindrom pernafasan akut parah *Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* telah menjadi ancaman global karena peningkatan kasus penularan dan kematian yang terkonfirmasi di seluruh dunia dengan rentang waktu yang begitu cepat.

LATAR BELAKANG

Kondisi pandemi menyebabkan krisis pelayanan kesehatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menyebabkan gangguan besar terhadap semua aspek kehidupan di seluruh dunia. Para pemimpin politik di banyak negara telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi tingkat penularan sebagai upaya mengurangi tekanan pada sistem pelayanan kesehatan dan mencegah kasus kematian yang berlebihan. Sementara ketidakpastian epidemiologis tentang virus ini dan penyebaran tetap ada (Anderson et al,

2020). Pada 5 Oktober 2021, terdapat lebih dari 212 juta orang dari 217 negara terinfeksi kasus Covid-19, dan lebih dari 4,45 juta kematian dilaporkan karena virus ini (JHU CSSE Covid-19 Data dan Our World in Data, 2021).

Sementara di Indonesia juga disebutkan bahwa sejak pertama kali Covid-19 terdeteksi pada 2 Maret 2020 dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, hingga 5 Oktober 2021, terdapat sebanyak 4,22 juta warga Indonesia yang terinfeksi Covid-19 dan 142 ribu di antaranya meninggal dunia.



Perkembangan Kasus Covid-19 di Indonesia

Sumber: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam Fitra, 5 Oktober 2021

Gambar di atas menunjukkan tren perkembangan kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak 2 Maret 2020 hingga 5 Oktober 2021. Kasus penambahan Covid-19 tertinggi terjadi pada bulan Juli 2021 di mana pada tanggal 15 Juli 2021 sebanyak 56.767 kasus baru muncul dan pada tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 2.069 kasus kematian tercatat dalam 1 hari. Padahal tren tersebut secara bulanan sempat menunjukkan penurunan pada awal tahun 2021 hingga bulan April 2021, tetapi kemudian berbalik arah pada bulan berikutnya hingga puncaknya terjadi pada bulan Juli 2021. Angka ini disebabkan karena meningkatnya mobilitas dan aktivitas sosial masyarakat yang terjadi bersamaan dengan periode mudik Idulfitri. Mobilitas yang tinggi itu dibarengi dengan sikap abai terhadap protokol kesehatan (Saubani, 2021).

Walaupun pada bulan Oktober 2021 terlihat kasus Covid-19 di Indonesia sudah menunjukkan tren menurun, baik untuk kasus baru maupun kasus kematian, tetapi secara global menurut data dari Worldometer, pada 5 Oktober 2021, Indonesia masih menduduki peringkat 14 di dunia dengan kasus Covid-19 terbanyak. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang tepat untuk mengatasi isu ini mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat luas, bukan hanya pada sistem kesehatan yang ada, namun juga pada sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan sistem kesehatan yang dalam hal ini terdiri dari petugas kesehatan dan sarana prasarana kesehatan saja untuk mengatasinya, tetapi juga

harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam era digital saat ini, melalui suatu sistem teknologi dan informasi yang canggih, membuka kesempatan bagi partisipasi demokratis dan partisipasi komunitas untuk kreativitas, ekspresi diri, dan demi tak terbatasnya pengetahuan yang ada dapat mendukung keberagaman, perbedaan, dan debat yang sehat (Livingstone, 2002). Dengan banyaknya kegiatan dan institusi penting yang bergerak secara *online* melalui sistem ini, anak muda yang mempunyai peran sebagai agen perubahan berada pada posisi strategis dalam upaya mengurangi bahkan mengatasi kasus Covid-19. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh beberapa anak muda dengan menciptakan

suatu *platform* yang mampu menghubungkan lebih banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat untuk dapat terlibat dalam berbagai kegiatan bermakna yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan Covid-19. Salah satu *platform* yang dapat dijadikan percontohan adalah Indorelawan.org.

Indorelawan.org adalah organisasi nirlaba berbasis *online* yang mempertemukan komunitas sosial yang membutuhkan relawan dengan siapapun yang ingin menjadi relawan. Selama berdirinya, Indorelawan.org telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan banyak anak muda dan komunitas sosial dengan kepercayaan bahwa perubahan yang bermakna untuk Indonesia hanya akan dapat tercapai jika ada lebih banyak lagi orang yang terlibat dalam kegiatan komunitas sosial dan juga lebih banyaknya kolaborasi antar komunitas tersebut.

Dalam merespons kasus Covid-19 yang cukup masif di Indonesia, Indorelawan.org telah melakukan beberapa kegiatan sosial dan kolaborasi antar komunitas dalam upaya mengurangi dan mengatasi dampak dari Covid-19 yang ada di Indonesia, yaitu Program Bersatu Lawan Corona, Gerakan Masker Gratis, Gerakan Masker untuk Semua, Relawan Sentra Vaksinasi bersama Grab, Relawan Sentra Vaksinasi Senayan bersama Kementerian BUMN dan Generasi Bebas Covid-19 bersama Warga Bantu Warga. Indorelawan.org juga terus menyebarkan unggahan baik berupa informasi kasus pemulihan Covid-19 tanpa meremehkan keseriusan situasi sebagai upaya menjaga kesehatan mental masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi dan

ajakan untuk melakukan tindakan yang dapat mencegah penyebaran Covid-19 melalui media sosial resmi Indorelawan.org yang dapat diakses oleh semua orang dalam upaya merubah kebiasaan masyarakat dalam merespon kehidupan di saat pandemi untuk mencegah rantai penyebaran yang lebih luas lagi.

PERMASALAHAN DAN TUJUAN

Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak langkah-langkah dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan Covid-19. Namun, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 16.056 pulau, dengan populasi mencapai 270 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021), mengakibatkan Pemerintah Indonesia kesulitan dalam menuntaskan permasalahan pandemi ditambah lagi dampak yang ditimbulkannya sangat luas. Pemerintah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari anak muda sebagai agen perubahan untuk bersama-sama mengatasi dampak pandemi Covid-19 karena pemerintah sendiri memiliki keterbatasan, baik anggaran maupun sumber daya manusia.

Dimas Oky Nugroho dalam detikNews (2020) menyebutkan beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh generasi muda saat ini dan ke depan, salah satunya adalah ikut membangun *Nation Building* sehingga persatuan Indonesia menjadi lebih kokoh. Namun, dalam masa pandemi saat ini, pembatasan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan menjadi penghambat bagi anak muda untuk menjawab tantangan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Indorelawan.org hadir sebagai bentuk kreativitas anak muda yang berhasil

memanfaatkan teknologi yang erat kaitannya dengan kehidupan anak muda saat ini, untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat agar ikut serta dalam penanganan Covid-19 yang terjadi di Indonesia saat ini. Keberhasilan ini seharusnya dapat menjadi percontohan bagi anak muda lain untuk turut melakukan hal sama agar lebih banyak kegiatan yang dilakukan dan lebih banyak orang terlibat dalam upaya mengurangi dan mengatasi dampak dari Covid-19 yang ada di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana peran suatu *platform* bernama Indorelawan.org dalam meningkatkan solidaritas masyarakat untuk bergotong royong mengurangi dan mengatasi dampak dari Covid-19 yang ada di Indonesia.

PEMBAHASAN

Misi utama Indorelawan.org yakni ingin membuat kolaborasi antara relawan dengan organisasi/komunitas dengan misi sosial menjadi lebih mudah melalui *platform* Indorelawan.org. *Platform* tersebut menjadi jembatan bagi banyak orang yang ingin terlibat dalam berbagai aktivitas bermakna yang dikelola oleh beragam komunitas inspirasional yang menjadi mitra Indorelawan.org dan memfasilitasi proses kolaborasi antar komunitas untuk Indonesia yang lebih baik. Indorelawan.org ingin menjadikan kegiatan relawan sebagai gaya hidup. Dalam hal ini, menjadi relawan bukan lagi kegiatan sosial yang eksklusif tapi sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia.

Dalam upaya mengurangi dan mengatasi dampak dari Covid-19 yang ada di Indonesia, Indorelawan.org telah melakukan beberapa kegiatan dengan berkolaborasi bersama

banyak mitra yang pada akhirnya melibatkan lebih banyak orang dalam masing-masing kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagai berikut.

1. Bersatu Lawan Corona

Terhitung sejak 23 Maret hingga 30 November 2020, Indorelawan.org menginisiasi Program #BersatuLawanCorona sebagai bentuk respons terhadap peningkatan kasus positif Covid-19 di Indonesia dengan diterapkannya upaya pencegahan dari pemerintah berupa *social distancing* atau membatasi kontak langsung dengan orang lain dan bekerja dari rumah, tanpa menutup mata terhadap beberapa orang yang harus tetap bekerja atau tidak memiliki tempat tinggal yang terus-menerus terpapar dengan udara luar. Dengan demikian, kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat kecil, khususnya para individu dari sektor informal yang berpotensi kehilangan penghasilannya akibat Covid-19.

#BersatuLawanCorona menyasar kelompok masyarakat yang dianggap rentan dan berisiko untuk tertular Covid-19, meliputi pekerja sektor informal/tidak bekerja untuk institusi tertentu, individu yang tidak memiliki tempat tinggal dan lansia dalam kelompok miskin. Donasi yang terkumpul melalui #BersatuLawanCorona akan dialokasikan untuk sembako, paket makanan, suplemen dan paket kebersihan dimana barang-barang donasi tersebut dibeli dari warung-warung rakyat untuk mendukung keberlanjutan usaha mereka selama *social distancing*, yang cenderung telah mengurangi interaksi dan tingkat daya beli masyarakat.

Selain mengumpulkan donasi melalui kampanye #BersatuLawanCorona

pada *platform* Indorelawan.org, program ini juga berkolaborasi dengan beberapa pihak di antaranya yaitu, Indika Foundation, Yayasan Anak Bangsa Bisa, Alumni Aloysius Angkatan 1999, Alumni ITB Angkatan 2000, Sie Kerohanian Katolik BEM FK UNAIR, INTERACTIVE 2020 dari FK UI, Google Indonesia, Gerakan Karikatur Buruk, Tiger Sugar Indonesia dan 1.676 individu yang berdonasi melalui Kitabisa.com. Total keseluruhan donasi sebanyak Rp945.195.574,00 didistribusikan dalam bentuk paket donasi sebanyak 5.091 untuk 5.091 masyarakat kecil penerima manfaat atas kerjasama dengan 110 komunitas mitra Indorelawan.org di 27 provinsi dengan total 124 titik distribusi, di mana tiap-tiap komunitas melibatkan 4–5 relawan untuk membantu mendistribusikan paket donasi tersebut.

2. Gerakan Masker Gratis

Program Gerakan Masker Gratis ini dilakukan pada 18–26 April 2020. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Gerakan Masker Gratis (GEMAS) yang menyediakan sebanyak 1.400 masker kain untuk masyarakat umum yang didistribusikan oleh 14 komunitas mitra Indorelawan.org ke 14 titik wilayah di Indonesia, yaitu Jambi, Probolinggo, Palu (2 titik), Bandung (2 titik), Manado, Denpasar, Mimika, Malang, Medan, Surakarta, dan Samarinda.

3. Gerakan Masker Kain untuk Semua

Gerakan Masker Kain untuk Semua yang dilakukan pada 18 April–30 Mei 2020, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk membuat dan menggunakan masker kain dengan cara yang benar. Bukan berarti boleh keluar rumah, tetap di rumah merupakan hal yang paling utama.

Namun, apabila ada keperluan mendesak untuk keluar rumah, diperkenankan menggunakan masker kain untuk mencegah tertular/menularkan Covid-19. Gerakan ini berkolaborasi dengan Indika Foundation yang menyediakan 10.000 masker kain untuk masyarakat umum yang terlihat belum menggunakan masker dan didistribusikan oleh 44 komunitas di beberapa titik di wilayah Jabodetabek, di mana tiap-tiap komunitas terdiri dari 2–4 relawan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Selain membagikan masker, relawan juga mengedukasi penerima manfaat agar waspada terhadap penularan Covid-19, member ajakan/himbauan untuk mencuci tangan, menjaga kebersihan dan kesehatan keluarga mereka.

4. Relawan Sentra Vaksinasi Senayan bersama Kementerian BUMN

Program Sentra Vaksinasi Bersama diinisiasi oleh Kementerian BUMN dilaksanakan pada 7–31 Maret 2021. Indorelawan.org berperan dalam bentuk manajemen relawan yang meliputi perekrutan melalui *platform* Indorelawan.org dan briefing relawan terpilih. Sebanyak 136 relawan yang terpilih ditempatkan sebagai runner yang bertugas mengatur dan memberikan informasi mengenai alur peserta vaksinasi dan mendampingi para peserta terutama lansia di lokasi Sentra Vaksinasi pada tiga titik, yaitu JCC Senayan, Velodrome, dan Tangerang. Relawan akan berperan menjadi garda terdepan yang membantu percepatan vaksinasi di Indonesia.

5. Relawan Sentra Vaksinasi bersama Grab

Tak jauh berbeda dengan yang telah dilakukan oleh Kementerian

BUMN, Grab bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan juga membangun Program Sentra Vaksinasi Bersama. Indorelawan.org berperan dalam bentuk manajemen relawan yang meliputi perekrutan melalui platform Indorelawan.org dan *briefing* relawan terpilih. Sebanyak lebih dari 400 relawan yang terpilih ditempatkan di beberapa titik penempatan di antaranya Pekanbaru, Medan, Batam, Palembang dan Samarinda sebagai *runner* dan *liaison officer* (LO) lansia yang akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

6. Generasi Bebas Covid-19 x Warga Bantu Warga

Adanya pertambahan angka kasus Covid-19 pasca Idulfitri disertai dengan kesulitan mencari rumah sakit, oksigen, donor konvalesen atau permasalahan lain yang terdampak dari pandemi Covid-19 perlu menjadi perhatian kita bersama. Sementara itu, informasi bantuan dari warga untuk warga kian berseliweran tanpa ada wadah yang menampungnya menjadi satu. Untuk itu, dibentuklah gerakan warga bantu warga yang merupakan hasil kolaborasi antara Indorelawan.org, Kitabisa.com, LaporCovid19, KawalCOVID19, Pandemic Talks, Forum Indonesia Muda, Forum Zakat, Badan Amil Zakat Nasional, Kata.ai, Pemimpin.id. Tak hanya itu, turut berkolaborasi juga Filantropi Indonesia, Human Initiative Volunteer Energy, Narasi, Qiscus Humanitarian Forum Indonesia, Urundayacovid.com, serta Serikat Buruh Migran Indonesia.

Indorelawan.org berperan dalam bentuk manajemen relawan yang meliputi perekrutan melalui *platform* Indorelawan.org dan *briefing* relawan terpilih. Sebanyak 4.085 relawan yang terpilih bertugas sebagai relawan cepat tanggap yang memiliki

beberapa posisi pekerjaan, seperti relawan untuk mengelola *database* *wargabantuwarga.com*, *data collector* IGD RS, oksigen di RS, lokasi vaksinasi, relawan verifikator data penerima manfaat bantuan, dan lain-lain.

REKOMENDASI

Melihat keberhasilan Indorelawan.org dalam menjembatani mereka yang membutuhkan orang-orang baik dengan mereka yang ingin mengubah niat baik menjadi aksi baik, terutama dalam penanganan pandemi saat ini, hanya dengan satu *platform* yang dikelola oleh anak-anak muda yang telah memanfaatkan teknologi dengan baik, sudah seharusnya Indorelawan.org menjadi percontohan bagi anak-anak muda lainnya dalam mewujudkan perannya sebagai agen perubahan. Untuk mendukung hal tersebut, dapat dilakukan dengan:

- memberikan apresiasi untuk komunitas seperti Indorelawan.org yang telah berperan banyak mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama dalam penanganan pandemi, yang dapat menjadi trigger bagi komunitas-komunitas lain untuk melakukan hal baik yang serupa; dan
- memberikan bimbingan bagi komunitas-komunitas lain untuk lebih bisa memanfaatkan teknologi bagi program-program yang akan mereka laksanakan.

DAFTAR BACAAN

Anderson, Roy, Hans Heesterbeek, Don Klinkenberg, and Déirdre Hollingsworth. 2020. "How will country-based mitigation measures influence the course of the covid-19 epidemic?" *The Lancet* 395 (10228), 931-934.

Badan Pusat Statistik. 2021. *Statistik Indonesia 2021*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

detikNews. 05 November 2020.

"Anak Muda Diajak Bangun Kompetensi & Solidaritas di Masa Pandemi". <https://news.detik.com/berita/d-5243270/anak-muda-diajak-bangun-kompetensi-solidaritas-di-masa-pandemi>. Diakses 10 Oktober 2021.

Fitra, Safrezi . "Perkembangan Covid-19 di Indonesia: Total Kasus Capai 4.221.610 Kasus (Selasa, 5/10)". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/05/perkembangan-covid-19-di-indonesia-total-kasus-capai-4221610-kasus-selasa-5-10>. Diakses 05 Oktober 2021.

Livingstone, Sonia. 2002. *Young People Media*. London: Sage Publications.

Saubani, Andri. 21 Setember 2021. "Lonjakan Kasus Covid-19 pada Juli dipicu Faktor Dalam Negeri". <https://www.republika.co.id/berita/qzsd8n409/lonjakan-kasus-covid19-pada-juli-dipicu-faktor-dalam-negeri>. Diakses 05 Oktober 2021.

JHU CSSE COVID-19 Data dan Our World in Data, "Case Overview". <https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19>. Diakses 05 Oktober 2021. ■

PROFIL PENULIS

Fera Diana merupakan Fungsional Perencana Ahli Pertama di Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo.

PRAKTIK BAIK SEBAGAI BENTUK SOLIDARITAS SOSIAL MASYARAKAT

DALAM MENGHADAPI COVID-19

Oleh: Feradis

Foto: freepik.com



Virus Corona atau Covid-19 sudah tidak asing lagi di telinga rakyat Indonesia bahkan masyarakat dunia. Setiap hari terdengar informasi terkait Covid-19. Apalagi di awal virus ini merebak di Kota Wuhan, Republik Rakyat Cina, Covid-19 seolah-olah menjadi malaikat pencabut nyawa yang mengerikan yang merenggut hidup orang banyak.

PENDAHULUAN

Hampir setiap saat didapatkan informasi orang meninggal terinfeksi Covid-19 dari media, baik cetak, *online*, maupun televisi. Virus ini menyerang dengan sangat menakutkan, terlihat di layar televisi orang yang sedang berjalan maupun sedang berdiri di suatu tempat langsung roboh tak bernyawa. Begitu menakutkan virus ini.

Covid-19 masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret 2020, sebagaimana laporan Pranita (2020), untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. Namun, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia

(UI), Pandu Riono, menyebutkan virus Corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari.

PERMASALAHAN DAN TUJUAN

Dari sekian banyak kerugian yang disebabkan musibah pandemi Covid-19, kerugian yang teramat besar adalah terenggutnya nyawa banyak orang, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Sesuai peta sebaran Covid-19 di Indonesia, situasi Covid-19 hingga 24 Oktober 2021, jumlah terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 4.239.396 kasus, kasus aktif sebanyak 14.803 kasus (0,3%), pasien sembuh sebanyak 4.081.417 orang (96,3%), pasien meninggal (positif Covid-19) sebanyak 143.176

orang (3,4%), total spesimen yang diperiksa 44.830.998 spesimen dan total orang yang diperiksa sebanyak 29.993.954 orang. Sementara itu, sesuai dengan laporan *World Health Organization* (WHO), kondisi hingga 22 Oktober 2021, untuk seluruh dunia pasien terkonfirmasi kasus Covid-19 sebanyak 242.348.657 orang termasuk pasien meninggal sebanyak 4.927.723 orang.

Hal lain yang disebabkan Covid-19, yaitu gangguan terhadap perekonomian global termasuk Indonesia. Penurunan pertumbuhan ekonomi bahkan mencapai nilai negatif. Sebagaimana yang dilaporkan Hanoatubun (2020), dampak pada sektor ekonomi pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia, antara lain terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Hasil data yang didapat yaitu $\geq 1,5$ juta pekerja dirumahkan dan terkena PHK, dengan sebaran 90% pekerja dirumahkan dan pekerja yang di PHK sebesar 10%. Dampak yang terjadi berikutnya adalah penurunan PMI Manufacturing Indonesia mencapai 45,3% pada Maret 2020.

Bagi para pekerja yang di PHK maka akan mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan baru dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena tidak mempunyai penghasilan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan praktik baik yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk solidaritas sosial terhadap sesama pada saat pandemi Covid-19.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Hampir tiga tahun kita hidup bersama Covid-19. Mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan kondisi yang diakibatkannya, baik kerugian maupun hikmah yang terkandung di dalamnya. Bagi masyarakat yang tidak terlalu terdampak oleh pandemi Covid-19, memiliki peluang untuk berbuat baik mampu meringankan beban yang dihadapi sebagian masyarakat yang terdampak langsung pandemi Covid-19, terutama yang terkena PHK ataupun yang terinfeksi Covid-19.

Berikut ini beberapa praktik baik sederhana yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk solidaritas sosial terhadap sesama di saat pandemi Covid-19.

1. Berikan kebahagiaan

Berikan kebahagiaan merupakan salah satu program kerja yang dilaksanakan oleh *Berikan Protein Initiative*. Program ini merupakan pemberian makanan berkualitas berprotein tinggi untuk anak-anak pra sejahtera yang rawan masalah kekurangan gizi protein. Selama pandemi Covid-19, terdapat banyak anak yang terdampak dan tidak dapat memenuhi kebutuhan protein bahkan kebutuhan pangannya sebagai akibat orang tua mereka yang di PHK. Dengan adanya program berikan kebahagiaan ini, sebagian anak-anak terutama anak-anak prasejahtera mendapatkan makanan yang berkualitas.

Berikan Protein Initiative merupakan gerakan yang berfokus untuk membudayakan gaya hidup sadar protein ikan bagi masyarakat untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang cerdas, sehat, dan berdaya.

Misi mereka mencakup peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui fortifikasi produk makanan minuman dengan kandungan protein tinggi, pemberdayaan kader posyandu, penyuluhan wawasan protein ikan di tingkat sekolah dan pemberian akses modal dan pasar untuk meningkatkan inovasi anak bangsa.

Protein merupakan zat gizi yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Primasoni (2012), yang menyatakan bahwa protein merupakan zat gizi kunci untuk pertumbuhan fisik anak karena sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang dan otot. Sejalan dengan manfaat protein sebagai zat gizi yang berperan dalam pertumbuhan, perkembangan, maka dibutuhkan 15%–20% protein dari total kebutuhan atau keluaran per hari. Oleh karena itu, anak usia dini perlu memperhatikan makanan yang dikonsumsi untuk kebutuhannya.

2. Memberi makan kaum duafa

Program ini dilaksanakan dengan memberikan makanan kepada kaum duafa setiap hari Jumat dengan semboyan *Jumat Berbagi, Jumat Berkah*. Sasaran *Jumat Berbagi, Jumat Berkah* adalah kaum duafa yang ditemui di sepanjang jalan protokol serta panti-panti asuhan dan panti jompo. Bantuan yang diberikan dalam bentuk bingkisan makanan berupa nasi lengkap dengan lauk pauknya. Program ini merupakan program kerja MiMe Kitchen, yaitu sebuah usaha kuliner yang beralamat di Kota Pekanbaru Riau.

3. Gerakan Beras Yatim (Gerastim)

Program ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan beras kepada anak yatim. Jumlah anak yatim yang disantuni melalui program ini hingga mencapai 1.000 orang dengan jumlah beras yang dibutuhkan mencapai 5 ton. Program ini merupakan salah satu program kerja yang dilaksanakan Yayasan Mubarakah Yatama Peduli yang didirikan pada tahun 2020 yang beralamat di Kota Padang Sumatera Barat.

Selain Gerastim, Yayasan Mubarakah Yatama Peduli juga melaksanakan program *Kesehatan Gratis Yatim (Segratim)*. Program ini dilaksanakan dengan memberikan pelayanan berobat gratis bagi anak yatim. Anak yatim yang telah memiliki kartu berobat gratis dari Yayasan Mubarakah Yatama Peduli, dapat berobat gratis di klinik yang telah bekerja sama dengan yayasan, yaitu Klinik dr. Betty Hijrah, Sp.A., M. Biomed. yang beralamat di Jalan Raya Gadut, Simpang Vila Blok B Komplek Universitas Andalas-Simpang Villa, Sumatera Barat.

4. Berbuat baik dengan tetangga

Tetangga merupakan orang yang rumahnya dekat dengan kita atau penghuni yang tinggal di sekeliling rumah kita. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk tetangga, seperti berbagi makanan dengan tetangga yang susah, melebihkan masakan dan diserahkan kepada tetangga, atau berbagi buah atau sayuran yang dipanen dari kebun atau halaman rumah kita.

Memberikan bantuan kepada tetangga yang terinfeksi Covid-19 seperti kiriman makanan bagi

mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah akan sangat membantu. Bantuan yang diberikan pada masa-masa sulit akan dirasakan sangat bermanfaat bagi tetangga.

5. Berbagi masker

Selama pandemi, pemerintah mengimbau seluruh warga negara untuk mengikuti dan melaksanakan protokol kesehatan (prokes). Hal ini untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus positif Covid-19. Salah satu prokes yaitu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Untuk mendukung pelaksanaan prokes, sangat banyak pihak-pihak baik perorangan maupun lembaga menggelar gerakan inovatif untuk ikut berpartisipasi menyumbangkan masker. Masker tersebut distribusikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, baik dibagi-bagikan di persimpangan jalan raya maupun diserahkan kepada rumah sakit, panti asuhanc, dan sekolah-sekolah.

6. Membantu tim medis

Saat pandemi Covid-19 merebak, sangat banyak dibutuhkan tenaga, baik tenaga kesehatan maupun non-kesehatan. Mengingat banyaknya jatuh korban yang disebabkan Covid-19 maka tenaga yang tersedia tidak cukup untuk melayani seluruh pasien. Oleh sebab itu, dibutuhkan tenaga sukarelawan untuk membantu semua aktivitas yang berhubungan dengan Covid-19, seperti tenaga kesehatan dokter dan perawat, tenaga non-kesehatan seperti tenaga administrasi di rumah sakit atau fasilitas kesehatan sampai tenaga supir ambulans dan penggali kuburan. Menjadi sukarelawan untuk membantu meringankan pekerjaan tenaga

kesehatan adalah kesempatan baik untuk berpartisipasi sebagai bentuk solidaritas kepada sesama pada masa pandemi.

7. Memberikan sumbangan untuk kelengkapan tenaga medis

Untuk menangani pasien Covid-19, tenaga kesehatan membutuhkan sarana dan prasarana dengan jumlah yang sangat banyak dan harga yang cukup mahal, seperti pakaian pelindung sampai dengan ventilator. Sarana prasarana yang tersedia di rumah sakit atau fasilitas kesehatan tidak mencukupi untuk melayani seluruh pasien Covid-19, terutama pada masa puncak. Untuk itu, dibutuhkan uluran tangan setiap warga negara membantu penyediaan sarana dan parasarana tersebut.

8. Menjadi *influencer*

Untuk mengajak masyarakat melaksanakan prokes dalam menghadapi Covid-19 tidaklah mudah. Imbauan bahkan aturan sudah dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan prokes, tetapi masih terdapat masyarakat yang tidak mengindahkan imbauan ataupun aturan tersebut. Untuk itu, dibutuhkan seseorang yang dapat memengaruhi dan menggerakkan hati semua orang untuk melaksanakan prokes sehingga tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19.

9. Tidak menyebarkan berita hoaks

Hoaks adalah berita bohong yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya yang disebarkan oleh oknum yang sengaja membuat masyarakat resah. Berita hoaks terkait Covid-19 sungguh meresahkan. Jika berita

hoaks dipercaya oleh masyarakat luas, maka akan berdampak yang sangat luar biasa baik berupa dampak sosial, ekonomi, politik, keamanan dan yang lebih besar adalah bisa mengancam keutuhan negara.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, total isu hoaks terkait Covid-19 sebanyak 1.470 berdasarkan data per 10 Maret 2021. Lebih lanjut dijelaskan bahwa angka total tersebut, merupakan kumpulan isu hoaks Covid-19 dari 23 Januari 2020 sampai 10 Maret 2021. Isu hoaks tersebut tersebar sebanyak 2.697 di media sosial, paling banyak di platform Facebook dan Twitter (CNN Indonesia, 2021).

Beberapa praktik baik tersebut, telah memberikan dampak yang cukup baik terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 ataupun terhadap penanganan kasus Covid-19 di tanah air, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, peran serta masyarakat dalam penanganan Covid-19 sangat dibutuhkan, karena tanpa keikutsertaan masyarakat maka sangat sulit untuk keluar dari masalah pandemi Covid-19 ini.

REKOMENDASI

Masyarakat memiliki peran penting dalam menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari beberapa praktik baik yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama disaat pandemi Covid-19 yang dapat meringankan beban bagi yang terdampak. Untuk meningkatkan peran masyarakat tersebut, dapat dilakukan beberapa hal di antaranya sebagai berikut.



1. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam meringankan beban pemerintah selama pandemi Covid-19.
2. Dalam penyaluran bantuan yang dilaksanakan masyarakat, perlu dikoordinasikan sehingga bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih dan dapat disebarakan secara merata bagi pihak yang membutuhkan.
3. Praktik baik yang dilakukan masyarakat perlu disebarakan dan ditularkan kepada masyarakat lainnya sehingga terinspirasi untuk melakukan hal yang sama dalam meningkatkan solidaritas sosial menuju Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh.

REFERENSI

- CNN Indonesia. 2021. Ada 1.470 Hoax Covid-19 Hingga Maret, Terbanyak di Facebook. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210312163857-185-616809/ada-1470-hoax-covid-19-hingga-maret-terbanyak-di-facebook>. Diakses 24 Oktober 2021. 08.14 WIB.
- Hanoatubun, S. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Prekonomian Indonesia. *Journal of Education,*

Psychology and Counseling. Vol 2 No 1. <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsyscouns/article/view/423>. Diakses 24 Oktober 2021. 08.20 WIB.

Peta Sebaran Covid-19 di Indonesia. <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>. Diakses 24 Oktober 2021. 08.10 WIB.

Pranita, E. 2020. Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari?page=all>. Diakses 24 Oktober 2021. 08.00 WIB.

Primasoni, N. 2021. Manfaat Protein untuk Mendukung Aktifitas Olahraga, Pertumbuhan, dan Perkembangan Anak Usia Dini. Fakultas Ilmu Olahraga, Universitas Negeri Yogyakarta.

World Health Organization. 2021. WHO Coronavirus (Covid-19) Dashboard. <https://covid19.who.int/>. Diakses 24 Oktober 2021. 08.15 WIB. ■

PROFIL PENULIS

Dr. Ir. Feradis, M.P. merupakan Fungsional Perencana Ahli Madya di Bappedalitbang Provinsi Riau.



PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA

Oleh: Budhi Santoso

Menyadari bahwa tahun 2021 pandemi akan semakin membahayakan maka pemerintah memberi perhatian serius untuk menanggulangnya dengan kebijakan alokasi APBN yang memadai.

PENDAHULUAN

Pada saat acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/11/2020), Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa anggaran belanja negara dalam APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun masih difokuskan untuk penanganan Covid-19, baik di sektor kesehatan maupun ekonomi¹. Dalam APBN 2021 tersebut, pemerintah fokus pada kesehatan dan penanganan

1 <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/25/11362261/jokowi-sebut-apbn-2021-difokuskan-untuk-penanganan-covid-19>
Diakses tanggal 19 November 2021.

Covid-19 khususnya vaksinasi sebagai *game changer* kembali *on track*-nya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan penanggulangan Covid-19. Pemerintah juga fokus pada perlindungan sosial karena banyak masyarakat kurang mampu terdampak perekonomiannya karena Covid-19. Kebijakan pemerintah untuk menangani Covid -19 ini adalah anggaran sebagai instrumen fiskal yang harus tetap dikelola untuk

menekan dampak jangka panjang. Dari segi ekonomi, kebijakan pemerintah tidak terbatas pada penanganan pandemi tetapi termasuk memastikan terpenuhinya kecukupan pangan dan menggerakkan kembali perekonomian yang melambat².

Untuk mengatasi masalah terkait penanganan pandemi, perlu mengajak seluruh pemangku kepentingan dan warga negara untuk berkontribusi dan mendukung langkah pemerintah sebagai modal sosial. Kecepatan penanganan pandemi tidak hanya didukung oleh vaksinasi dan fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah, tetapi juga di dukung oleh modal sosial. Tanpa adanya dukungan modal sosial maka percepatan pencegahan pandemi dan pemulihan ekonomi akan mendapat tantangan yang cukup berat. Sebagai contoh, guna mendukung pemerintah mempercepat penanganan pandemi, modal sosial dibentuk melalui gerakan masyarakat yang tidak hanya terkait kesehatan, tetapi juga ekonomi melalui gerakan jogo tonggo di Jawa Tengah.

Oleh OECD³, modal sosial didefinisikan sebagai jaringan bersama dengan norma, nilai, dan pemahaman bersama yang memfasilitasi kerja sama di dalam atau di antara kelompok masyarakat. Dalam definisi ini, jaringan masyarakat dinilai mempunyai hubungan nyata antara kelompok atau individu, yaitu jaringan teman, jaringan keluarga, jaringan mantan rekan kerja, dan sebagainya. Pengertian norma, nilai, dan pemahaman bersama dalam definisi OECD ini mengacu pada kinerja yang dihasilkan oleh adanya jaringan sosial tersebut. Dalam pandangan sosiologi, norma adalah milik masyarakat berupa aturan yang tidak diucapkan dan dilaksanakan

tanpa pertanyaan lagi mengapa aturan tersebut dilaksanakan. Sebagai contoh, jika orang dewasa menyerang seorang anak maka hal tersebut dinilai sebagai melanggar norma-norma yang melindungi anak-anak dari bahaya. Nilai mungkin lebih terbuka untuk dipertanyakan daripada norma yang mana masyarakat sering berdebat apakah nilai-nilai mereka berubah. Namun nilai –seperti menghormati keselamatan dan keamanan masyarakat– merupakan kunci utama dalam setiap kegiatan sosial kelompok. Secara bersama-sama, jaringan dan pemahaman ini menghasilkan kepercayaan dan dengan demikian memungkinkan orang untuk bekerja sama, misalnya dalam percepatan penanganan pandemi akibat Covid-19 di Indonesia.

Mengacu pada definisi OECD tersebut di atas maka modal sosial adalah norma informal yang dipakai untuk mendorong kerja sama antara dua atau lebih individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Norma-norma yang membentuk modal sosial tersebut dapat berkisar dari norma sederhana timbal balik antara dua sahabat, sampai ke yang rumit seperti kesamaan doktrin-doktrin tertentu. Pada dasarnya modal sosial terbentuk atas dasar hubungan sesama manusia, norma timbal balik yang dalam konteks sederhana adalah adanya suatu potensi modal yang bermanfaat yang ditimbulkan dari hubungan seseorang dengan orang lain. Dengan penjelasan ini, atas dasar kesamaan kepercayaan atau keyakinan, dalam satu jaringan masyarakat sipil, dan sebagainya dapat dimanfaatkan sebagai modal sosial untuk mencapai tujuan tertentu atau memecahkan suatu masalah hubungan sosial kemasyarakatan.

PERMASALAHAN DAN TUJUAN

Mungkin alasan bahwa modal sosial tampaknya kurang jelas sebagai barang sosial daripada modal fisik adalah karena cenderung menghasilkan eksternalitas negatif daripada eksternalitas positif. Ini karena solidaritas kelompok dalam komunitas sering kali dibeli dengan harga permusuhan terhadap yang di luar kelompok. tampaknya ada kecenderungan alami manusia untuk membagi dunia menjadi teman dan musuh yang merupakan dasar dari semua politik. Dengan demikian, sangat penting ketika mengukur modal sosial untuk mempertimbangkan utilitas eksternalitas positifnya. Dalam tulisan ini menyampaikan bahwa modal sosial dalam konteks eksternalitas positif sangat penting untuk berfungsinya peran modal sosial untuk penanggulangan pandemi Covid-19 secara efisien, dan merupakan *sine qua non* dari masyarakat gotong royong yang stabil. Timbulnya modal sosial karena merupakan komponen budaya masyarakat Indonesia modern, yang berkembang di luar lembaga formal, aturan hukum, dan rasionalitas. Membangun modal sosial melawan pandemi dapat dilihat sebagai tugas bersama; yang bentuknya bukan seperti kebijakan pemerintah atau bahkan program yang didesain oleh kementerian/lembaga pemerintah, karena pada dasarnya modal sosial tidak dengan mudah diciptakan atau dibentuk oleh kebijakan publik. Meskipun demikian, untuk kasus penanggulangan pandemi Covid-19 di Jawa Tengah maka kebijakan pemerintah daerah ternyata dapat mendorong timbulnya modal sosial⁴.

4 Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meluncurkan gerakan "Jogo Tonggo". Gerakan yang dibuat untuk saling menjaga tetangga saat Pandemi COVID-19. Konsep *jogo tonggo* ini efektif menggugah kepedulian sesama warga pada masa pandemi di level rukun wilayah untuk meredam dampak penyebaran Covid-19 dalam skala komunitas.

2 <https://www.kemenkeu.go.id/covid19>

3 <https://www.oecd.org/insights>

Pembentukan modal sosial menanggapi pandemi di beberapa daerah di Indonesia seperti di Jawa Tengah dan Jogjakarta dapat dikaitkan dengan konsep "jari-jari kepercayaan". Kelompok masyarakat Jawa Tengah dengan *jogo tonggo* dan Jogjakarta dengan *sonjo* serta *cantelan sembako* di berbagai daerah di Indonesia berhasil mewujudkan modal sosial karena berada dalam satu radius kepercayaan tertentu, yaitu lingkaran orang-orang yang di antara mereka mempunyai norma-norma kooperatif tertentu. Dalam hal ini, jika modal sosial suatu kelompok (seperti *jogo tonggo*, *sonjo*, dan *cantelan sembako*) terbukti menghasilkan eksternalitas positif karena berhasil mendukung menurunnya penularan Covid-19 di suatu daerah maka radius kepercayaan bisa melebar ke yang lebih besar daripada yang berawal mula dari kelompok itu sendiri. Mungkin radius kepercayaan dimulai dalam jaringan yang lebih kecil daripada keanggotaan kelompok. Sebagai contoh, jaringan melebar dalam organisasi besar UGM yang semula mendorong norma-norma kerja sama hanya di antara pimpinan kelompok atau staf tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis saja. Modal sosial masyarakat modern Indonesia dapat dikembangkan dari serangkaian jari-jari kepercayaan yang konsentris dan berbagai bentuk, berkisar dari antarteman sampai ke pembentukan kelompok misal melalui LSM dan kelompok keyakinan.

Pertanyaan yang dihadapi ketika mendefinisikan peran modal sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 adalah apakah semua bentuk kelompok sosial budaya tradisional seperti suku, klan, asosiasi di desa dan kota, dan sekte keyakinan mempunyai norma

bersama dan menggunakannya untuk mencapai tujuan bersama ketika menghadapi bencana seperti pandemi ini? Berbagai literatur tentang pembangunan belum secara jelas memastikan modal sosial sebagai aset pembangunan. Pandangan atas modal sosial sejauh ini biasanya masih dianggap sebagai kewajiban oleh masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan bukan dorongan modal sosial. Modernisasi ekonomi dapat dipandang sebagai antitesis terhadap modal sosial, dalam hal ini terhadap budaya tradisional dan organisasi sosial, yang dinilai justru menghalang-halangi pembangunan. Meskipun demikian dengan adanya bukti keberhasilan *jogo tonggo*, *sonjo*, dan *cantelan sembako* maka pandangan seperti ini perlu dihilangkan karena modal sosial pada dasarnya merupakan suatu bentuk modal untuk mencapai satu tujuan pembangunan tertentu, yaitu penanggulangan pandemi dan pertahanan ekonomi rakyat.

Dalam skala global, modal sosial ditunjukkan dengan bantuan-bantuan hibah antarnegara kepada negara yang sedang ditimpa bencana. Terkait dengan pandemi Covid-19 yang telah terjadi hampir di semua negara, juga melahirkan sikap solidaritas dan kolaborasi antarnegara sebagai bentuk modal sosial skala global. Hibah vaksin dari negara sahabat sangat besar manfaatnya untuk mempercepat upaya vaksinasi di Indonesia. Sebaliknya saat India dilanda Covid-19 gelombang kedua, pemerintah Indonesia membantu peralatan medis dan oksigen ke India. Demikian juga saat Indonesia dilanda amukan gelombang kedua, China, Singapore, AS, Uni Emirat Arab, Australia dan negara-negara lain juga ikut bahu membahu

membantu Indonesia. Dalam tulisan ini membahas bagaimana modal sosial bekerja untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 dan ketahanan ekonomi rakyat di beberapa daerah di Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam skala mikro atau skala individu, sebagai contoh, modal sosial timbul saat dalam suatu rumah tangga ada anggota keluarga terinfeksi Covid-19 maka sesuai ketentuan penanganannya keluarga tersebut perlu di isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari. Untuk itu modal sosial yang timbul adalah inisiatif membantu keluarga tersebut dengan penyediaan makanan atau kebutuhan untuk memasak seperti beras, sayur dan bahan lauk pauk. Atau setidaknya membantu membelikan makanan yang diinginkan keluarga yang sedang menjalani isolasi tersebut. Contoh lain adalah adanya saling mengingatkan antarindividu untuk menjaga protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak dan memakai masker ketika berada di lingkungan keramaian seperti toko bahan kebutuhan pokok atau kantor pelayanan publik. Dalam skala komunitas maka modal sosial digunakan untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi rakyatnya telah dilakukan di beberapa daerah yaitu gerakan *cantelan sembako*, dan daerah tertentu yaitu di Jawa Tengah dengan gerakan *jogo tonggo* dan di Jogjakarta dengan gerakan *sonjo*.

1. *Cantelan Sembako*

Gerakan *cantelan sembako* mengadaptasi budaya masyarakat Jawa zaman dulu yang menyediakan air kendi di depan rumah. Siapa saja yang haus, dapat meminum air dalam kendi tanah yang tersedia di pagar depan rumah. Jika gerakan

ini dilakukan bersama-sama maka dapat membantu pemerintah menjaga ketahanan ekonomi rakyat (di antara warga yang tidak mampu) dalam suatu komunitas. Dengan *cantelan sembako* yang ditaruh di pagar rumah, selain dapat memenuhi kebutuhan warga yang kurang beruntung, pada dasarnya juga dapat menumbuhkembangkan kejujuran dan keadilan sosial dengan memungut sesuai yang dibutuhkan saja. Gerakan sosial *cantelan sembako* dilakukan oleh warga di Kediri, Jawa Timur, dengan menempatkan tas plastik kresek berisikan sayur, telur, singkong, beras, mi instan di pagar depan rumah sebagaimana sebetulnya juga dilakukan di banyak daerah lainnya. Mereka mendermakan rezeki dan berbagi ke sesama tanpa memandang latar belakang siapa yang mengambilnya. Cukup dengan tulisan yang terpampang di pagar: "Ambil Seperlunya"⁵.

Di skala perorangan dan tingkat komunal, sejak awal pandemi telah timbul rasa kemanusiaan untuk membantu warga lain yang terdampak Covid. Tanpa mendapat arahan dan instruksi dari pejabat, warga dengan caranya sendiri membantu dengan sporadis pada semua lapisan masyarakat yang mengalami dampak Covid-19 berbeda-beda. Namun, rasa solidaritas sosial seperti *cantelan sembako* tersebut di atas adalah pengaruh dari adat istiadat dan budaya yang ada yang kemudian dibangkitkan dengan beragam cara. Salah satu caranya dengan menambatkan cantelan plastik kresek berisi bahan makanan untuk warga yang membutuhkan tersebut di atas. Satu cantelan tas plastik kresek sangat

5 <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/19/145548265/cantelan-sembako-simbol-solidaritas-masyarakat-indonesia-di-tengah-pandemi?page=all>. Diakses tanggal 20 November 2021.

membantu warga yang kehilangan mata pencahariannya, walau mungkin hanya bisa membantu kebutuhan untuk sekali makan. Akan tetapi, jika jutaan warga yang terlibat menggelar *cantelan sembako* secara masif maka akan ada jutaan warga yang tertolong.

2. Jogo Tonggo

Terkait kebijakan yang diterapkan untuk menekan laju penyebaran Covid-19, kebijakan *lockdown* banyak diterapkan di berbagai negara. Pemerintah Indonesia melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, ketentuan ini menimbulkan kekhawatiran atas dampak perekonomian yang besar bagi masyarakat, yaitu dikhawatirkan ekonomi masyarakat terpuruk. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Jawa Tengah memutuskan untuk melakukan inovasi kebijakan pembatasan non-PSBB yang melibatkan masyarakat yaitu dinamakan *jogo tonggo*. Modal sosial *jogo tonggo* ini didorong untuk muncul di masyarakat karena semakin terkikisnya kegotongroyongan warga karena modernisasi. Dalam praktiknya, upaya terbentuknya modal sosial ini mendapat dukungan warga Jawa Tengah yang mana rasa kepeduliannya saling memperhatikan warga yang lain masih tinggi⁶. Meskipun program ini dibuat untuk mengurangi penyebaran Covid-19, tetapi program ini juga berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang dikenal sebagai SDGs. Secara langsung, program ini berkontribusi pada pencapaian TPB 2 (Tanpa Kelaparan) dan TPB 3 (Kesehatan). Selain itu, program

6 <https://jatengprov.go.id/rilis/percepat-tangani-covid-19-dengan-jogo-tonggo-apa-itu/>. Diakses tanggal 18 November 2021.

ini juga secara tidak langsung berkontribusi pada pencapaian TPB 10, TPB 11 terkait Kota dan Pemukiman Berkelanjutan (terutama target 11.3 dan 11.5), dan TPB 17 (terutama dengan tingginya partisipasi berbagai pihak dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19).

Jogo tonggo, yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti "jaga tetangga", merupakan gerakan untuk saling menjaga antartetangga, saling bahu membahu dan bergotong royong dalam menghadapi pandemi Covid-19⁷. Melalui program ini, Pemerintah Jawa Tengah menghadapi pandemi Covid-19, tetapi dengan tetap menjaga kearifan lokal. Selain itu, program ini juga menuntut adanya peran serta aktif masyarakat untuk berpartisipasi sebagai anggota

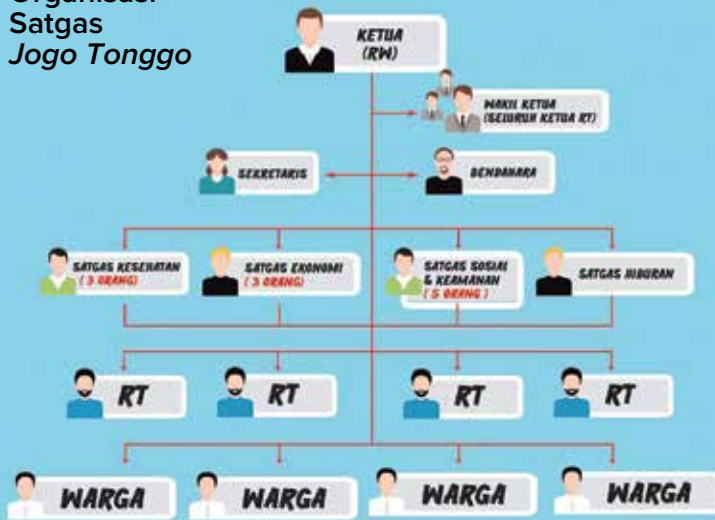
Masyarakat yang tergabung dalam program *jogo tonggo* berasal dari berbagai organisasi dan sektor berbeda seperti Karang Taruna, Dasa Wisma, Satlinmas, Posyandu, bidan desa, pendamping desa, Gapoktan, PPL, dan organisasi/pihak terkait lainnya.

Program yang hanya dilaksanakan di Jawa Tengah ini memiliki skala daerah⁸, yang menjadi bagian dari PSBB yang berskala nasional dan diterapkan di seluruh provinsi atau kabupaten/kota. Ciri khas *jogo tonggo* adalah gerakan ini

7 <https://localisedsgs-indonesia.org/beranda/cs/program-jogo-tonggo>. Diakses tanggal 18 November 2021.

8 Pada pelaksanaannya, *jogo tonggo* mencakup dua hal, yaitu jaring pengaman sosial dan keamanan serta jaring ekonomi. Satuan Tugas *Jogo Tonggo* ditempatkan di setiap RW. Satgas ini dibuat untuk menjaga dan melakukan pemantauan kepada tetangga masing-masing. Tugas anggota gerakan ini juga memastikan bantuan dan dukungan dari luar wilayah yang masuk ke daerahnya tepat sasaran dan tepat guna (Sumber: Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Berbasis Masyarakat di Tingkat RW/ Pemda Jateng).

Struktur Organisasi Satgas Jogo Tonggo



Sumber: Pemda Jateng, 2020

dilakukan pada tingkat rukun warga (RW) dengan ketua RW sebagai ketua Satuan Tugas (Satgas). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa semakin kecil ruang (*scope*) maka upaya pengendalian akan lebih mudah dilakukan. Meskipun koordinasi telah dilakukan setingkat RW, tetapi penyebaran Covid-19 masih tetap terjadi. Hal ini karena aktivitas perekonomian masyarakat tetap berjalan. Berbeda dengan pembatasan sosial yang biasanya berfokus pada aspek kesehatan. Dengan demikian, gerakan *jogo tonggo* menyeimbangkan antara aspek kesehatan (menjaga kesehatan warganya), aspek ekonomi (memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi), serta aspek sosial dan aspek keamanan (menjaga keamanan dan kenyamanan warga). Tidak tertinggal, gerakan *jogo tonggo* ini juga menyertakan aspek hiburan

(untuk mengurangi kejenuhan warga dengan melaksanakan hiburan mandiri sesuai kearifan lokal tiap-tiap daerah).

3. Sambatan Jogja (Sonjo)

Berdasarkan literatur, modal sosial memiliki peran penting dalam situasi kritis dan Indonesia telah mengadopsinya sebagai strategi pemulihan bencana alam. Selanjutnya, jika dimanfaatkan dengan baik maka modal sosial juga mampu meminimalisir dampak buruk dari pandemi Covid-19 sebagai bencana yang menjadi beban publik. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Covid-19 sebagai musuh bersama dan terbebasnya masyarakat dari pandemi perlakuannya seperti *public goods*, yang *nonrival* dan *nonexcludable* sehingga semua orang akan merasakan dampaknya. Untuk itu, perlu ada sinergi kerja

sama antarmasyarakat sendiri sebagai modal sosial dalam penanganan pandemi Covid-19. Gerakan *sonjo* menasar pada masyarakat rentan terdampak pandemi Covid-19 dengan berpegang pada nilai-nilai integritas, transparansi, empati, dan sinergi. Sinergi dan pemecahan masalah oleh *sonjo* dilakukan melalui grup WhatsApp dengan membuka kesempatan permintaan dari anggota dan kemudian memenuhinya dengan pasokan di antara anggotanya sendiri. Dalam pengembangan program maka terlaksana perlindungan ekonomi rakyat dengan terbentuknya *Sonjo Angkringan*, *Sonjo Migunani* yang merupakan media pelatihan, dan sinergi antara pihak-pihak yang terlibat.

Kemudian apa dan siapa sebenarnya *sonjo*? *Sonjo* (*Sambatan Jogja*) adalah sebuah gerakan kemanusiaan inspiratif yang telah beroperasi sejak 24 Maret 2020 dan berbasis di grup WhatsApp (WAG). Saat ini *sonjo* sudah beranggotakan 2000 orang yang terdiri dari 20 grup WhatsApp internal dan 4 grup WhatsApp untuk kerja sama dengan komunitas lain di Jawa Barat, Jakarta, dan Jawa Tengah. *Sonjo* bertujuan untuk membantu masyarakat yang berisiko dan rentan dari dampak buruk Covid-19 di Provinsi Yogyakarta. *Sonjo* bergerak di tiga bidang: kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, serta telah mengembangkan 21 program yang terdiri dari 7 program di bidang ekonomi dan 14 program di bidang kesehatan.

Sampai saat ini, *sonjo* memiliki 21 program yang terbagi menjadi ekonomi dan kesehatan. Di bidang kesehatan, program pertama yang digagas *sonjo* bernama *Sonjo Rewangan*. Program ini menciptakan

sistem rujukan pasien Covid-19 antarrumah sakit dan berhasil membantu 150 pasien mendapatkan pelayanan pengobatan yang layak. Program kedua di bidang kesehatan adalah pendirian *shelter* bertingkat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Bantul, yang bertujuan untuk mengklasifikasikan pasien Covid-19 berdasarkan tingkat kekritisiannya. Dengan menggunakan metode ini, hanya pasien dengan gejala sedang hingga tinggi yang dapat diprioritaskan untuk ditempatkan di rumah sakit.

REKOMENDASI

Pertama, negara perlu memiliki banyak pengungkit yang jelas untuk menciptakan berbagai bentuk modal sosial. Modal sosial sering kali merupakan produk sampingan dari keyakinan, tradisi, pengalaman sejarah bersama, dan faktor-faktor lain yang berada di luar kendali pemerintah. Kebijakan publik dapat mengetahui bentuk-bentuk modal sosial yang sudah ada –misalnya, jaringan sosial yang digunakan untuk penanggulangan pandemi Covid-19 atau pengembangan informasi untuk pinjaman mikro– tetapi tidak dapat menduplikasi pengaruh keyakinan sebagai sumber nilai-nilai bersama. Pembuat kebijakan juga perlu menyadari bahwa modal sosial, terutama jika dikaitkan dengan kelompok yang memiliki radius kepercayaan yang sempit, dapat menghasilkan eksternalitas negatif dan merugikan masyarakat yang lebih luas.

Kedua, bidang di mana pemerintah mungkin memiliki kemampuan langsung terbesar untuk menghasilkan modal sosial adalah pendidikan. Lembaga pendidikan tidak sekadar mentransmisikan modal manusia. Mereka juga mewariskan modal sosial dalam bentuk aturan dan norma

sosial. Hal ini berlaku tidak hanya di pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga di pendidikan tinggi dan profesional. Misalnya dokter tidak hanya belajar kedokteran, tetapi juga sumpah profesional; kemudian perlindungan masyarakat dari korupsi dengan memberikan pelatihan profesional berkualitas tinggi kepada birokrat senior dan untuk menciptakan *esprit de corps*.

Ketiga, negara secara tidak langsung dapat mendorong penciptaan modal sosial dengan menyediakan barang publik yang diperlukan, khususnya hak milik dan keamanan publik. Ada juga skala ekonomi yang didorong pemerintah dalam penyebaran kekuatan koersif yang digunakan untuk menegakkan hak milik. Orang tidak dapat bergaul dan membentuk modal sosial, menjadi sukarelawan, memilih, atau menjaga satu sama lain jika mereka takut akan nyawa mereka ketika berjalan di jalan. Jadi negara perlu hadir dan menjaga lingkungan yang stabil dan aman untuk interaksi publik dan hak milik. Modal sosial muncul berdasarkan kepercayaan yang muncul secara spontan sebagai hasil interaksi berulang dari individu yang rasional yang merasa nyaman dalam lingkungan stabil yang diciptakan negara.

Keempat, negara dapat memiliki dampak negatif yang serius pada modal sosial apabila kegiatan yang sebaiknya dikembangkan oleh masyarakat secara inklusif lalu diserahkan kepada swasta. Kemampuan bekerja sama didasarkan pada kebiasaan dan latihan mandiri di antara masyarakat. Meskipun demikian, jika negara terlibat dalam urusan mengatur segalanya, orang akan menjadi bergantung padanya dan kehilangan kemampuan spontan mereka untuk bekerja dengan satu

sama lain dalam konteks membangun modal sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/19/145548265/cantelan-sembako-simbol-solidaritas-masyarakat-indonesia-di-tengah-pandemi?page=all>. Diakses tanggal 20 November 2021.
- <https://jatengprov.go.id/rilis/percepat-tangani-covid-19-dengan-jogotonggo-apa-itu/>. Diakses tanggal 18 November 2021.
- <https://localisesdgs-indonesia.org/beranda/cs/program-jogotonggo>. Diakses tanggal 18 November 2021.
- <https://feb.ugm.ac.id/en/news/3373-minimizing-the-adverse-health-and-economic-impacts-of-covid-19-through-social-capital-in-the-digital-era>
- <https://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.htm>. ■

PROFIL PENULIS

Budhi Santoso merupakan Perencana Ahli Utama di Kementerian PPN/Bappenas

TIPS MENGHINDARI KEJENUHAN DALAM PEKERJAAN DI KANTOR

Foto: freepik.com

Salah satu yang menjadi masalah umum dalam dunia pekerjaan adalah kejenuhan. Tidak bisa dimungkiri, kebanyakan orang pasti pernah mengalami kejenuhan dalam bekerja.

Melansir Forbes, kejenuhan dalam bekerja dapat berupa perasaan sementara atau sesuatu yang tidak hilang sampai Anda melakukan perubahan dalam pekerjaan. Kejenuhan yang tidak diatasi dan bersifat lama dapat mengubah gaya hidup seseorang hingga sulit berkonsentrasi dan memotivasi diri, terlebih dalam situasi Covid-19 yang

masih melanda dunia, khususnya di Indonesia. Kebanyakan instansi pemerintah masih mewajibkan pegawainya untuk bekerja dari rumah (*work from home*/WFH). Tanpa pertemuan fisik yang harus dihadiri, tidak ada rekan kerja untuk menikmati obrolan, atau hal lainnya menjadikan WFH sangat menjenuhkan dan terlalu membosankan.

Berfokus untuk menjadi produktif, tentu tidak selalu mudah ketika Anda merasa tidak bersemangat atau kurang tertantang. Namun, kejenuhan dalam bekerja ini tidak dapat diabaikan, bahkan memiliki konsekuensi yang akan dihadapi seperti meningkatnya stres, mengembangkan kebiasaan buruk, dan produktivitas yang menurun. Kejenuhan tidak akan hilang, kecuali

Anda mengambil tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Jangan merasa seperti Anda sendirian dengan perasaan kejenuhan tersebut. Berikut ada beberapa tips untuk menghindari kejenuhan dalam pekerjaan di kantor.

TIDUR YANG CUKUP

Memiliki tidur yang cukup dan berkualitas dapat membuat Anda tetap aktif sepanjang hari. Hal ini berbeda jika Anda kurang tidur yang dapat membuat tubuh seolah-olah tidak tidur sama sekali. Orang yang kekurangan tidur cenderung menjadi kurang produktif selama bekerja dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Kurang tidur juga memengaruhi suasana hati, dimana kurangnya

istirahat dapat memengaruhi pengambilan keputusan dan pemikiran inovatif. Jika Anda sulit berkonsentrasi dan energi berkurang, mungkin bisa jadi Anda tidak cukup tidur selama 7–9 jam setiap malam.

MENINGKATKAN KECERDASAN EMOSIONAL (EQ) ANDA

Mengembangkan kesadaran emosional, akan membantu Anda menjadi lebih tegas dan termotivasi untuk menerapkan perubahan, sehingga dapat mengatasi kejenuhan dalam bekerja. Menurut peneliti pakar kecerdasan emosional Dr. Travis Bradberry menunjukkan bahwa 90% orang yang berkinerja terbaik juga memiliki EQ yang tinggi dan hanya 20% dari orang yang berkinerja rendah yang memiliki EQ yang tinggi. Menurut Bradberry, EQ terdiri dari (1) kompetensi pribadi, yang terdiri atas kesadaran diri dan keterampilan manajemen diri; dan (2) kompetensi sosial, yang didefinisikan sebagai kesadaran sosial dan manajemen hubungan.

Dengan memiliki kecerdasan emosional yang baik, Anda bisa mencari tahu penyebab rasa bosan dan jenuh tersebut, serta anda bisa mencari cara untuk mengatasinya.

BERI TARGET DAN RASA INGIN TAHU LEBIH PADA KINERJA PEKERJAAN

Kejenuhan pada pekerjaan biasanya terjadi karena hilangnya target dan rasa ingin tahu lebih pada pekerjaan. Rutinitas sehari-hari yang berulang tentunya membuat pegawai cenderung lebih merasa bosan dan jenuh. Coba posisikan diri Anda bahwa pekerjaan yang Anda lakukan akan memberikan manfaat dan berpengaruh pada

kinerja instansi Anda. Beralih dari pemikiran tersebut, Anda akan memiliki target dan rasa ingin tahu terhadap kinerja pekerjaan sehingga akan mendorong pemikiran kreatif, daripada harus merasa jenuh terhadap pekerjaan tersebut.

ATUR ULANG RUANG BEKERJA ANDA

Tidak dapat dihindari bahwa energi dalam suatu ruang bekerja dapat menjadi stagnan jika Anda berada pada tempat yang tidak pernah berubah bahkan cenderung membosankan. Anda dapat pertimbangkan untuk mengatur tata letak ruang kerja, merapikan meja, dan memindahkan beberapa barang.

Berdasarkan halaman SpaceWise, kunci untuk penataan ulang adalah memastikan tempat kerja Anda dekat dengan jendela besar atau cahaya alami, karena bekerja di ruangan yang terlalu gelap dapat menyebabkan kelelahan mata. Melansir Forbes, meletakkan tanaman hijau yang sesuai dengan ukuran meja kerja membantu untuk menurunkan risiko gangguan kecemasan dan tingkat stres yang tinggi.

BUAT SITUASI YANG MENYENANGKAN

Merasa jenuh, bosan, frustrasi, atau terjebak di tempat kerja bukanlah hal yang menyenangkan. Cobalah melakukan sesuatu yang dapat menyenangkan dengan melakukan hal-hal seru saat bekerja. Banyak pilihan yang dapat Anda lakukan, contohnya Anda dapat menyelingi waktu dengan mendengarkan musik atau bermain *game* saat waktu istirahat dan pekerjaan sedang tidak terlalu penuh. Intinya, carilah kegiatan yang bisa membuat Anda terhibur dan senang.

Ketika Anda merasa jenuh di tempat kerja, sebenarnya hal tersebut adalah tanda peringatan yang tidak boleh diabaikan. Jika Anda membiarkan kejenuhan ini berlanjut, Anda mempertaruhkan kesehatan mental dan kebahagiaan. Berhentilah melakukan hal yang sama setiap hari dan membiarkan diri Anda merasa jenuh. Mulailah membuat perubahan pada diri Anda, agar kembali bersemangat dengan pekerjaan dan kehidupan.

(Penulis: Roseiga Retno Anggarani/Pusbindiklatren) ■





Menju Perencana Profesional

SIMPUL
Perencana

KUESIONER MAJALAH SIMPUL PERENCANA VOLUME 41 TAHUN 2021

I. TAMPILAN MAJALAH SIMPUL PERENCANA

1. Tampilan cover majalah Simpul Perencana volume 41 tahun 2021:
 - a. menarik
 - b. kurang menarik
2. Tampilan cover majalah Simpul Perencana volume 41 tahun 2021 sudah mencerminkan tema:
 - a. sudah
 - b. belum
3. Susunan warna dan tata letak foto-foto ilustrasi dalam isi majalah Simpul Perencana volume 41 tahun 2021:
 - a. menarik
 - b. kurang menarik

II. SUBSTANSI/ISI MAJALAH SIMPUL PERENCANA

1. Tema yang diangkat dalam majalah Simpul Perencana volume 41 tahun 2021:
 - a. menarik
 - b. kurang menarik
2. Tema yang diangkat dalam majalah Simpul Perencana volume 41 tahun 2021 sudah sesuai dengan isu terkini:
 - a. sudah
 - b. belum

3. Susunan atau struktur konten dalam majalah Simpul Perencana volume 41 tahun 2021 sudah baik:
 - a. sudah
 - b. belum
4. Bahasa dan ilustrasi (gambar, grafik, dan tabel) dalam majalah Simpul Perencana volume 41 tahun 2021 mudah dipahami:
 - a. iya
 - b. tidak
5. Majalah Simpul Perencana volume 41 tahun 2021 memberikan informasi terkini dan menjadi referensi dalam pengambilan keputusan:
 - a. iya
 - b. tidak

III. PENYEBARLUASAN MAJALAH SIMPUL PERENCANA

1. Majalah Simpul Perencana volume 41 tahun 2021 yang dikirimkan oleh Pusbindiklatren Bappenas dapat diterima dengan baik:
 - a. iya
 - b. tidak
2. Apakah majalah Simpul Perencana yang telah Saudara terima juga diinformasikan kepada staf Saudara?
 - a. iya
 - b. tidak

3. Selain Pusbindiklatren mengirimkan majalah Simpul Perencana volume 41 tahun 2021 kepada instansi Saudara, kami juga telah memuat dalam situs web Pusbindiklatren Bappenas (karena keterbatasan cetak), apakah saudara menginformasikan/disposisikan kepada staf atau kolega untuk mengakses majalah Simpul Perencana volume 41 tahun 2021 di situs web Pusbindiklatren Bappenas?
 - a. iya
 - b. tidak

KETENTUAN:

- Lingkari jawaban pada huruf a atau b sesuai pilihan Anda.
- Kuesioner yang telah selesai dijawab selanjutnya dipotret dengan kamera. Usahakan hasil foto tidak kabur (*blur*) sehingga tulisan dan jawaban dapat terbaca dengan jelas.
- Hasil foto selanjutnya dikirim melalui pos-el (*e-mail*) ke: **pusbindiklatren@bappenas.go.id**
- Pengisian kuesioner evaluasi Majalah Simpul Perencana juga dapat dilakukan secara daring (*online*) melalui tautan (*link*) berikut: **bit.ly/evaluasi-simpul**



Langkah **HINDARI NARKOBA**



Tolak ajakan merokok. Merokok adalah pintu gerbang penyalahgunaan narkotika.



Isi waktu luang dengan kegiatan positif seperti olahraga, bermain musik, belajar, dan lainnya.

Kenali temanmu. Pilihlah teman yang selalu mengajak kepada kebaikan.



Ingat bahwa tidak ada ajaran agama yang membenarkan penyalahgunaan narkoba.

Hindari kelompok/teman nongkrong yang tidak sehat. Sapa lalu pergi, lakukan dalam tiga detik.



Ada keluarga yang menyayangi kita. Ciptakan komunikasi yang baik dengan keluarga.

Sehat Bahagia Tanpa Narkoba

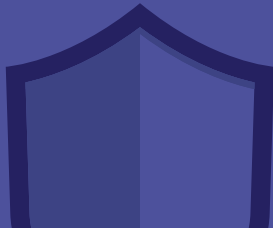


Kewajiban bagi Tamu

Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas
untuk Menunjukkan Hasil
Tes PCR/Antigen/Tes GeNose



Mengacu pada Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.



Mempertimbangkan peningkatan kasus positif Covid-19 di Indonesia serta sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, bersama ini kami sampaikan bahwa :

- ▶ Seluruh tamu yang akan berkunjung ke Kantor Kementerian PPN/Bappenas **wajib** menunjukkan surat keterangan Uji Tes PCR/Antigen dengan **hasil negatif** yang masih berlaku pada saat berkunjung (**Hasil Tes PCR/Antigen berlaku 2 x 24 jam**).
- ▶ Bagi tamu yang tidak memiliki surat keterangan negatif Tes PCR/Antigen, **wajib mengikuti Tes GeNose** di Kementerian PPN/Bappenas.

Apabila **Tes GeNose menunjukkan hasil negatif** maka yang bersangkutan diperkenankan untuk melanjutkan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas.

Kebijakan ini berlaku sejak 29 April 2021, dan akan dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.